

2025



SENSUS
EKONOMI
2026

LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(AUDITED)



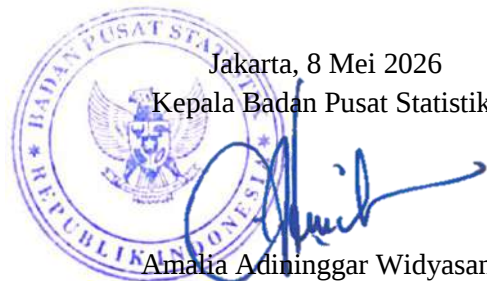
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Di samping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Indeks Tabel	iv
Indeks Grafik	viii
Indeks Singkatan	ix
Indeks CaLK LRA	x
Indeks CaLK Neraca	xi
Indeks CaLK LO	xii
Indeks CaLK LPE	xiii
Indeks CaLK Pengungkapan Penting Lainnya	xiv
Daftar Lampiran	xv
Pernyataan Tanggung Jawab	xvi
I. Ringkasan Laporan Keuangan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	67
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	122
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	142
F. Pengungkapan Penting Lainnya	146

INDEKS TABEL

	Halaman
1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Ringkasan Neraca	2
3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	12
4. Rincian Jumlah Satker UAKPA	12
5. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB	14
6. Penggolongan Kualitas Piutang	16
7. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
8. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud	19
9. Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja	20
10. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	21
11. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana	21
12. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara	25
13. Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Neto TA 2025 dan 2024	27
14. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program	35
15. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	36
16. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Kegiatan Menurut Sumber Dana	36
17. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2025 dan 2024	38
18. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	39
19. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2025 dan 2024	40
20. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42
21. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2025 dan 2024	43
22. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	44
23. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2025 dan 2024	45
24. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	45
25. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2025 dan 2024	46
26. Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur	47
27. Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2025 dan 2024	47
28. Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	48
29. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025 dan 2024	48
30. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional	55
31. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 dan 2024	56
32. Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Sumber Dana	57
33. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	57

34.	Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 dan 2024	58
35.	Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana	58
36.	Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan	59
37.	Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 dan 2024	59
38.	Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana	60
39.	Pagu dan Realisasi Belanja Jasa	60
40.	Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024	60
41.	Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana	61
42.	Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan	61
43.	Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	62
44.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	63
45.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2025 dan 2024	64
46.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana	64
47.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	65
48.	Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2025 dan 2024	65
49.	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal	66
50.	Realisasi Belanja Barang Modal TA 2025 dan 2024	66
51.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah	67
52.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024	67
53.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68
54.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024	68
55.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Sumber Dana	69
56.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69
57.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024	70
58.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Sumber Dana	70
59.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya	71
60.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024	71
61.	Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Sumber Dana	71
62.	Rincian Aset Lancar	67
63.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	68
64.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>) per Wilayah/Satker	68
65.	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Wilayah/Satker	69
66.	Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker	70
67.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker	71
68.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	72

69.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	73
70.	Rincian Persediaan	73
71.	Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker	74
72.	Rincian Aset Tetap	75
73.	Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2025	75
74.	Perubahan Saldo Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024	76
75.	Rincian Permasalahan Tanah	79
76.	Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024	80
77.	Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024	90
78.	Rincian Aset Tetap Lainnya	98
79.	Rincian KDP Per Wilayah/Satker	101
80.	Kondisi KDP Per Wilayah/Satker	101
81.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024	105
82.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap	105
83.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN Per 2025	106
84.	Rincian Aset Lainnya	107
85.	Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024	108
86.	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Wilayah/Satker	110
87.	Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024	111
88.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	116
89.	Rincian Nilai Buku Aset Lainnya	116
90.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	117
91.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	118
92.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker	118
93.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Wilayah/Satker	119
94.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker	120
95.	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker	121
96.	Rincian PNBPN Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	122
97.	Perbandingan PNBPN Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2025	122
98.	Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024	124
99.	Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2025	125
100.	Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	127
101.	Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024	128

102.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Per 31 Desember 2025	129
103.	Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	130
104.	Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Per 31 Desember 2025	131
105.	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024	132
106.	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Per 31 Desember 2025	132
107.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	134
108.	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024	135
109.	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	136
110.	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA Per 31 Desember 2025	136
111.	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	137
112.	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	138
113.	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2025	139
114.	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	140
115.	Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	142
116.	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas	144
117.	Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain	144
118.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe I	153
119.	Rincian Kerja Sama Swakelola Tipe I (Settama BPS) TA 2025	153
120.	Rincian Kerja Sama Swakelola Tipe I (Daerah) TA 2025	153
121.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Nilai PKS	154
122.	Rincian Nilai Kerja Sama Swakelola Tipe II (Settama BPS) TA 2025	154
123.	Rincian Nilai Kerja Sama Swakelola Tipe II ((Polstat STIS dan Pusdiklat) TA 2025	155
124.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Anggaran dan Realisasi	156
125.	Rekapitulasi Kerja Sama PNBPN-Non APBN BPS	157
126.	Kerja Sama Swakelola Tipe II (RPL) Tahun Anggaran 2025	158
127.	Kerja Sama Layanan Administrasi Umum dan Kerahasiaan Data TA 2025	158
128.	Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS	160
129.	Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah	160
130.	Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (Bentuk Uang) TA 2025	161
131.	Rincian Output Prioritas Nasional VII	166

INDEKS GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 dan 2024	27
2 Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 dan 2024	28
3 Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2025	40

INDEKS SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BMN	: Barang Milik Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
MONSAKTI	: <i>Monitoring</i> SAKTI
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	: Kas Umum Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
SSBP	: Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	: Satuan Kerja
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	: Rencana Strategis

INDEKS CALK LRA

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
	B.1	Pendapatan Negara dan Hibah	25
Catatan	B.1.1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	29
Catatan	B.1.2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	30
Catatan	B.1.3	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	31
Catatan	B.1.4	Pendapatan Denda	32
Catatan	B.1.5	Pendapatan Lain-lain	33
Belanja			
	B.2	Belanja	35
Catatan	B.2.1	Belanja Pegawai	41
	B.2.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42
	B.2.1.2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	44
	B.2.1.3	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	45
	B.2.1.4	Belanja Uang Lembur	47
	B.2.1.5	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	48
Catatan	B.2.2	Belanja Barang	49
	B.2.2.1	Belanja Barang Operasional	55
	B.2.2.2	Belanja Barang Non Operasional	57
	B.2.2.3	Belanja Barang Persediaan	58
	B.2.2.4	Belanja Jasa	60
	B.2.2.5	Belanja Pemeliharaan	61
	B.2.2.6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	63
	B.2.2.7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	64
Catatan	B.2.3	Belanja Modal	65
	B.2.3.1	Belanja Modal Tanah	66
	B.2.3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68
	B.2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69
	B.2.3.4	Belanja Modal Lainnya	70

INDEKS CaLK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA			Halaman
	C.1	ASET	67
	C.1.1	Aset Lancar	67
Catatan	C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	67
Catatan	C.1.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	67
Catatan	C.1.1.3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	68
Catatan	C.1.1.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	69
Catatan	C.1.1.5	Piutang Bukan Pajak	70
Catatan	C.1.1.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	71
Catatan	C.1.1.7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	71
Catatan	C.1.1.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	72
Catatan	C.1.1.9	Persediaan	73
	C.1.2	Aset Tetap	75
Catatan	C.1.2.1	Tanah	76
Catatan	C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	80
Catatan	C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	90
Catatan	C.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	97
Catatan	C.1.2.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	101
Catatan	C.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	105
	C.1.3	Piutang Jangka Panjang	106
Catatan	C.1.3.1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	106
Catatan	C.1.3.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	107
	C.1.4	Aset Lainnya	107
Catatan	C.1.4.1	Aset Tak Berwujud	108
Catatan	C.1.4.2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	110
Catatan	C.1.4.3	Aset Lain-lain	111
Catatan	C.1.4.4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	115
	C.2	Kewajiban	117
	C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	117
Catatan	C.2.1.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	118
Catatan	C.2.1.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	119
Catatan	C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	120
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	120
Catatan	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	120
	C.3	Ekuitas	121
Catatan	C.3.1	Ekuitas	121

INDEKS CaLK LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah	
D.1 Pendapatan Operasional	122
D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	122
Catatan D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	122
D.2 Beban Operasional	124
Catatan D.2.1 Beban Pegawai	124
Catatan D.2.2 Beban Persediaan	127
Catatan D.2.3 Beban Barang dan Jasa	128
Catatan D.2.4 Beban Pemeliharaan	130
Catatan D.2.5 Beban Perjalanan Dinas	132
Catatan D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	133
Catatan D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	135
D.3 Pendapatan dan Beban Non Operasional	136
Catatan D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	136
Catatan D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar	137
D.4 Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	138
Catatan D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	138
Catatan D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	140

INDEKS CaLK LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			Halaman
Catatan	E.1	Ekuitas Awal	142
Catatan	E.2	Surplus (Defisit) LO	142
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	142
Catatan	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	142
Catatan	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	143
Catatan	E.3.3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	143
Catatan	E.3.4	Koreksi Lain-Lain	143
Catatan	E.4	Transaksi Antar Entitas	143
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	144
	E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	144
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	145
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	145
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	145
Catatan	E.5	Ekuitas Akhir	145

INDEKS CALK PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	Halaman
F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	146
F.2 Revisi DIPA	146
F.3 Rekening BPS	150
F.4 Kerja Sama Swakelola Tipe I	153
F.5 Kerja Sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNPB	154
F.6 Kerja Sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	158
F.7 Hibah Langsung Dalam Negeri	159
F.8 Hibah Langsung Luar Negeri	161
F.9 Pengungkapan Program Prioritas Nasional	165
F.10 Pengungkapan Capaian Output	166
F.11 Pengungkapan Lain-Lain	166

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan (Print Out MONSAKTI)
2. Laporan BMN (Print Out MONSAKTI)
3. Daftar Rekening Pemerintah (Aktif dan Tutup)
4. Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut BPS Terhadap Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan
5. TP/TGR
6. Revisi DIPA
7. Capaian Output Strategis dan Program Prioritas Nasional
8. Kertas Kerja Telaah LK Tingkat UAPA
9. To Do List
10. Kerja Sama Hibah, PNBP, dan Swakelola

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp174.059.663.929,00 atau mencapai 102,59 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp169.665.433.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.105.181.732.431,00 atau mencapai 87,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.818.983.499.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara	169.665.433.000	174.059.663.929	102,59	66.221.481.321
Belanja Negara	5.818.983.499.000	5.105.181.732.431	87,73	4.411.827.097.514

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.637.903.551.218,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp55.419.831.674,00, Aset Tetap (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp5.439.702.162.188,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi) sebesar Rp142.781.557.356,00.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp141.094.629.993,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar Rp5.496.808.921.225,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset				
Aset Lancar	55.419.831.674	51.921.547.997	3.498.283.677	6,74
Aset Tetap	5.439.702.162.188	5.244.096.052.870	195.606.109.318	3,73
Piutang Jangka Panjang	0	3.184.001	(3.184.001)	(100,00)
Aset Lainnya	142.781.557.356	78.697.257.216	64.084.300.140	81,43
Jumlah Aset	5.637.903.551.218	5.374.718.042.084	263.185.509.134	4,90
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	141.094.629.993	134.903.055.440	6.191.574.553	4,59
Jumlah Kewajiban	141.094.629.993	134.903.055.440	6.191.574.553	4,59
Ekuitas				
Ekuitas	5.496.808.921.225	5.239.814.986.644	256.993.934.581	4,90
Jumlah Ekuitas	5.496.808.921.225	5.239.814.986.644	256.993.934.581	4,90
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	5.637.903.551.218	5.374.718.042.084	263.185.509.134	4,90

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp161.430.898.522,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp5.012.361.957.901,00, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp4.850.931.059.379,00. Kegiatan Non Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami surplus sebesar Rp21.742.869.252,00. Defisit dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional menyebabkan BPS mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.829.188.190.127,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp5.239.814.986.644,00 dikurang dengan Defisit-LO sebesar Rp4.829.188.190.127,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai minus Rp18.469.720.414,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp5.104.651.845.122,00 sehingga menghasilkan Ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.496.808.921.225,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

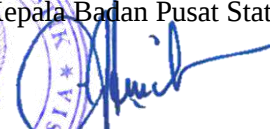
Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2025 didasarkan pada basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
A.I Pendapatan Negara					
A.I.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.I.1.a Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	B.1.1	13.103.446.000	11.632.957.346	88,78	34.398.715.135
A.I.1.b Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	B.1.2	156.551.692.000	156.800.553.638	100,16	20.044.070.941
A.I.1.c Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	B.1.3	10.295.000	401.625.983	3.901,18	1.406.882.341
A.I.1.d Pendapatan Denda	B.1.4	0	1.729.646.674	0,00	2.125.847.824
A.I.1.e Pendapatan Lain - Lain	B.1.5	0	3.494.880.288	0,00	8.245.965.080
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak		169.665.433.000	174.059.663.929	102,59	66.221.481.321
Jumlah Pendapatan Negara		169.665.433.000	174.059.663.929	102,59	66.221.481.321
A.II Hibah		0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		169.665.433.000	174.059.663.929	102,59	66.221.481.321
B. Belanja Negara	B.2				
B.1 Belanja Pegawai	B.2.1	2.805.730.765.000	2.690.376.628.898	95,89	2.554.664.732.721
B.2 Belanja Barang	B.2.2	2.542.890.308.000	2.060.179.703.107	81,02	1.658.893.288.228
B.3. Belanja Modal	B.2.3	470.362.426.000	354.625.400.426	75,39	198.269.076.565
Jumlah Belanja Negara		5.818.983.499.000	5.105.181.732.431	87,73	4.411.827.097.514

Jakarta, 8 Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

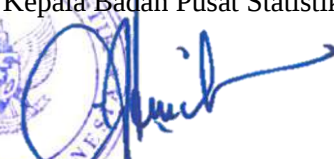
III. NERACA

**BADAN PUSAT STATISTIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025	TA 2024
ASET	C.1		
Aset Lancar	C.1.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	0	6.230.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.2	8.765.194	13.080.793
Jumlah Kas dan Bank		8.765.194	19.310.793
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.1.3	17.599.683.644	17.435.230.541
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.1.4	102.859.500	0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.5	1.613.758.370	2.041.478.916
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.6	(1.089.606.557)	(434.784.343)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		524.151.813	1.606.694.573
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.1.1.7	16.167.310.979	15.227.357.084
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.8	(15.193.001.599)	(15.190.110.920)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR (<i>Netto</i>)		974.309.380	37.246.164
Jumlah Piutang (Bersih)		1.498.461.193	1.643.940.737
Persediaan	C.1.1.9	36.210.062.143	32.823.065.926
Jumlah Aset Lancar		55.419.831.674	51.921.547.997
Aset Tetap	C.1.2		
Tanah	C.1.2.1	3.372.760.426.374	3.218.598.001.809
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	2.309.714.137.898	2.196.281.247.356
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	2.118.665.938.246	2.089.954.257.109
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.4	29.118.309.243	35.254.629.078
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.5	7.722.305.444	27.044.596.490
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.6	(2.398.278.955.017)	(2.323.036.678.972)
Jumlah Aset Tetap		5.439.702.162.188	5.244.096.052.870
Piutang Jangka Panjang	C.1.3		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.1.3.1	0	3.200.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.1.3.2	0	(15.999)
Tagihan Tuntutan TP/TGR (<i>Netto</i>)		0	3.184.001
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		0	3.184.001
Aset Lainnya	C.1.4		
Aset tak Berwujud	C.1.4.1	329.587.983.397	424.359.166.700
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.4.2	41.492.247.558	47.577.860.572
Aset Lain-lain	C.1.4.3	152.206.910.434	119.625.931.594
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.4	(380.505.584.033)	(512.865.701.650)
Jumlah Aset Lainnya		142.781.557.356	78.697.257.216
JUMLAH ASET		5.637.903.551.218	5.374.718.042.084
KEWAJIBAN	C.2		
Kewajiban Jangka Pendek	C.2.1		
Utang Pada Pihak Ketiga	C.2.1.1	140.727.772.209	134.188.923.301
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.1.2	0	2.258.193
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	358.092.590	692.563.153
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.4	0	6.230.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	8.765.194	13.080.793
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		141.094.629.993	134.903.055.440
JUMLAH KEWAJIBAN		141.094.629.993	134.903.055.440
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	5.496.808.921.225	5.239.814.986.644
JUMLAH EKUITAS		5.496.808.921.225	5.239.814.986.644
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.637.903.551.218	5.374.718.042.084

Jakarta, 8 Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik,

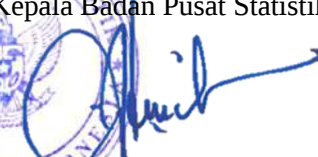

Amalia Adininggar Widayanti

IV. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025	TA 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	161.430.898.522	25.840.049.069
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		161.430.898.522	25.840.049.069
Jumlah Pendapatan Operasional		161.430.898.522	25.840.049.069
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.1	2.699.567.484.166	2.556.576.283.850
Beban Persediaan	D.2.2	56.727.656.091	62.186.017.523
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	1.316.177.953.213	907.860.659.689
Beban Pemeliharaan	D.2.4	146.730.634.656	142.774.692.030
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	552.810.606.425	563.952.482.272
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	239.691.870.128	221.955.168.092
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	655.753.222	(2.039.086.520)
Jumlah Beban Operasional		5.012.361.957.901	4.453.266.216.936
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(4.850.931.059.379)	(4.427.426.167.867)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	8.937.026.127	28.353.655.356
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	8.859.872.221	16.730.740.475
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		77.153.906	11.622.914.881
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	28.993.319.726	8.665.572.814
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	7.327.604.380	6.360.020.499
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.665.715.346	2.305.552.315
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		21.742.869.252	13.928.467.196
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(4.829.188.190.127)	(4.413.497.700.671)

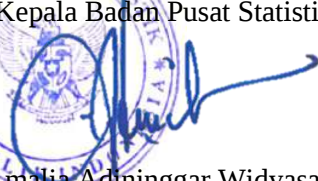
Jakarta, 8 Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PUSAT STATISTIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025	TA 2024
EKUITAS AWAL	E.1	5.239.814.986.644	5.297.290.032.446
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.2	(4.829.188.190.127)	(4.413.497.700.671)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	18.740.106	117.590.891
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	26.556.105	(23.844.077)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(18.859.107.658)	1.533.394.535
Lain - Lain	E.3.4	344.091.033	(1.649.760.641)
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(18.469.720.414)	(22.619.292)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.104.651.845.122	4.356.045.274.161
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		256.993.934.581	(57.475.045.802)
EKUITAS AKHIR	E.5	5.496.808.921.225	5.239.814.986.644

Jakarta, 8 Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widhyasanti

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk mendukung pembangunan nasional jangka menengah tahun 2025-2029, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, berupaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif, dan membangun dan menyiapkan SDM yang berkualitas unggul dan adaptif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**,

Misi BPS:

1. Menyediakan data statistik berkualitas dan *Insight* untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
2. Memperkuat kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS menetapkan tujuan strategis yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya. Dengan adanya penetapan tujuan strategis ini maka BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden. Terdapat tiga tujuan strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan *insight* yang relevan;
2. Mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien;
3. Mewujudkan tata kelola Badan Pusat Statistik yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien dalam menyelenggarakan statistik.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan; (b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan; (c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta (d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun daerah.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

BPS sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik bahwa BPS mempunyai perwakilan di daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di daerah.

Susunan organisasi BPS diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik terdiri dari:

1. Kepala
Mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.
2. Wakil Kepala
Mempunyai tugas membantu Kepala BPS dalam melaksanakan tugas memimpin BPS.
3. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

4. **Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

5. **Deputi Bidang Statistik Sosial**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

6. **Deputi Bidang Statistik Produksi**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

7. **Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

8. **Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

9. **Inspektorat Utama**

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

10. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan**

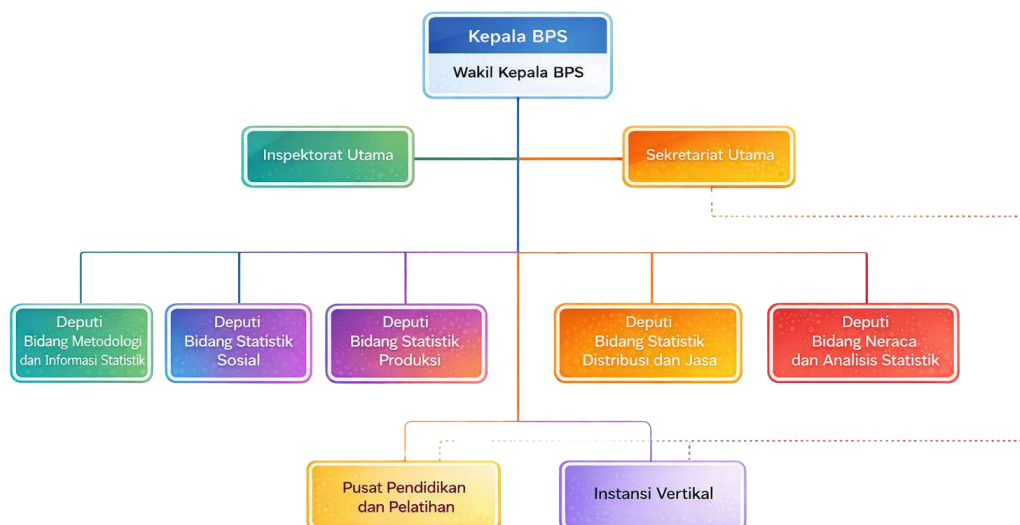
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

11. **Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik**

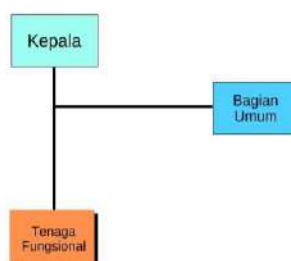
Mempunyai tugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.

12. **Instansi Vertikal**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Pusat



Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Provinsi



Gambar 3. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BPS yaitu wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 532 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 532 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	529	-	-	-	-	-	532
Jumlah			3	-	529	-	-	-	-	-	532

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Keuangan

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini, satuan kerja yang dicakup dalam laporan keuangan BPS meliputi 532 satuan kerja yang berada dalam satu eselon I yang terdiri dari 3 satker pusat, 34 satker provinsi, dan 495 satker kabupaten/kota dengan rincian yang tersebut dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Rincian Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Sekretariat Utama BPS	1
2	0199	Pusdiklat BPS	1
3	0199	Politeknik Statistika STIS	1
4	0100	DKI Jakarta	7
5	0200	Jawa Barat	28
6	0300	Jawa Tengah	36
7	0400	DI Yogyakarta	6
8	0500	Jawa Timur	39
9	0600	Aceh	24

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2025

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
10	0700	Sumatera Utara	34
11	0800	Sumatera Barat	20
12	0900	Riau	13
13	1000	Jambi	12
14	1100	Sumatera Selatan	16
15	1200	Lampung	15
16	1300	Kalimantan Barat	15
17	1400	Kalimantan Tengah	15
18	1500	Kalimantan Selatan	14
19	1600	Kalimantan Timur	11
20	1700	Sulawesi Utara	14
21	1800	Sulawesi Tengah	12
22	1900	Sulawesi Selatan	25
23	2000	Sulawesi Tenggara	15
24	2100	Maluku	12
25	2200	Bali	10
26	2300	Nusa Tenggara Barat	11
27	2400	Nusa Tenggara Timur	22
28	2500	Papua	26
29	2600	Bengkulu	11
30	2800	Maluku Utara	10
31	2900	Banten	9
32	3000	Bangka Belitung	8
33	3100	Gorontalo	7
34	3200	Kepulauan Riau	8
35	3300	Papua Barat	11
36	3400	Sulawesi Barat	7
37	3500	Kalimantan Utara	6
Total Satuan Kerja			532

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2025 disusun melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan untuk berbagai jenjang pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan dihasilkan oleh modul-modul yang terdapat pada SAKTI. Laporan keuangan yang menginformasikan tentang pengelolaan keuangan dihasilkan oleh modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, piutang, dan pelaporan (Aklap/GLP). Laporan keuangan yang menginformasikan pengelolaan Barang Milik Negara dihasilkan oleh modul persediaan dan aset tetap.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 532 satker yang menyampaikan Laporan Barang Milik Negara tingkat satker dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	529	-	-	-	-	-	532
Jumlah			3	-	529	-	-	-	-	-	532

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Barang

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Badan Pusat Statistik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari penjualan publikasi BPS diakui setelah munculnya permintaan data publikasi dari konsumen.
 - b. Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan penjualan aset.
 - d. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - e. Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan, dan akhir pendidikan.
 - f. Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas dan setara kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas Piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar

TP/TGR.

- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*first in first out*).
- Nilai Persediaan disajikan di Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan:
 - biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Estimasi pendapatan Badan Pusat Statistik TA 2025 adalah Rp169.665.433.000,00. Estimasi pendapatan tersebut naik sebesar Rp143.597.082.000,00 dari estimasi pendapatan yang semula tercatat sebesar Rp26.068.351.000,00.

Pagu belanja Badan Pusat Statistik TA 2025 adalah sebesar Rp5.818.983.499.000,00. Pagu tersebut naik sebesar Rp113.110.824.000,00 dari pagu awal belanja yang tercatat sebesar Rp5.705.872.675.000,00. Kenaikan pagu belanja terjadi pada kelompok jenis belanja pegawai dan belanja modal. Pagu kelompok jenis belanja pegawai TA 2025 naik menjadi Rp2.805.730.765.000,00 dari pagu semula yang sebesar Rp2.805.730.755.000,00 dengan kenaikan sebesar Rp10.000,00. Sedangkan pagu kelompok jenis belanja modal naik menjadi Rp470.362.426.000,00 dari pagu semula yang sebesar Rp154.612.749.000,00 dengan kenaikan sebesar Rp315.749.677.000,00.

Adapun penurunan pagu selama TA 2025 terdapat pada kelompok jenis belanja barang. Pagu belanja barang TA 2025 sebesar Rp2.542.890.308.000,00 turun sebesar Rp202.638.863.000,00 dari pagu semula yang sebesar Rp2.745.529.171.000,00.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja TA 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja

Uraian	Estimasi dan Pagu (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.029.486.000	13.103.446.000	73.960.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	13.028.570.000	156.551.692.000	143.523.122.000
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	10.295.000	10.295.000	0
Pendapatan Denda	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	26.068.351.000	169.665.433.000	143.597.082.000
Belanja			
Belanja Pegawai	2.805.730.755.000	2.805.730.765.000	10.000
Belanja Barang	2.745.529.171.000	2.542.890.308.000	(202.638.863.000)
Belanja Modal	154.612.749.000	470.362.426.000	315.749.677.000
Jumlah Belanja	5.705.872.675.000	5.818.983.499.000	113.110.824.000

Estimasi pendapatan TA 2025 secara keseluruhan sebesar Rp169.665.433.000,00. Nilai estimasi pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi pendapatan kelompok akun Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai estimasi sebesar Rp13.103.446.000,00, kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dengan nilai estimasi sebesar Rp156.551.692.000,00, kelompok akun Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan dengan nilai estimasi sebesar Rp10.295.000,00, kelompok akun Pendapatan Denda dengan nilai estimasi sebesar Rp0,00, dan kelompok akun Pendapatan Lain-lain dengan nilai estimasi sebesar Rp0,00. Estimasi pendapatan

kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mendapatkan alokasi estimasi pendapatan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan kelompok akun pendapatan ini diperkirakan memiliki potensi penerimaan yang besar selama TA 2025. Potensi ini dikarenakan kelompok akun pendapatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang menyediakan layanan data statistik.

Pagu belanja TA 2025 yang dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan adalah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok program, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan Dukungan Manajemen. Pagu belanja menurut kelompok program mengalami perubahan sepanjang periode TA 2025. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Uraian Program	Pagu (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.178.842.223.000	2.312.770.658.000	133.928.435.000
Program Dukungan Manajemen	3.527.030.452.000	3.506.212.841.000	(20.817.611.000)
Jumlah	5.705.872.675.000	5.818.983.499.000	113.110.824.000

Pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik TA 2025 adalah sebesar Rp2.312.770.658.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp133.928.435.000,00 dari nilai pagu semula yang sebesar Rp2.178.842.223.000,00. Untuk pagu belanja kelompok program Dukungan Manajemen TA 2025 adalah sebesar Rp3.506.212.841.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp20.817.611.000,00 dari nilai pagu awal sebesar Rp3.527.030.452.000,00.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, pagu belanja TA 2025 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Luar Negeri dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perubahan pagu belanja berdasarkan kelompok sumber dana selama periode TA 2025 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 11
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni	5.670.755.807.000	5.670.755.807.000	0
PNBP	11.842.772.000	144.995.708.000	133.152.936.000
Hibah Langsung Luar Negeri	0	3.231.984.000	3.231.984.000
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	23.274.096.000	0	(23.274.096.000)
Jumlah	5.705.872.675.000	5.818.983.499.000	113.110.824.000

Pagu belanja kelompok sumber dana TA 2025 terdapat perubahan kelompok sumber dana yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni, kelompok sumber dana PNBPN, kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri dan kelompok belanja sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni tidak mengalami perubahan dari nilai pagu awal sebesar Rp5.670.755.807.000,00. Pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN mengalami kenaikan sebesar Rp133.152.936.000,00 dari pagu semula sebesar Rp11.842.772.000,00 menjadi sebesar Rp144.995.708.000,00. Dana tersebut digunakan antara lain untuk Kegiatan Diseminasi Dan Metadata Statistik, Pelaksanaan Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, Pengolahan Data Statistik Wisatawan Mancanegara Berdasarkan *Mobile Positioning Data* (MPD), dan Survei Monitoring Dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dengan peruntukan belanja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 berupa:
 - a. Belanja Bahan berupa konsumsi rapat evaluasi SNLIK 2025 di BPS Pusat dan konsumsi rapat koordinasi dan evaluasi.
 - b. Belanja Honor Output Kegiatan berupa Honor Pengarah Tim Pelaksana Pusat SNLIK 2025, Honor Penanggung jawab Tim Pelaksana Pusat SNLIK 2025, Honor Ketua Tim Pelaksana Pusat SNLIK 2025, Honor Wakil Ketua Tim Pelaksana Pusat SNLIK 2025, dan Honor Anggota Tim Pelaksana Pusat SNLIK 2025.
 - c. Belanja Jasa Lainnya berupa penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa perjalanan dinas kegiatan SNLIK 2025 pusat.
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa perjalanan dinas dalam kota kegiatan SNLIK 2025 Pusat.
 - f. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berupa *fullboard* kegiatan SNLIK Tahun 2025, dan perjalanan peserta *fullboard* kegiatan SNLIK Tahun 2025.
2. Survei Monitoring Dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis berupa:
 - a. Belanja Bahan berupa konsumsi rapat koordinasi dan evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG di BPS Pusat, perlengkapan peserta FGD Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Pusat, perlengkapan peserta Rapat Koordinasi Nasional kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, perlengkapan peserta Rapat Evaluasi kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, dan perlengkapan *Workshop* Dampak Kebijakan Program MBG.
 - b. Belanja Honor Output Kegiatan berupa Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen), Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen), Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen), Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen), Honorarium Anggota Tim

Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen), dan Honor pengajar instruktur nasional.

- c. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa pengadaan ATK BPS Pusat, dan pengadaan komputer supplies BPS Pusat.
- d. Belanja Jasa Profesi berupa Honor Narasumber Pakar Praktisi Profesional Kegiatan di Dalam Negeri, Honorarium Narasumber Pejabat Eselon I, Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II, dan Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III.
- e. Belanja Jasa Lainnya berupa Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Pelatihan Pengembangan SDM untuk kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Penyelenggaraan *Workshop* Dampak Kebijakan Program MBG, dan Jasa Publisitas Laporan Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG.
- f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa perjalanan dinas kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Pusat, perjalanan dinas kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Survei *Baseline* Pusat, dan Supervisi kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG.
- g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa transport lokal pusat dan perjalanan dalam kota lebih dari 8 jam Pusat.
- h. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berupa *fullboard* FGD Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, perjalanan *fullboard* FGD Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, *Workshop* Dampak Kebijakan Program MBG, *fullboard* Rapat Koordinasi Nasional kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, perjalanan *Workshop* Dampak Kebijakan Program MBG, dan Perjalanan *fullboard* Rapat Koordinasi Nasional kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG.
- i. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa *fullboard* Rapat Evaluasi kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dan perjalanan *fullboard* Rapat Evaluasi kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG.

Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp3.231.984.000,00 dari pagu semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp3.231.984.000,00. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan *Technical Support to Strengthening Data on Children from National Household Surveys, Population Census, and Big Data* (UNICEF) berupa Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada kegiatan Persiapan Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat, pada *output* Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat dan kegiatan *Population Dynamics Data and Analysis* (UNFPA) berupa Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada kegiatan Persiapan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, pada *output* Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Sedangkan pagu belanja pada pada kelompok sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengalami penurunan sebesar Rp23.274.096.000,00, dari pagu semula sebesar Rp23.274.096.000,00 menjadi Rp0,00.

Pagu belanja kelompok sumber dana RM TA 2025 terdapat pada satuan kerja (satker) BPS di seluruh Indonesia. Sedangkan pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN terdapat pada satuan kerja (satker) sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	PNBP
1	Settama	31.556.424.000
2	Pusdiklat	4.193.936.000
3	Polstat STIS	5.455.324.000
4	BPS Provinsi DKI Jakarta	3.042.936.000
5	BPS Provinsi Jawa Barat	7.283.979.000
6	BPS Provinsi Jawa Tengah	6.358.885.000
7	BPS Provinsi DI Yogyakarta	2.430.261.000
8	BPS Provinsi Jawa Timur	5.488.320.000
9	BPS Provinsi Aceh	4.319.667.000
10	BPS Provinsi Sumatera Utara	3.988.183.000
11	BPS Provinsi Sumatera Barat	2.298.410.000
12	BPS Provinsi Riau	3.166.878.000
13	BPS Provinsi Jambi	1.562.919.000
14	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3.946.657.000
15	BPS Provinsi Lampung	3.376.709.000
16	BPS Provinsi Kalimantan Barat	3.389.573.000
17	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	1.628.922.000
18	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	2.585.684.000
19	BPS Provinsi Kalimantan Timur	1.662.831.000
20	BPS Provinsi Sulawesi Utara	1.981.955.000
21	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	2.328.337.000
22	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	4.115.701.000
23	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	2.808.211.000
24	BPS Provinsi Maluku	2.408.995.000
25	BPS Provinsi Bali	2.697.176.000
26	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.086.494.000
27	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.566.880.000
28	BPS Provinsi Papua	6.499.450.000
29	BPS Provinsi Bengkulu	1.820.013.000
30	BPS Provinsi Maluku Utara	2.137.799.000
31	BPS Provinsi Banten	2.984.169.000
32	BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.403.035.000
33	BPS Provinsi Gorontalo	1.380.558.000
34	BPS Provinsi Kep. Riau	2.033.675.000
35	BPS Provinsi Papua Barat	3.458.928.000
36	BPS Provinsi Sulawesi Barat	1.293.600.000
37	BPS Provinsi Kalimantan Utara	1.254.234.000
Jumlah		144.995.708.000

Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri terdapat pada satuan kerja (satker) sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	SBSN
1	Settama	3.231.984.000
Jumlah		3.231.984.000

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp174.059.663.929,00

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan negara dan hibah selama periode TA 2025 sebesar Rp174.059.663.929,00 atau mencapai 102,59 persen dari estimasi pendapatan dan hibah yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp169.665.433.000,00. Realisasi pendapatan negara dan hibah selama periode TA 2025 secara keseluruhan merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan negara selama periode TA 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara

Uraian	Estimasi (Rp)	Pendapatan Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.103.446.000	11.637.585.008	4.627.662	11.632.957.346	88,78
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	156.551.692.000	156.800.553.638	0	156.800.553.638	100,16
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	10.295.000	401.625.983	0	401.625.983	3.901,18
Pendapatan Denda	0	1.729.646.674	0	1.729.646.674	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	3.498.251.358	3.371.070	3.494.880.288	0,00
Jumlah	169.665.433.000	174.067.662.661	7.998.732	174.059.663.929	102,59

Realisasi pendapatan negara berupa PNBP periode TA 2025 sebesar Rp174.059.663.929,00 yang tersaji dalam Tabel 12 merupakan nilai bersih (neto) pendapatan yang diperoleh dari realisasi pendapatan negara bruto sebesar Rp174.067.662.661,00 dikurangi dengan pengembalian pendapatan negara sebesar Rp7.998.732,00. Pengembalian pendapatan negara terdiri dari pengembalian Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp4.627.662,00, dan pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.371.070,00.

Penjelasan realisasi pendapatan PNBP secara rinci sebagai berikut:

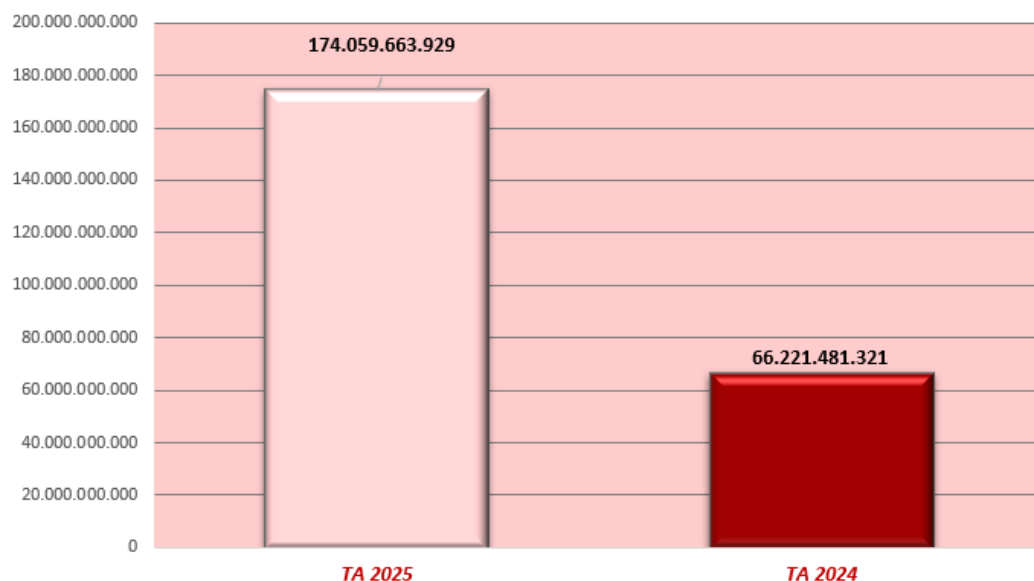
1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2025 ini terdiri dari pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan sewa atas tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi serta pendapatan dan penerimaan klaim asuransi BMN.

2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang perolehannya berasal dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2025 terdiri dari pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, pendapatan dari layanan survey dan pemetaan, serta pendapatan hasil survey dan pemetaan.
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan rekening perbankan dan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2025 terdiri dari pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4. Pendapatan Denda merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan denda lainnya. Pendapatan Denda yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2025 ini terdiri dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.
5. Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi BPS. Pendapatan Lain-lain yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2025 terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, pendapatan dari hibah yang belum disahkan dan pendapatan anggaran lain-lain.

Realisasi pendapatan negara yang tidak terestimasi atau diperkirakan tidak diterima dalam DIPA sampai dengan TA 2025 adalah pendapatan dari pendapatan dan penerimaan klaim asuransi BMN, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan denda lainnya, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non TP/TGR pensiunan PNS, pendapatan dari hibah yang belum disahkan dan pendapatan anggaran lain-lain.

Perbandingan realisasi pendapatan negara dan hibah TA 2025 dan 2024 seperti dilihat pada grafik 1.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
(dalam rupiah)



**Grafik 1: Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
TA 2025 dan 2024**

Realisasi pendapatan negara periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 107.838.182.608,00 atau sebesar 162,84 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama di TA 2024. Perbandingan realisasi pendapatan negara berupa PNPB pada periode TA 2025 dan 2024 secara terinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Neto
TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	11.632.957.346	34.398.715.135	(22.765.757.789)	(66,18)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	156.800.553.638	20.044.070.941	136.756.482.697	682,28
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	401.625.983	1.406.882.341	(1.005.256.358)	(71,45)
Pendapatan Denda	1.729.646.674	2.125.847.824	(396.201.150)	(18,64)
Pendapatan Lain-lain	3.494.880.288	8.245.965.080	(4.751.084.792)	(57,62)
Jumlah	174.059.663.929	66.221.481.321	107.838.182.608	162,84

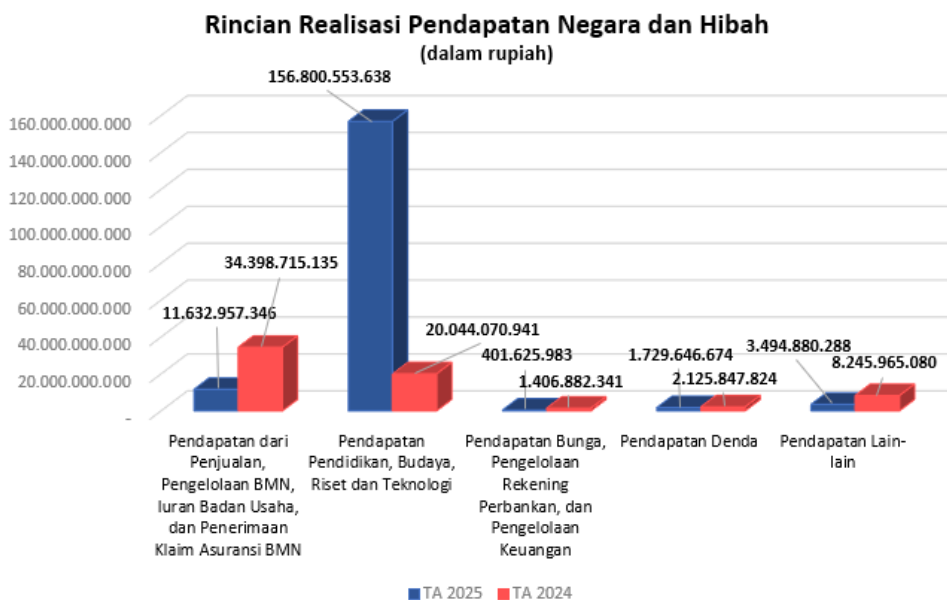
Pada tabel 13 tersaji bahwa terjadi kenaikan realisasi pendapatan pada periode TA 2025 dibandingkan TA 2024. Kenaikan realisasi pendapatan yang dicapai pada periode TA 2025 dibandingkan TA 2024 terdapat pada Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar Rp136.756.482.697,00 atau 682,28 persen. Terdapat penurunan realisasi pendapatan pada periode TA 2025 dibandingkan TA 2024. Penurunan realisasi pendapatan yang dicapai pada periode TA 2025 dibandingkan TA

2024 terdapat pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp22.765.757.789,00 atau 66,18 persen; Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp1.005.256.358,00 atau 71,45 persen; Pendapatan Denda sebesar Rp396.201.150,00 atau 18,64 persen; dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp4.751.084.792,00 atau 57,62 persen.

Kenaikan realisasi pada Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi disebabkan adanya kerjasama antara BPS dengan OJK untuk kegiatan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Sedangkan penurunan realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN disebabkan oleh menurunnya realisasi pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, dan Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Penurunan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan disebabkan oleh menurunnya realisasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Penurunan Pendapatan Denda disebabkan oleh menurunnya realisasi pada Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Serta penurunan Pendapatan Lain-lain disebabkan oleh menurunnya realisasi pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Secara grafis perbandingan realisasi pendapatan negara dan hibah periode TA 2025 dan TA 2024 tersaji secara rinci sebagai berikut.



**Grafik 2: Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
TA 2025 dan 2024**

Pendapatan dari
Penjualan,
Pengelolaan BMN,
Iuran Badan Usaha,
dan Penerimaan
Klaim Asuransi BMN
Rp11.632.957.346,00

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Berdasarkan DIPA TA 2025, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2025 berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp13.103.446.000,00. Sedangkan realisasi penerimaan negara berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN selama periode TA 2025 tercatat sebesar Rp11.632.957.346,00 atau 88,78 persen.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan ini terinci diperoleh dari transaksi penjualan tanah, gedung dan bangunan berupa penjualan pembongkaran hasil renovasi gedung kantor, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan berupa penjualan kendaraan bermotor dan benda inventaris kantor, pendapatan sewa berupa sewa rumah dinas, sewa gedung dan bangunan (sewa kantin) dan pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN.

Adapun rincian realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.584.000	25.627.000	559,05
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	430.624.000	8.062.608.338	1.872,31
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.741.042.000	848.790.789	10,96
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.078.267.000	245.348.341	6,02
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	848.929.000	2.435.560.492	286,90
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	15.022.386	0,00
Jumlah		13.103.446.000	11.632.957.346	88,78

Realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp)	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Rp)	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Rp)	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (Rp)
1	SETTAMA BPS	0	54.316.400	0	140.518.551	243.599.745	15.022.386
2	PUSDIKLAT	0	117.923.853		0	26.054.640	0
3	POLSTAT STIS	0	0	0	85.967.000	82.354.908	0
4	DKI JAKARTA	1.423.000	25.716.692	0	0	18.403.453	0
5	JAWA BARAT	0	617.177.785	0	0	66.161.860	0
6	JAWA TENGAH	0	540.403.100	313.400	0	116.763.049	0
7	DI YOGYAKARTA	0	71.777.813	0	0	27.770.680	0
8	JAWA TIMUR	1.749.000	434.371.043	33.912.600	6.475.000	109.486.601	0
9	ACEH	0	673.019.000	0	0	51.471.680	0
10	SUMATERA UTARA	0	1.418.500	0	0	84.659.154	0
11	SUMATERA BARAT	0	290.229.000	293.696.739	66.576	60.175.783	0

12	RIAU	0	1.456.000	5.387.500	0	44.119.991	0
13	JAMBI	0	91.668.054	0	103.500	57.369.747	0
14	SUMATERA SELATAN	0	482.297.500	0	0	49.488.266	0
15	LAMPUNG	0	245.925.482	0	0	27.713.593	0
16	KALIMANTAN BARAT	0	457.056.950	260.100	0	53.495.564	0
17	KALIMANTAN TENGAH	0	1.370.900	7.239.000	0	66.149.320	0
18	KALIMANTAN SELATAN	0	447.734.100	97.807.000	0	35.993.800	0
19	KALIMANTAN TIMUR	0	44.948.550	88.913.244	0	56.738.040	0
20	SULAWESI UTARA	0	49.944.000	42.215.850	899.818	29.512.646	0
21	SULAWESI TENGAH	0	378.232.420	105.658.340	0	53.697.172	0
22	SULAWESI SELATAN	0	582.062.740	160.129.718	0	76.682.122	0
23	SULAWESI TENGGARA	0	67.384.500	0	5.962.000	31.307.673	0
24	MALUKU	0	100.220.000	0	0	95.562.072	0
25	BALI	0	342.205.000	2.700.000		45.698.027	0
26	NTB	0	77.554.100	0	0	43.984.228	0
27	NTT	0	134.067.583	4.244.000	2.070.000	47.174.547	0
28	PAPUA	0	151.189.018	5.990.548	3.020.600	255.250.921	0
29	BENGKULU	2.753.000	108.120.150	322.750	0	37.386.814	0
30	MALUKU UTARA	0	235.587.500	0	0	94.887.923	0
31	BANTEN	19.702.000	531.612.350	0	0	30.922.892	0
32	KEP. BABEL	0	181.484.755	0	0	33.747.138	0
33	GORONTALO	0		0	265.296	24.540.970	0
34	KEPULAUAN RIAU	0	177.586.000	0	0	57.609.363	0
35	PAPUA BARAT	0	22.860.000	0	0	142.493.160	0
36	SULAWESI BARAT	0	8.756.000	0	0	25.506.842	0
37	KALIMANTAN UTARA	0	314.931.500	0	0	31.626.108	0
Jumlah		25.627.000	8.062.608.338	848.790.789	245.348.341	2.435.560.492	15.022.386

Pendapatan
Pendidikan, Budaya,
Riset, dan Teknologi
Rp156.800.553.638,00

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan DIPA TA 2025, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2025 berupa pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi sebesar Rp156.551.692.000,00. Realisasi penerimaan negara tersebut selama periode TA 2025 sebesar Rp156.800.553.638,00 atau 100,16 persen.

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ujian/seleksi masuk pendidikan yaitu biaya pendaftaran ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS, layanan pendidikan dan/atau pelatihan pada satker Pusdiklat BPS, layanan survei dan pemetaan, serta kegiatan hasil survei dan pemetaan berupa penjualan buku-buku publikasi baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, penjualan data mikro (dalam bentuk *Dbase file*), tabulasi (data mikro dengan proses), penjualan publikasi elektronik/*softcopy* (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk *pdf*), dan penjualan peta digital wilayah (dalam bentuk *softfile*).

Adapun rincian realisasi pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.400.000.000	4.040.100.000	74,82
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	342.450.000	507.000.000	148,05
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.243.320.000	5.225.320.000	99,66
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	140.565.922.000	140.533.857.000	99,98
425435	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	5.000.000.000	6.494.276.638	129,89

Jumlah	156.551.692.000	156.800.553.638	100,16
--------	-----------------	-----------------	--------

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (Rp)	Pendapatan Biaya Pendidikan (Rp)	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (Rp)	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan (Rp)	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan (Rp)
1	SETTAMA BPS	0	0	0	28.931.643.000	6.403.755.366
2	PUSDIKLAT	0	0	5.225.320.000	0	0
3	POLSTAT STIS	4.040.100.000	507.000.000	0	0	0
4	DKI JAKARTA	0	0	0	3.271.975.000	1.849.671
5	JAWA BARAT	0	0	0	7.832.237.000	22.399.074
6	JAWA TENGAH	0	0	0	6.837.512.000	5.321.392
7	DI YOGYAKARTA	0	0	0	2.613.186.000	2.722.982
8	JAWA TIMUR	0	0	0	5.901.420.000	20.337.665
9	ACEH	0	0	0	4.644.805.000	312.642
10	SUMATERA UTARA	0	0	0	4.288.370.000	445.272
11	SUMATERA BARAT	0	0	0	2.471.410.000	1.957.674
12	RIAU	0	0	0	3.405.246.000	1.773.294
13	JAMBI	0	0	0	1.680.559.000	65.725
14	SUMATERA SELATAN	0	0	0	4.243.719.000	357.338
15	LAMPUNG	0	0	0	3.630.871.000	563.945
16	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	3.644.703.000	0
17	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	1.751.531.000	402.640
18	KALIMANTAN SELATAN	0	0	0	2.780.307.000	1.143.864
19	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	1.787.991.000	12.933.048
20	SULAWESI UTARA	0	0	0	2.131.136.000	120.000
21	SULAWESI TENGAH	0	0	0	2.503.589.000	3.933.002
22	SULAWESI SELATAN	0	0	0	4.425.486.000	1.173.673
23	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	3.019.583.000	160.000
24	MALUKU	0	0	0	2.590.318.000	0
25	BALI	0	0	0	2.900.191.000	434.314
26	NTB	0	0	0	3.318.812.000	424.324
27	NTT	0	0	0	3.835.355.000	5.014.566
28	PAPUA	0	0	0	6.988.657.000	160.632
29	BENGKULU	0	0	0	1.957.004.000	293.042
30	MALUKU UTARA	0	0	0	2.298.709.000	60.000
31	BANTEN	0	0	0	3.208.785.000	0
32	KEP. BABEL	0	0	0	1.508.641.000	45.539
33	GORONTALO	0	0	0	1.484.472.000	808.149
34	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	2.186.748.000	4.327.500
35	PAPUA BARAT	0	0	0	3.719.278.000	810.479
36	SULAWESI BARAT	0	0	0	1.390.969.000	169.826
37	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	1.348.639.000	0
Jumlah		4.040.100.000	507.000.000	5.225.320.000	140.533.857.000	6.494.276.638

Pendapatan Bunga,
Pengelolaan
Rekening
Perbankan, dan
Pengelolaan
Keuangan
Rp401.625.983,00

B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan DIPA TA 2025, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2025 berupa pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan sebesar Rp10.295.000,00. Realisasi atas penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan,

dan pengelolaan keuangan selama periode TA 2025 adalah sebesar Rp401.625.983,00 atau 3.901,18 persen.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan yang terdiri dari pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Adapun rincian realisasi penerimaan negara berupa pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	10.295.000	401.625.983	3.901,18
Jumlah		10.295.000	401.625.983	3.901,18

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Rp)	
1	SETTAMA BPS		401.625.983
Jumlah			401.625.983

Pendapatan Denda
Rp1.729.646.674,00

B.1.4 Pendapatan Denda

Berdasarkan DIPA 2025, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2025 berupa pendapatan denda sebesar Rp0,00. Realisasi atas penerimaan negara yang berasal dari pendapatan denda selama periode TA 2025 adalah sebesar Rp1.729.646.674,00 atau 0,00 persen. Pendapatan Denda merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.

Adapun perolehan realisasi pendapatan denda adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.591.206.194	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	138.440.480	0,00
Jumlah		0	1.729.646.674	0,00

Realisasi Pendapatan Denda per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Rp)	Pendapatan Denda Lainnya (Rp)
1	SETTAMA BPS	531.414.422	0
2	POLSTAT STIS	357.115	0
3	JAWA BARAT	115.042.661	138.000.480
4	JAWA TENGAH	193.020	440.000
5	DI YOGYAKARTA	206.928	0
6	JAWA TIMUR	45.750.479	0

7	ACEH	11.508.000	0
8	SUMATERA UTARA	12.366.910	0
9	JAMBI	1.155.016	0
10	SUMATERA SELATAN	5.064.891	0
11	LAMPUNG	135.413	0
12	KALIMANTAN TENGAH	5.165.264	0
13	KALIMANTAN SELATAN	168.985	0
14	KALIMANTAN TIMUR	5.310.363	0
15	SULAWESI UTARA	990.000	0
16	SULAWESI TENGAH	1.400.633	0
17	NUSA TENGGARA BARAT	257.706	0
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1.271.490	0
19	PAPUA	878.027	0
20	MALUKU UTARA	392.372	0
21	BANTEN	12.690.780	0
22	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26.562	0
23	GORONTALO	8.652.384	0
24	PAPUA BARAT	2.050.375	0
25	KALIMANTAN UTARA	828.756.398	0
Jumlah		1.591.206.194	138.440.480

Pendapatan Lain-lain
Rp3.494.880.288,00

B.1.5 Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan DIPA TA 2025, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2025 berupa pendapatan lain-lain sebesar Rp0,00. Realisasi atas penerimaan negara yang berasal dari pendapatan lain-lain selama periode TA 2025 adalah sebesar Rp3.494.880.288,00 atau 0,00 persen.

Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan dan pendapatan anggaran lain-lain. Penerimaan pendapatan berupa setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS merupakan penerimaan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa dana pensiun PNS yang dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT TASPEN (Persero) dengan menggunakan kode satker Sekretariat Utama BPS. Adapun rincian realisasi pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	380.583.600	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	930.613.271	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	2.109.895.084	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	21.831.392	0,00
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	0	50.000.000	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.956.941	0,00

Jumlah	0	3.494.880.288	0,00
--------	---	---------------	------

Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS (Rp)	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan (Rp)	Pendapatan Anggaran Lain-lain (Rp)
1	SETTAMA BPS	122.203.240	231.533.915	20.000.000	21.831.392	0	417.606
2	PUSDIKLAT BPS	4.321.146	30.099.560	0	0	0	0
3	POLSTAT STIS	14.808.700	6.879.749	0	0	0	1.133.100
4	DKI JAKARTA	566.004	37.009.738	0	0	0	0
5	JAWA BARAT	19.292.361	20.310.950	1.368.662.776	0	0	0
6	JAWA TENGAH	7.892.109	28.351.485	10.017.480	0	0	0
7	DI YOGYAKARTA	349.809	19.773.337	24.052.813	0	0	0
8	JAWA TIMUR	4.568.431	102.388.947	11.028.666	0	0	904
9	ACEH	1.051.314	44.278.800	180.725.965	0	0	0
10	SUMATERA UTARA	9.851.265	6.914.650	169.836.192	0	0	0
11	SUMATERA BARAT	6.443.643	605.500	29.912.950	0	0	0
12	RIAU	26.245.499	5.311.350	0	0	0	0
13	JAMBI	3.167.000	5.283.600	0	0	0	0
14	SUMATERA SELATAN	3.050.858	64.396.005	0	0	0	257.500
15	LAMPUNG	540.054	5.339.100	0	0	0	0
16	KALIMANTAN BARAT	440.134	0	0	0	0	0
17	KALIMANTAN TENGAH	7.750.341	284.160	34.152.215	0	0	0
18	KALIMANTAN SELATAN	13.993.390	27.901.017	0	0	0	0
19	KALIMANTAN TIMUR	5.239.620	21.856.564	97.418.128	0	0	0
20	SULAWESI UTARA	1.145.000	27.125.876	0	0	0	0
21	SULAWESI TENGAH	250.300	15.334.691	0	0	0	0
22	SULAWESI SELATAN	14.191.467	18.311.490	0	0	0	0
23	SULAWESI TENGGARA	5.468.375	9.674.450	0	0	0	0
24	MALUKU	19.831.792	544.300	0	0	0	0
25	BALI	4.350.956	408.500	500.000	0	0	0
26	NTB	4.186.550	7.973.610	0	0	0	0
27	NTT	21.070.730	79.238.076	4.416.500	0	0	127.050
28	PAPUA	15.618.537	108.006.757	4.100.000	0	50.000.000	20.781
29	BENGKULU	6.053.498	0	0	0	0	0
30	MALUKU UTARA	5.216.950	960.000	300.000	0	0	0
31	BANTEN	2.825.617	0	86.292.732	0	0	0
32	KEP. BABEL	7.010.511	543.530	0	0	0	0
33	GORONTALO	4.071.840	152.800	0	0	0	0
34	KEPULAUAN RIAU	3.713.248	0	0	0	0	0
35	PAPUA BARAT	8.653.888	500.000	0	0	0	0
36	SULAWESI BARAT	3.394.223	1.128.700	0	0	0	0
37	KALIMANTAN UTARA	1.755.200	2.192.064	68.478.667	0	0	0
Jumlah		380.583.600	930.613.271	2.109.895.084	21.831.392	50.000.000	1.956.941

Realisasi Belanja
Rp5.105.181.732.431,00

B.2 BELANJA

Realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik selama periode TA 2025 adalah sebesar Rp5.105.181.732.431,00 atau 87,73 persen dari pagu yang sebesar Rp5.818.983.499.000,00. Pagu dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik TA 2025 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis kelompok, yaitu kelompok program, sumber dana, dan jenis belanja. Masing-masing kelompok belanja akan dijelaskan sebagai berikut.

Rincian pagu dan realisasi belanja selama periode TA 2025 menurut kelompok program tersaji sebagai berikut:

Tabel 14
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program

Kode	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.506.212.841.000	3.351.069.349.525	95,58
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.312.770.658.000	1.754.112.382.906	75,84
Jumlah		5.818.983.499.000	5.105.181.732.431	87,73

Pagu belanja menurut kelompok program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.506.212.841.000,00 atau 60,25 persen dari total pagu belanja yang sebesar Rp5.818.983.499.000,00. Pagu ini digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai dan sudah di alokasi ke seluruh satker, operasional perkantoran sebanyak 528 satker, penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan di Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPS, dan kegiatan non operasional lainnya.

Pagu menurut kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2.312.770.658.000,00 atau 39,75 persen dari total pagu. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama periode TA 2025 adalah sebagai berikut: program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.351.069.349.525,00 atau 95,58 persen dari pagu belanja dan realisasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp1.754.112.382.906,00 atau 75,84 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama periode TA 2025 secara keseluruhan adalah Rp5.105.181.732.431,00. Dari seluruh nilai realisasi belanja menurut kelompok program, proporsi realisasi belanja kelompok program Dukungan Manajemen adalah 65,64 persen dan proporsi realisasi belanja kelompok program PPIS adalah 34,36 persen.

Pagu dan realisasi belanja selama periode TA 2025 selain dikelompokkan berdasarkan program kegiatan, juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Pagu dan realisasi belanja berdasarkan kelompok sumber dana terdiri dari pagu dan realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni (RM), sumber dana PNBPN, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Pagu dan realisasi belanja masing-masing sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni (RM)	5.670.755.807.000	4.969.779.735.241	87,64
04	PNBP	144.995.708.000	132.253.957.135	91,21
11	Hibah Langsung Luar Negeri	3.231.984.000	3.148.040.055	97,40
Jumlah		5.818.983.499.000	5.105.181.732.431	87,73

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja dengan sumber dana Rupiah Murni memiliki pagu sebesar Rp5.670.755.807.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.969.779.735.241,00 atau 87,64 persen dari pagu. Belanja dengan sumber dana PNBP memiliki pagu sebesar Rp144.995.708.000,00 dan realisasi sebesar Rp132.253.957.135,00 atau 91,21 persen dari pagu. Untuk belanja dengan sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri memiliki pagu sebesar Rp3.231.984.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp3.148.040.055 atau 97,40 persen dari pagu. Sehingga berdasarkan tabel di atas, pagu dan realisasi belanja menurut sumber dana RM memiliki proporsi lebih besar dibandingkan dengan pagu dan realisasi belanja menurut sumber dana PNBP, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Rincian kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana berdasarkan besaran pagu dan realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 16
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Kegiatan Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni			
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	4.250.793.000	3.097.452.802	72,87
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	15.128.246.000	12.454.880.545	82,33
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	1.253.882.000	1.135.498.335	90,56
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	356.331.705.000	281.905.739.989	79,11
2885	Dukungan Manajemen Bps Lainnya	138.015.864.000	117.542.231.576	85,17
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bps Provinsi	2.889.044.614.000	2.837.606.512.537	98,22
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (Bps)	51.490.384.000	50.534.804.434	98,14
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	39.128.358.000	36.798.419.245	94,05
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	44.007.143.000	31.793.186.161	72,25
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	28.494.111.000	14.299.016.226	50,18
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	20.804.503.000	12.017.096.449	57,76
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	34.447.181.000	11.207.106.926	32,53
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	6.071.071.000	1.043.319.070	17,19
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	300.626.985.000	283.482.453.848	94,30
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	805.669.528.000	478.547.281.996	59,40
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	88.836.524.000	76.155.075.443	85,72
2904	Penyediaan dan Pengembangan	52.288.955.000	44.314.732.572	84,75

	Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi			
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	218.158.799.000	180.516.219.958	82,75
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	271.394.313.000	248.555.653.482	91,58
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	57.792.070.000	40.530.293.559	70,13
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	76.911.195.000	58.000.280.501	75,41
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	25.088.983.000	20.706.392.200	82,53
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	143.600.865.000	125.658.635.231	87,51
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	590.904.000	590.259.935	99,89
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	607.159.000	601.341.809	99,04
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	721.672.000	685.850.412	95,04
Sub Jumlah		5.670.755.807.000	4.969.779.735.241	87,64
04	PNBP			
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	4.193.936.000	4.178.425.585	99,63
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	5.455.324.000	3.937.932.321	72,19
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	135.346.448.000	124.137.599.229	91,72
Sub Jumlah		144.995.708.000	132.253.957.135	91,21
11	Hibah Langsung Luar Negeri			
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2.659.241.000	2.589.264.944	97,37
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	572.743.000	558.775.111	97,56
Sub Jumlah		3.231.984.000	3.148.040.055	97,40
Jumlah		5.818.983.499.000	5.105.181.732.431	87,73

Pagu belanja kelompok sumber dana TA 2025 adalah sebesar Rp5.818.983.499.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni dari keseluruhan nilai pagu adalah 97,45 persen atau sebesar Rp5.670.755.807.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana PNPB adalah 2,49 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp144.995.708.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri adalah 0,06 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp3.231.984.000,00.

Realisasi belanja kelompok sumber dana selama periode TA 2025 adalah sebesar Rp5.105.181.732.431,00. Pada realisasi belanja kelompok sumber dana, persentase realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni adalah 97,35 persen atau sebesar Rp4.969.779.735.241,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni mendominasi realisasi belanja kelompok sumber dana. Persentase realisasi belanja sumber dana PNPB memiliki porsi 2,59 persen atau sebesar Rp132.253.957.135,00 keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Sedangkan persentase realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri memiliki porsi 0,06 persen atau sebesar Rp3.148.040.055,00 dari keseluruhan realisasi

belanja kelompok sumber dana. Perbandingan realisasi belanja kelompok sumber dana periode TA 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 17
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
TA 2025 dan 2024

Kode	Sumber Dana	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rupiah Murni (RM)	4.969.779.735.241	4.379.856.308.457	589.923.426.784	13,47
04	PNBP	132.253.957.135	16.041.117.656	116.212.839.479	724,47
11	Hibah Langsung Luar Negeri	3.148.040.055	1.752.903.416	1.395.136.639	79,59
20	SBSN	0	14.176.767.985	(14.176.767.985)	(100,00)
Jumlah		5.105.181.732.431	4.411.827.097.514	693.354.634.917	15,72

Secara keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana mengalami kenaikan sebesar 15,72 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2024. Kenaikan terjadi pada realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp589.923.426.784,00 atau sebesar 13,47 persen; realisasi belanja sumber dana PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp116.212.839.479,00 atau sebesar 724,47 persen; dan realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp1.395.136.639,00 atau sebesar 79,59 persen. Sementara itu, realisasi belanja sumber dana SBSN mengalami penurunan sebesar Rp14.176.767.985,00 atau sebesar 100,00 persen.

Realisasi terbesar berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) yang digunakan untuk :

1. Belanja pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Gaji Pokok PPPK, Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja), Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Pembulatan Gaji PPPK, Belanja Tunj. Anak PNS, Belanja Tunj. Beras PNS, Belanja Tunj. Fungsional PNS, Belanja Tunj. PPh PNS, Belanja Tunj. Struktural PNS, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PPPK, Belanja Tunjangan Beras PPPK, Belanja Tunjangan Fungsional PPPK, Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Tunjangan Umum PPPK, Belanja Uang Lembur, Belanja Uang Lembur PPPK, Belanja Uang Makan PNS, dan Belanja Uang Makan PPPK.
2. Belanja barang dan jasa, yang terdiri dari Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan, Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Jasa Konsultan, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya, Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Belanja Pemeliharaan Lainnya, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dan Belanja Sewa.

3. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

Realisasi belanja menurut sumber dana PNBPN digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan PNBPN dan kegiatan Pelaksanaan Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, Pengolahan Data Statistik Wisatawan Mancanegara Berdasarkan *Mobile Positioning Data* (MPD), serta Survei Monitoring Dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sedangkan untuk realisasi belanja menurut sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri berasal dari kerja sama dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) digunakan untuk kegiatan *Technical Support to Strengthening Data on Children from National Household Surveys, Population Census, and Big Data* (UNICEF) serta kegiatan *Population Dynamics Data and Analysis* (UNFPA).

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik TA 2025 selain dikelompokkan menurut sumber dana, juga dikelompokkan menurut jenis belanja. Pengelompokan pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan kode jenis belanja 51, Belanja Barang dengan kode jenis belanja 52, dan Belanja Modal dengan kode jenis belanja 53.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik menurut kelompok jenis belanja TA 2025 disajikan berikut ini.

Tabel 18
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Belanja Pegawai	2.805.730.765.000	2.690.376.628.898	95,89
52	Belanja Barang	2.542.890.308.000	2.060.179.703.107	81,02
53	Belanja Modal	470.362.426.000	354.625.400.426	75,39
Jumlah		5.818.983.499.000	5.105.181.732.431	87,73

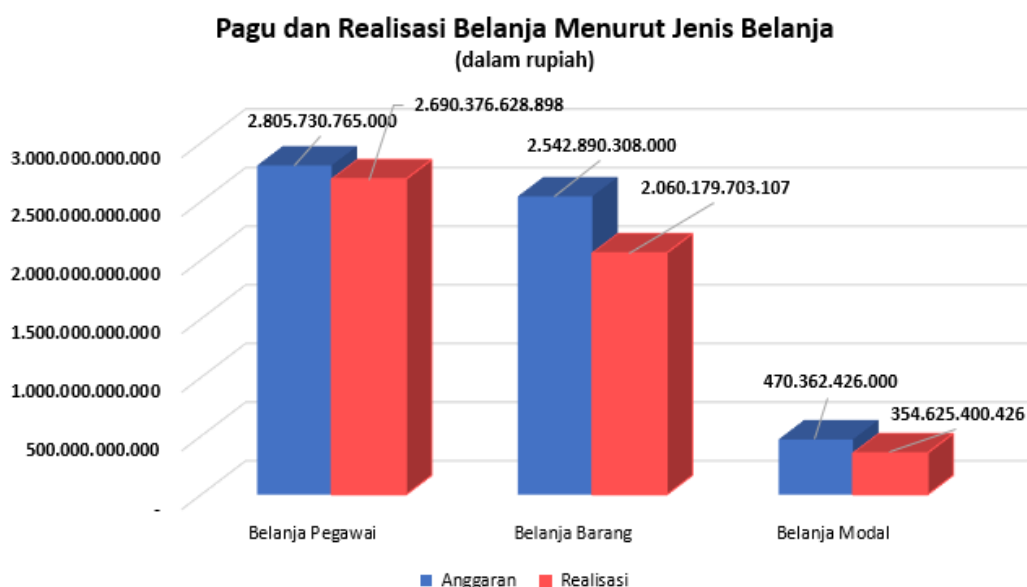
Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik TA 2025 menurut kelompok jenis belanja, yang masing-masing sebesar Rp5.818.983.499.000,00 dan Rp5.105.181.732.431,00. Komposisi pagu dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi pagu Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 48,22 persen atau senilai Rp2.805.730.755.000,00. Komposisi realisasi Belanja Pegawai neto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 52,70 persen atau senilai Rp2.690.376.628.898,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan pagu Belanja Pegawai adalah 95,89 persen.

2. Komposisi pagu Belanja Barang dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 43,70 persen atau senilai Rp2.542.890.308.000,00. Komposisi realisasi Belanja Barang netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 40,35 persen atau senilai Rp2.060.179.703.107,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan pagu Belanja Barang adalah 81,02 persen.
3. Komposisi pagu Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 8,08 persen atau senilai Rp470.362.426.000,00. Komposisi realisasi Belanja Modal netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 6,95 persen atau senilai Rp354.625.400.426,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan pagu Belanja Modal adalah 75,39 persen.

Persentase pagu belanja pegawai merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai pagu menurut jenis belanja dibandingkan dengan pagu belanja barang dan belanja modal selama periode TA 2025.

Komposisi pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja TA 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2025

Realisasi belanja menurut jenis belanja selama periode TA 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024 seperti tersaji sebagai berikut.

Tabel 19
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2025 dan 2024

Kode	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Belanja Pegawai	2.690.376.628.898	2.554.664.732.721	135.711.896.177	5,31
52	Belanja Barang	2.060.179.703.107	1.658.893.288.228	401.286.414.879	24,19

53	Belanja Modal	354.625.400.426	198.269.076.565	156.356.323.861	78,86
Jumlah		5.105.181.732.431	4.411.827.097.514	693.354.634.917	15,72

Secara keseluruhan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp693.354.634.917,00 atau sebesar 15,72 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.

Realisasi Belanja Pegawai selama TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp135.711.896.177,00 atau sebesar 5,31 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai pada periode TA 2025 terjadi pada Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang terdiri dari: Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Profesi Dosen dibandingkan periode yang sama di TA 2024. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK juga mengalami kenaikan pada TA 2025 dibandingkan dengan periode TA 2024.

Realisasi Belanja Barang selama periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp401.286.414.879,00 sebesar 24,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024. Kenaikan terjadi pada realisasi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan luar negeri. Hal ini disebabkan pada TA 2025 terdapat kegiatan besar seperti kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilayah Kerja Statistik sebagai kegiatan awal Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini melibatkan pegawai organik dan mitra sehingga terdapat kenaikan belanja untuk pembayaran honor.

Realisasi Belanja Modal, sebagaimana pada Belanja Barang, pada TA 2025 juga mengalami kenaikan sebesar Rp156.356.323.861,00 atau sebesar 78,86 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal lainnya yang dilaksanakan pada periode TA 2025.

*Belanja Pegawai
Rp2.690.376.628.898,00*

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), pensiunan, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS/ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode TA 2025 adalah sebesar Rp2.690.376.628.898,00 atau 95,89 persen dari pagu yang sebesar Rp2.805.730.765.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja netto yaitu nilai bruto Belanja Pegawai yang nilainya sebesar Rp2.691.080.139.941,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp703.511.043,00.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik selama periode TA 2025 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Realisasi Belanja Pegawai selama periode TA 2025 seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM).

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp1.400.155.416.143,00

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) selama periode TA 2025 adalah Rp1.400.155.416.143,00 atau sebesar 98,29 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS senilai Rp1.424.455.758.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 20
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	902.874.240.000	895.515.192.885	172.510.040	895.342.682.845	99,17
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.058.000	12.936.807	70.259	12.866.548	80,13
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55.220.900.000	54.488.592.007	23.774.655	54.464.817.352	98,63
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.765.511.000	16.419.698.394	2.803.235	16.416.895.159	97,92
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15.542.975.000	15.059.490.000	49.719.025	15.009.770.975	96,57
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	140.191.365.000	138.344.450.701	198.970.700	138.145.480.001	98,54
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	97.835.024.000	91.389.573.531	37.287.924	91.352.285.607	93,37
511126	Belanja Tunj. BerasPNS	44.118.540.000	43.350.029.870	7.628.280	43.342.401.590	98,24
511129	Belanja Uang Makan PNS	137.133.366.000	132.409.013.850	18.615.300	132.390.398.550	96,54
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	500.333.000	470.425.000	525.000	469.900.000	93,92
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	4.357.787.000	4.175.695.000	2.725.000	4.172.970.000	95,76
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	7.278.651.000	6.578.670.000	102.269.446	6.476.400.554	88,98
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.581.256.000	2.558.546.962	0	2.558.546.962	99,12
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	39.751.000	0	0	0	0,00
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.000	0	0	0	0,00
Jumlah		1.424.455.758.000	1.400.772.315.007	616.898.864	1.400.155.416.143	98,29

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto pada periode TA 2025 adalah Rp1.400.155.416.143,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yaitu Rp1.400.772.315.007,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp616.898.864,00. Realisasi belanja pegawai selama periode TA 2025 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PNS,

pembayaran pembulatan gaji PNS, pembayaran tunjangan suami/istri PNS, pembayaran tunjangan anak PNS, pembayaran tunjangan struktural PNS, pembayaran tunjangan fungsional PNS, pembayaran tunjangan PPh PNS, pembayaran tunjangan beras PNS, pembayaran uang makan PNS, pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS, pembayaran tunjangan khusus Papua PNS, pembayaran tunjangan umum PNS, dan pembayaran tunjangan profesi dosen. Nilai pengembalian belanja ini terdiri dari pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Umum PNS.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 21
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	895.342.682.845	876.659.052.374	18.683.630.471	2,13
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.866.548	13.233.272	(366.724)	(2,77)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54.464.817.352	54.347.589.534	117.227.818	0,22
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.416.895.159	16.478.036.734	(61.141.575)	(0,37)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15.009.770.975	15.747.629.070	(737.858.095)	(4,69)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	138.145.480.001	131.114.556.997	7.030.923.004	5,36
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	91.352.285.607	63.381.413.704	27.970.871.903	44,13
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43.342.401.590	43.150.321.710	192.079.880	0,45
511129	Belanja Uang Makan PNS	132.390.398.550	125.513.069.750	6.877.328.800	5,48
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	469.900.000	457.700.000	12.200.000	2,67
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	4.172.970.000	4.118.165.000	54.805.000	1,33
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	6.476.400.554	6.870.448.475	(394.047.921)	(5,74)
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.558.546.962	2.376.940.724	181.606.238	7,64
Jumlah		1.400.155.416.143	1.340.228.157.344	59.927.258.799	4,47

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto pada periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp59.927.258.799,00 atau sebesar 4,47 persen dibandingkan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode yang sama di TA 2024. Kenaikan dan penurunan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode TA 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024 antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS mengalami kenaikan sebesar Rp18.683.630.471,00 atau sebesar 2,13 persen. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS pada periode TA 2025 digunakan untuk pembayaran gaji induk pegawai, gaji susulan, gaji ke-13 dan ke-14 TA 2025, kekurangan gaji pokok, kenaikan pangkat PNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, Tunjangan Hari Raya (THR) TA 2025, dan gaji terusan.

2. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional mengalami kenaikan sebesar Rp7.030.923.004,00 atau sebesar 5,36 persen. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional pada periode TA 2025 digunakan untuk pembayaran tunjangan fungsional dan kekurangan tunjangan fungsional. Kenaikan ini diantaranya disebabkan oleh adanya pengangkatan pegawai ke jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional.
3. Realisasi Belanja Tunjangan PPh PNS mengalami kenaikan sebesar Rp27.970.871.903,00 atau 44,13 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mulai berlaku per 1 Januari 2024.
4. Realisasi Belanja Tunjangan Umum PNS mengalami penurunan sebesar Rp394.047.921,00 atau sebesar 5,74 persen. Realisasi Belanja Tunjangan Umum PNS pada periode TA 2025 digunakan untuk pembayaran tunjangan umum dan kekurangan tunjangan umum. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pegawai yang diangkat ke jabatan fungsional sehingga tunjangan umum yang diterima berubah menjadi tunjangan fungsional.

Belanja Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Non PNS
Rp1.227.777.900,00

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (5115) untuk periode TA 2025 adalah Rp1.227.777.900,00 atau sebesar 98,20 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS senilai Rp1.250.249.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS pada periode TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 22
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1.250.249.000	1.227.777.900	0	1.227.777.900	98,20
Jumlah		1.250.249.000	1.227.777.900	0	1.227.777.900	98,20

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS secara netto pada periode TA 2025 adalah Rp1.227.777.900,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS secara netto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS yaitu Rp1.227.777.900,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS periode TA 2025 digunakan untuk pembayaran hak keuangan Wakil Kepala BPS. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 23
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1.227.777.900	0	1.227.777.900	100,00
Jumlah		1.227.777.900	0	1.227.777.900	100,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS pada periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.227.777.900,00 atau sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Pada struktur organisasi yang baru terdapat Wakil Kepala BPS sehingga adanya penambahan belanja yang mengikuti untuk pembayaran hak Wakil Kepala BPS yang termasuk ke dalam akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS.

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp38.249.765.630,00

B.2.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116) untuk periode TA 2025 adalah Rp38.249.765.630,00 atau sebesar 91,09 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PPPK senilai Rp41.991.626.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada periode TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 24
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.896.410.000	25.972.130.703	7.249.596	25.964.881.107	93,08
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.578.000	521.768	385	521.383	9,35
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.923.231.000	1.671.315.938	4.822.138	1.666.493.800	86,65
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	625.808.000	489.434.193	1.051.264	488.382.929	78,04
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	3.980.000	0	0	0	0,00
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1.448.321.000	1.213.148.747	0	1.213.148.747	83,76
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	2.071.076.000	1.804.536.145	2.993.430	1.801.542.715	86,99
511628	Belanja Uang Makan PPPK	6.692.448.000	5.920.399.150	1.513.050	5.918.886.100	88,44

511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	15.918.000	12.643.017	0	12.643.017	79,43
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	4.950.000	3.825.000	0	3.825.000	77,27
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	58.775.000	48.875.000	0	48.875.000	83,16
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.245.131.000	1.131.105.832	540.000	1.130.565.832	90,80
Jumlah		41.991.626.000	38.267.935.493	18.169.863	38.249.765.630	91,09

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK secara neto pada periode TA 2025 adalah Rp38.249.765.630,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK secara neto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yaitu Rp38.267.935.493,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp18.169.863,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK periode TA 2025 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PPPK, pembayaran pembulatan gaji PPPK, pembayaran tunjangan suami/istri PPPK, pembayaran tunjangan anak PPPK, pembayaran tunjangan fungsional PPPK, pembayaran tunjangan beras PPPK, pembayaran uang makan PPPK, pembayaran tunjangan kompensasi kerja PPPK, pembayaran belanja tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PPPK, pembayaran tunjangan khusus Papua PPPK, dan tunjangan umum PPPK. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 25
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	25.964.881.107	7.696.716.670	18.268.164.437	237,35
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	521.383	163.773	357.610	218,36
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.666.493.800	400.710.760	1.265.783.040	315,88
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	488.382.929	106.176.784	382.206.145	359,97
511624	Belanja Tun. Fungsional PPPK	1.213.148.747	1.009.565.825	203.582.922	20,17
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1.801.542.715	424.019.100	1.377.523.615	324,87
511628	Belanja Uang Makan PPPK	5.918.886.100	1.388.291.000	4.530.595.100	326,34
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	12.643.017	0	12.643.017	100,00
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	3.825.000	0	3.825.000	100,00
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	48.875.000	0	48.875.000	100,00
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.130.565.832	0	1.130.565.832	100,00
Jumlah		38.249.765.630	11.025.643.912	27.224.121.718	246,92

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.224.121.718,00 atau sebesar 246,92 persen dibandingkan dengan

periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penerimaan PPPK pada Tahun 2025 sehingga menambah nilai Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK.

Belanja Uang Lembur
Rp34.280.894.118,00

B.2.1.4 Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur (5122) untuk periode TA 2025 adalah Rp34.280.894.118,00 atau 89,02 persen dari pagu anggaran belanja uang lembur senilai Rp38.510.834.000,00. Belanja Uang Lembur merupakan komponen belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran uang lembur. Uang lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah. Uang lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Uang Lembur selama periode TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 26
Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512211	Belanja Uang Lembur	36.983.906.000	33.369.213.468	9.226.350	33.359.987.118	90,20
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1.526.928.000	921.219.000	312.000	920.907.000	60,31
Jumlah		38.510.834.000	34.290.432.468	9.538.350	34.280.894.118	89,02

Realisasi Belanja Uang Lembur neto sebesar Rp34.280.894.118,00 berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Uang Lembur sebesar Rp34.290.432.468,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp9.538.350,00. Perbandingan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 27
Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	Belanja Uang Lembur	33.359.987.118	28.581.177.750	4.778.809.368	16,72
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	920.907.000	233.950.000	686.957.000	293,63
Jumlah		34.280.894.118	28.815.127.750	5.465.766.368	18,97

Realisasi Belanja Uang Lembur pada periode TA 2025 sebesar Rp34.280.894.118,00 sedangkan realisasi Belanja Uang Lembur untuk periode yang sama pada TA 2024 sebesar Rp28.815.127.750,00. Realisasi Belanja Uang Lembur pada periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.465.766.368,00 atau sebesar 18,97 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan persiapan Sensus Ekonomi 2026, validasi data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS), dan pemenuhan dokumen untuk pembangunan Zona Integritas (ZI).

Belanja Tunjangan
Khusus & Belanja
Pegawai Transito
Rp1.216.462.775.107,00

B.2.1.5 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (5124) pada periode TA 2025 adalah sebesar Rp1.216.462.775.107,00 atau sebesar 93,61 persen dari pagu yang senilai Rp1.299.522.298.000,00. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito terdiri dari Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) yang berupa belanja tunjangan kinerja dan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Pengertian ini termuat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 28
Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.261.576.958.000	1.191.526.593.407	54.553.182	1.191.472.040.225	94,44
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	37.945.340.000	24.995.085.666	4.350.784	24.990.734.882	65,86
Jumlah		1.299.522.298.000	1.216.521.679.073	58.903.966	1.216.462.775.107	93,61

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito secara netto pada periode TA 2025 adalah Rp1.216.462.775.107,00 atau sebesar 93,61 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp1.216.521.679.073,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp58.903.966,00.

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 29
Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.191.472.040.225	1.166.339.472.648	25.132.567.577	2,15
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24.990.734.882	8.256.331.067	16.734.403.815	202,69

Jumlah	1.216.462.775.107	1.174.595.803.715	41.866.971.392	3,56
--------	-------------------	-------------------	----------------	------

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2025 sebesar Rp1.216.462.775.107,00 sedangkan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2024 sebesar Rp1.174.595.803.715,00. Realisasi Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 41.866.971.392,00 atau sebesar 3,56 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penerimaan PPPK pada Tahun 2025 sehingga menambah nilai Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK untuk pembayaran nilai tunjangan kinerja PPPK.

Belanja Barang
Rp2.060.179.703.107,00

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang selama TA 2025 adalah sebesar Rp2.060.179.703.107,00 atau 81,02 persen dari pagu yang nilainya sebesar Rp2.542.890.308.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja neto yaitu nilai bruto belanja barang yang nilainya sebesar Rp2.062.244.269.469,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.064.566.362,00.

Rincian realisasi Belanja Barang TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Belanja Barang Operasional (5211) sebesar digunakan antara lain untuk pembayaran honor SAI tingkat eselon I, honor SAI tingkat UAKPA, honorarium pengurus penyimpan BMN tingkat UAKPB, honorarium pengurus penyimpan BMN tingkat UAPB, pajak mobil caraka/operasional roda 4, pajak mobil caraka/operasional roda 6, pajak kendaraan bermotor operasional roda 2, keperluan sehari-hari perkantoran, jasa *management building*, jasa keamanan, jasa pengawalan kendaraan pimpinan, jasa petugas sekretaris, jasa petugas penata arsip, jasa petugas bidan klinik, langganan koran dan majalah, Instruktur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, Lembur PPNPN, honor PPNPN, pengadaan seragam pegawai, pengiriman surat dan paket kecil pos (berat kurang dari 10 kg), pengiriman dokumen dan paket barang lainnya, perpanjangan *support software DC*, perpanjangan anti virus, pengadaan Lisensi Office 365, pengadaan Lisensi Zoom, piranti lunak untuk Manajemen Pengujian Aplikasi, honor rohaniawan, honor Pengelola Keuangan, honor pejabat pengadaan barang dan jasa, pengadaan pakaian untuk pengamanan intern, pengadaan pakaian paramedis, Dana Operasional Menteri, dan Dana Operasional Wakil Menteri.
2. Belanja Belanja Barang Non Operasional (5212) digunakan antara lain untuk pembayaran perlengkapan kegiatan, honor sekretariat pendukung kegiatan FMS, perlengkapan kegiatan, pencetakan laporan/publikasi kegiatan, pengadaan materai, pengadaan belanja sarana promosi, konsumsi kegiatan, honor Tim Pelaksana Pusat SNLIK 2025, honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengolahan Data Statistik Wisatawan Mancanegara, biaya pengiriman, biaya operasional kegiatan, honorarium

Tim Pelaksana Kegiatan Survei Makan Bergizi Gratis, dan honor pengajar instruktur nasional.

3. Belanja Belanja Barang Persediaan (5218) digunakan antara lain untuk pembayaran pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak, *computer supplies*, *consumable toner*, dan pencetakan/penggandaan pedoman/publikasi/laporan kegiatan.
4. Belanja Belanja Jasa (5221) digunakan antara lain untuk pembayaran honor narasumber pejabat eselon I/II/III yang disetarakan, honor narasumber pakar/praktisi/profesional yang disetarakan, paket berlangganan GCP, paket berlangganan aplikasi *google map*, koneksi mediasi Data MPD Wisatawan Nusantara, Koneksi mediasi data *outbound/traveler* nasional berdasarkan *Data Mobile Network Operator* Tahun 2025, Koneksi Mediasi Data Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Data *Mobile Network Operator*, honor moderator, pengadaan *subscription* tahunan akun *apple developer*, biaya berlangganan layanan aset digital premium, pengadaan layanan akses Digital Bloomberg, jasa konsultan kegiatan, *Audit Surveillance* 1 ISO 90012015 BPS RI, honor narasumber ahli, pengadaan jasa alih media pustaka BPS, pengembangan SDM Perpustakaan Khusus, dan jasa penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi/rapat pimpinan/*workshop/event organizer*.
5. Belanja Belanja Pemeliharaan (5231) digunakan antara lain untuk pembayaran *software* Visualisasi Data dan Publikasi BPS, perpanjangan lisensi *supermap*, gedung kantor bertingkat, halaman gedung kantor, belanja penanganan serangga, tikus, dan rayap, asuransi BMN, rumah dinas, kendaraan bermotor roda 4/roda 2 operasional, biaya pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/roda 2 operasional, biaya operasional roda 4 pejabat negara, genset, ac split/ac central, biaya penggantian suku cadang AC, CHILLER, sistem proteksi kebakaran aktif, inventaris/alat kantor, sound system, travo 1250 kva, lampu neon sign termasuk sparepart, mesin fotocopy, lift, STP (*Sewage Treatment Plant*) dan IPAL klinik, pengurusan sertifikasi lift, HEPA filter klinik BPS, alat kesehatan, biaya penggantian suku cadang lift, peralatan multimedia, pompa air termasuk suku cadang, kolam dan akuarium, instalasi listrik, CCTV, mesin pencetakan, *consumable toner*, perangkat TIK Pusat Data BPS, Fasilitas Pusat Data BPS, perangkat *network campus*, perawatan komputer, laptop/notebook, printer, dan alat penunjangnya, dan perangkat keamanan jaringan komunikasi data.
6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) digunakan antara lain untuk pembayaran:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan antara lain untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka supervisi: Pengolahan dan Analisis Data untuk Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik, Pengolahan dan Analisis Data Indeks Pembangunan Manusia, Pengumpulan Data Pemanfaatan *Big Data* Untuk Statistik Resmi, Pengolahan dan Analisis Pemanfaatan *Big Data* Untuk Statistik Resmi, Pengumpulan Data Diseminasi dan Metadata Statistik, Peningkatan Pelayanan PNBP pada Diseminasi dan Metadata Statistik, Kegiatan SNLIK 2025, Kegiatan Pengolahan Wisman MPD, Kegiatan Survei *Monitoring* dan Evaluasi Program MBG, Diseminasi dan Evaluasi Layanan Edukasi dan Promosi Statistik, Pembinaan Statistik Sektor Dir. Diseminasi Statistik, Pembinaan Statistik Sektor Dir. PMSS, Pengumpulan Data Statistik Neraca Pengeluaran, Diseminasi dan Evaluasi Statistik Neraca Pengeluaran, Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektor Neraca Produksi, Pengumpulan Data Neraca

Produksi, Konsolidasi Regional Pengumpulan Data Neraca Produksi, Pengolahan dan Analisis Data Neraca Produksi, Pengumpulan Data Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA), Pengumpulan Data dalam rangka Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik, Pemutakhiran Data SBR, Pengembangan *Mixed Method*, Evaluasi Hasil Klasifikasi Urban Rural, Pengolahan Data dalam rangka Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik, Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (Sisnas), Pengumpulan Data Statistik Distribusi, Supervisi Pelatihan (Lapangan dan Pengolahan) Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat, Pemetaan Pemutakhiran Data Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat, Pengolahan dan Pemetaan dalam rangka Pemutakhiran Kerangka Geospasial Dan Muatan Wilkerstat, Pendataan Gladi Bersih SE2026, Pelatihan Petugas Gladi Bersih SE2026, Penjaminan Kualitas Gladi Bersih SE2026, Pendataan Uji Coba PL SE2026 (Gladi Bersih SE2026), Rakornas SE2026, Pelaksanaan Gladi Bersih PES SE2026, Pengiriman Pengajar Petugas Gladi Bersih PES SE2026, *Updating* Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi Lanjutan, Publisitas Pelaksanaan SE2026, Sosialisasi SE2026, *Probit Audit* Gladi Bersih SE2026, Penyusunan Profil Risiko SE2026, Sosialisasi Layanan Pengaduan Masyarakat Publisitas SE2026, Pendampingan *Probit Audit* SE2026, Pengumpulan Data Statistik Harga, Pengumpulan Data Survei Harga Konsumen, Pembinaan Statistik Sektor Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi, Kegiatan EWS dalam rangka persiapan Penyusunan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, Pengumpulan Data Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, Ujicoba Suplemen Sakernas (TUS 2026), Pengumpulan Data Survei Angkatan Kerja Nasional, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan Sakernas, Pengolahan dan Analisis Data Survei Angkatan Kerja Nasional, Pelatihan dan Pelaksanaan Lapangan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Verifikasi Maternal pada Pengumpulan Data Survei Penduduk Antar Sensus, Evaluasi Kualitas Data Hasil Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Pembinaan Statistik Sektor Kesejahteraan Rakyat, Pelatihan Susenas Maret 2025, Ujicoba Kuesioner Susenas September 2025, Pengiriman Innas dalam rangka Pelatihan Petugas Susenas September 2025, Pelatihan Petugas Susenas September 2025, Ujicoba Kuesioner Susenas Maret 2026, Pengumpulan Data Seruti, Pengumpulan Data Susenas Maret 2025, Pelaksanaan Lapangan Susenas September 2025, Pengumpulan data Seruti TW III, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan Susenas, Pengumpulan data Susenas dan Seruti, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan Seruti, Pengolahan Data Susenas Maret 2025, Pengolahan Susenas September 2025, Pengumpulan Data Statistik Ketahanan Sosial, Pengolahan dan Analisis Statistik Ketahanan Sosial, Pengumpulan Data Potensi Desa, Pengumpulan Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata di tingkat Provinsi, Pelatihan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Pengumpulan Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata di tingkat Kabupaten, Pelaksanaan Survei *Outbound* dan Wisatawan Nusantara, Pelaksanaan Survei *E-commerce*, *Indepth Interview* Perhutanan Sosial 2025, Pengumpulan Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Kegiatan SKP dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Pembinaan Statistik Sektor Statistik Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan, Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan, Survei Konversi Gabah Beras dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan, *Indept Study* Survei Konversi Gabah Beras (Statistik Tanaman Pangan), Pretest Komstrat (Statistik Hortikultura Dan Perkebunan), Pengumpulan Data Statistik Hortikultura dan Perkebunan, *Indepth Study* Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Berbasis CAPI dalam rangka Pengolahan dan Analisis Statistik Hortikultura dan Perkebunan, Pengembangan Aplikasi SIMONEV dalam rangka Penyusunan Lakin Satker Eselon I, Penyusunan Sakip Daerah dalam rangka Penyusunan Lakin Satker Eselon I, Pengawasan dan Pengumpulan Data Bahan Penyusun Standar Biaya, Perencanaan, Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Anggaran, Tim Pendukung Rapimkap, Rapat Pimpinan Lengkap, Uji Coba Aplikasi SOBAT, *Monitoring*, Evaluasi, dan Pembinaan Capaian Kinerja Anggaran dan Perencanaan, Pendukung Reformasi Birokrasi, Lansow Pimpinan BPS Tahun 2025, *Monitoring* Penyelenggaraan SPIP, Uji Petik Penyusunan Produk Hukum, Peliputan Kegiatan Statistik Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, Supervisi Kehumasan, Pendampingan Kunjungan DPR RI, Koordinasi Kelembagaan, Tim Pendukung Kegiatan Sosialisasi Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Pendukung Paket *Meeting* dalam rangka Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Pembentukan Instansi Vertikal BPS, Narasumber FGD Bersama Panja RUU Statistik, Penanganan Kasus Hukum, Pelantikan Pejabat, Pemindahan/penempatan CPNS, Seleksi Jabatan Pimpinan, Pemeriksaan Kasus Disiplin Pegawai, Pembinaan Permasalahan Kepegawaian, Kegiatan KORPRI, Raker Musyawarah KORPRI, Pengawasan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah, Pengelolaan Kinerja, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai, Pengembangan Pola Karier, Rakernas dan Pembukaan Pornas Korpri 2025, Pengawasan Uji Kompetensi Fungsional Pranata Komputer Dan Statistisi, Penataan Arsip Keuangan Daerah, Supervisi Penataan Arsip Keuangan Daerah, Supervisi Pengelolaan Keuangan, *Monitoring* dan Pendampingan Penyelesaian Kerugian Negara, Mutasi Pegawai, Pemulangan dan Penjemputan/pengantaran Jenazah, *Monitoring* Kegiatan Perbendaharaan, Verifikasi Keuangan (Evaluasi), Sosialisasi Pengelolaan Keuangan (Evaluasi), Pembinaan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan, *Monitoring* Pengelolaan BMN, Kegiatan Kerumahtanggaan, Pengadaan Barang/jasa, Pengawasan Kearsipan, Pencetakan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Koordinasi Antar Lembaga, Pengembangan Kompetensi Pegawai APIP, Pengawasan Kinerja TUSI Lembaga, Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara, Audit Kinerja, dan Pengawasan Kinerja Bidang Khusus.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan antara lain untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka: Pembinaan Statistik Sektor Analisis dan Pengembangan Statistik, Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Analisis dan Pengembangan Statistik, Persiapan Penyusunan Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik, Pengolahan dan Analisis Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik, Pengolahan dan Analisis Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik, Pengolahan dan Analisis Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik, Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan (PNBP) Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik, Kegiatan SNLIK 2025, Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan (PNBP), Pengumpulan Data Pembinaan Statistik Sektor, Pembinaan Statistik Sektor Direktorat PMSS, Pembinaan Statistik Sektor

Neraca Pengeluaran, Pengumpulan Data Statistik Neraca Pengeluaran, Pembinaan Statistik Sektorale Neraca Produksi, Pengumpulan Data Statistik Neraca Produksi, Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik, Persiapan Penyusunan Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik, Pengumpulan Data Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (Sisnas), Pembinaan Statistik Sektorale Distribusi, Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Statistik Distribusi, Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat SE2026, *Task Force* Gladi Bersih SE2026, Kunjungan ke Asosiasi Usaha Dan Kantor Pusat Dalam Rangka Gladi Bersih SE2026, Penjaminan Kualitas Gladi Bersih SE2026, *Task Force* Uji Coba PL Gladi Bersih SE2026, Pendataan PPL UB Uji Coba PL Gladi Bersih SE2026, Pendataan PPL Non UB Uji Coba PL Gladi Bersih SE2026, Pendataan PML UB Uji Coba PL Gladi Bersih SE2026, Pengiriman Pengajar Petugas Gladi Bersih PES SE2026, Pelaksanaan Gladi Bersih PES SE2026, Gladi Bersih SE2026, Penyusunan Bahan Publisitas SE2026, Sosialisasi SE2026 bersama Eksternal, Pembinaan Statistik Sektorale Harga, Pengumpulan Data/Studi Literatur dan Konsultasi Statistik Harga, Penyempurnaan HPB dalam Rangka Pengolahan dan Analisis Laporan Statistik Harga, Peningkatan Kualitas SHK pada Pengumpulan Data Inflasi, Pembinaan Statistik Sektorale Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi, Pengumpulan Data Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, Pembinaan Statistik Sektorale Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Persiapan Publikasi/Laporan Survei Angkatan Kerja Nasional, Persiapan Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pembinaan Statistik Sektorale Kesejahteraan Rakyat, Pengumpulan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat, Ujicoba Kuesioner Susenas Maret 2026, Pengumpulan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional, *Monitoring* dan Evaluasi Administrasi Kegiatan Susenas, Pengawasan kegiatan Susenas dan Seruti, Pembinaan Statistik Sektorale Ketahanan Sosial, Pendataan Lapangan Statistik Politik dan Keamanan, Persiapan Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial, Pengumpulan Data Statistik Ketahanan Sosial, Pengolahan dan Analisis Statistik Ketahanan Sosial, Pengumpulan Data Potensi Desa, Pembinaan Statistik Sektorale Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, Pengolahan dan Analisis Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Diseminasi dan Evaluasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Pengumpulan Data Statistik *E-Commerce*, Pembinaan Statistik Sektorale Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Indepth Interview Perhutanan Sosial 2025, Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Persiapan Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan, *Matching* Direktori dengan Instansi Terkait dalam penyiapan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Pengumpulan Data Statistik Kehutanan, *Matching* Direktori dan Data Kehutanan Dengan Instansi Terkait, Pengutipan Direktori Perusahaan Perikanan, Pembinaan Statistik Sektorale Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan, Pengumpulan Data Statistik Hortikultura dan Perkebunan, Penyusunan LAKIN Satker Eselon I, Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Capaian Kinerja Anggaran Dan Perencanaan 2025, *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan Korpri, Kegiatan Pendukung Reformasi Birokrasi, Kegiatan Layanan Hukum, Kegiatan Peliputan pada Layanan Hubungan

Masyarakat dan Informasi, Kegiatan Hubungan Kelembagaan dan Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri, Kegiatan Protokol, Kegiatan Hukum pada Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, FGD bersama Panja RUU Statistik, Kegiatan Layanan Bantuan Hukum, Kegiatan Layanan Manajemen SDM, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, Kegiatan Kesejahteraan dan Disiplin SDM, Kegiatan Administrasi Keuangan, Kegiatan Administrasi Keuangan pada Layanan Manajemen Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan, Pengelolaan BMN, Kegiatan Kerumahtanggaan pada Layanan Umum, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pengembangan Kompetensi Pegawai APIP, Pengawasan Kinerja Tusi Lembaga, Pelaksanaan Layanan Pengawasan Internal, Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara, dan Pengawasan Kinerja Bidang Khusus.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota digunakan antara lain untuk Pembayaran kegiatan dalam rangka: Kegiatan SNLIK Tahun 2025, Pengolahan MPD Wisatawan Mancanegara, *Workshop* Pengolahan MPD Wisatawan Mancanegara, Rapat Koordinasi Data Wisatawan Mancanegara Bulanan, Pengolahan MPD Wisatawan Mancanegara di DPP dan DPR, FGD Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, *Workshop* Dampak Kebijakan Program MBG, Rapat Koordinasi Nasional kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Pembinaan Statistik Sektoral, FGD pelaksanaan pembinaan statistik sektoral, *Workshop* penyusunan neraca arus energi dan emisi GRK kolaborasi penyediaan data pendukung dan pemanfaatan utk perumusan kebijakan, Koordinasi Evaluasi Anggaran Belanja Barang TI dengan KL, Koordinasi Evaluasi Anggaran Belanja Barang TI dengan KL, FGD Pembahasan Kompilasi Data Statistik Perdagangan Luar Negeri, Koordinasi Penyiapan Prelist SE2026, Penguatan Pendataan KEK dan KI dalam rangka menyongsong SE2026, Penguatan Pengelolaan Aplikasi, Penguatan Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur untuk Mendukung SE 2026, Rapat Koordinasi Teknis dan Administrasi Evaluasi Kegiatan 2025 dan Finalisasi Persiapan SE2026, Rapat Koordinasi Teknis dan Administrasi Evaluasi Kegiatan 2025 dan Finalisasi Persiapan SE2026, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DTSEN Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik, Sosialisasi data ekonomi kepada media, Sosialisasi SE 2026 BPS Pusat, Sosialisasi sensus ekonomi 2026 dengan pihak eksternal, *Workshop* kehumasan dalam rangka persiapan publisitas SE2026, FGD Persiapan Pelaksanaan SE2026, *Workshop* penyusunan profil risiko SE2026, Rapat/Pertemuan Pejabat Eselon III ke bawah (DKI Jakarta), Pembinaan sektoral, Penguatan Statistik Kependudukan, *High Level Meeting* Penguatan Statistik Kependudukan, Kegiatan DTSEN Tahun 2025, Penyiapan data untuk rekonsiliasi kemiskinan, Rekonsiliasi data statistik, FGD Validasi Kualitas Data, *Workshop* Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media, *Workshop* Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Ekonom, FGD DPR, Rapat Dengan DPR RI, Uji kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional arsiparis.
- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan antara lain untuk Pembayaran kegiatan dalam rangka: Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelarasan Kebijakan Statistik Sektoral dan Prioritas Pembangunan, Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelarasan Kebijakan Statistik Sektoral dan Prioritas Pembangunan, Pembinaan dan Koordinasi Diseminasi Statistik, *Workshop* Evaluasi data Wisman berdasarkan MPD, Rapat Evaluasi kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, rekonsiliasi Data PDBPDRB Berbasis

CVM, Koordinasi Persiapan SE2026, sosialisasi sensus ekonomi 2026 dengan pihak eksternal, Rapat Pembahasan Integrasi Survei Berbasis Usaha, bersama Forum Masyarakat Statistik, Rapat Pimpinan Lengkap, Lansow Pimpinan BPS Tahun 2025, FGD DPR, Forum Diskusi dan Sinergi Baleg DPR RI dan BPS Dalam Rangka Penyampaian Aspirasi Ruu Statistik, rapat koordinasi teknis kesestamaan.

7. Belanja Belanja Perjalanan Dinas Lainnya – Luar Negeri digunakan untuk Pembayaran kegiatan dalam rangka: Kunjungan Pimpinan BPS ke Australian Bureau of Statistics (ABS), *Workshop on Time Use Statistics*, Studi Banding RUU Statistik Tahun 2025, Studi Banding RUU Statistik Tahun 2025, Kunjungan Pimpinan dalam rangka menghadiri Osaka Expo, *The 23rd Meeting of the ASEAN Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination and Communication of Statistics (WGDSA23)*, *The 8th Meeting Of Asean Working Group On Sustainable Development Goals Indicators (WGSDG18)*, *Global Meeting on Measuring Femicides and Other Forms of Gender-Based Violence, Capacity Building Workshop: Data Ethics, Governance, and Quality in Changing Data Ecosystem for the Asia-Pacific Region*, *13th Expert Forum The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) for Climate Change-Related Statistics*, *OECD-KOSTAT Global Conference 2025 on AI for Data, Data for AI*, *12th Working Group on Statistics of International Trade in Services (WGSITS12)*, *10th Statistical Data and Metadata Exchange Global Conference*, *Paviliun Indonesia World Expo 2025*, *China ASEAN Seminar*, *14th Session of the OIC-Statistical Commission*, *The 29th In-Person Meeting of the Wiesbaden Group on Business Registers*, *International Forum, Digital Transformation of National Statistical Systems*, *Global Advanced Technology, AI And Cybersecurity Leadership*.

Realisasi Belanja Barang selama TA 2025 bersumber dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN).

Belanja Barang
Operasional
Rp114.140.984.658,00

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Realisasi Belanja Barang Operasional (5211) untuk TA 2025 adalah Rp114.140.984.658,00 atau 94,20 persen dari pagu yang senilai Rp121.171.370.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 30
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	74.098.205.000	68.128.236.444	7.148.346	68.121.088.098	91,93
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	100,00

521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	200.000	0	0	0	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	401.925.000	368.722.139	0	368.722.139	91,74
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36.772.826.000	36.033.367.802	48.627.462	35.984.740.340	97,86
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9.897.194.000	9.665.512.825	98.744	9.665.414.081	97,66
Jumlah		121.171.370.000	114.196.859.210	55.874.552	114.140.984.658	94,20

Realisasi Belanja Barang Operasional secara netto selama TA 2025 adalah Rp114.140.984.658,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp114.196.859.210,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp55.874.552,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja keperluan perkantoran, pengembalian belanja honor operasional satuan kerja, dan pengembalian belanja barang operasional lainnya. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 31
Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	68.121.088.098	60.889.941.547	7.231.146.551	11,88
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1.020.000	0	1.020.000	100,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	368.722.139	281.384.405	87.337.734	31,04
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	35.984.740.340	28.186.613.910	7.798.126.430	27,67
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9.665.414.081	20.860.971.557	(11.195.557.476)	(53,67)
Jumlah		114.140.984.658	110.218.911.419	3.922.073.239	3,56

Realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2025 sebesar Rp114.140.984.658,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2024 sebesar Rp110.218.911.419,00. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.922.073.239,00 atau sebesar 3,56 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan pada belanja keperluan perkantoran, kenaikan pada belanja pengadaan bahan makanan, kenaikan pada belanja pengiriman surat dinas pos pusat, dan kenaikan pada belanja honor operasional satuan kerja.

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 32
Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	68.116.463.093	4.625.005	68.121.088.098
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1.020.000	0	1.020.000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	1.752.903.416
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	368.722.139	0	368.722.139
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	35.984.740.340	0	35.984.740.340
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9.665.414.081	0	9.665.414.081
Jumlah		114.136.359.653	4.625.005	114.140.984.658

Belanja Barang Non Operasional
Rp904.606.582.561,00

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212) untuk TA 2025 adalah Rp904.606.582.561,00 atau 90,77 persen dari pagu yang senilai Rp996.613.957.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 33
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			%
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521211	Belanja Bahan	113.495.709.000	78.914.179.540	47.926.543	78.866.252.997	69,49
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	809.953.011.000	787.351.624.399	183.300.442	787.168.323.957	97,19
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	63.184.680.000	29.030.226.601	3.975.809	29.026.250.792	45,94
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9.298.717.000	8.875.825.571	901.809	8.874.923.762	95,44
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	681.840.000	670.831.053	0	670.831.053	98,39
Jumlah		996.613.957.000	904.842.687.164	236.104.603	904.606.582.561	90,77

Realisasi Belanja Barang Non Operasional secara neto selama TA 2025 adalah Rp904.606.582.561,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp904.842.687.164,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp236.104.603,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja bahan, pengembalian belanja honor output kegiatan, pengembalian belanja barang non operasional lainnya, dan pengembalian belanja peralatan dan mesin

– ekstrakomptabel. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 34
Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	78.866.252.997	57.676.398.420	21.189.854.577	36,74
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	787.168.323.957	397.970.560.530	389.197.763.427	97,80
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29.026.250.792	25.969.381.027	3.056.869.765	11,77
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	8.874.923.762	7.965.379.275	909.544.487	11,42
521253	Belanja Gedung dan Bangunan -Ekstrakomptabel	670.831.053	758.814.194	(87.983.141)	(11,59)
Jumlah		904.606.582.561	490.340.533.446	414.266.049.115	84,49

Realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2025 sebesar Rp904.606.582.561,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2024 sebesar Rp490.340.533.446,00. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp414.266.049.115,00 atau sebesar 84,49 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan pada belanja bahan, kenaikan pada belanja honor output kegiatan, kenaikan pada belanja barang non operasional lainnya, dan kenaikan pada belanja peralatan dan mesin – ekstrakomptabel.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional periode TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 35
Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	70.260.328.847	8.605.924.150	0	78.866.252.997
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	764.402.339.037	22.765.984.920	0	787.168.323.957
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.383.345.058	1.494.865.679	3.148.040.055	29.026.250.792
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8.874.923.762	0	0	8.874.923.762
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	670.831.053	0	0	670.831.053
Jumlah		868.591.767.757	32.866.774.749	3.148.040.055	904.606.582.561

Belanja Barang
Persediaan
Rp62.174.497.361,00

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan merupakan pengeluaran pemerintah untuk perolehan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang Persediaan (5218) untuk TA 2025 adalah Rp62.174.497.361,00 atau 35,99 persen dari pagu yang senilai Rp172.736.074.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 36
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	172.736.074.000	62.177.156.526	2.659.165	62.174.497.361	35,99
Jumlah		172.736.074.000	62.177.156.526	2.659.165	62.174.497.361	35,99

Realisasi Belanja Barang Persediaan secara netto selama TA 2025 adalah Rp62.174.497.361,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp62.177.156.526,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp2.659.165,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja barang persediaan barang konsumsi. Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 37
Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	62.174.497.361	59.131.155.616	3.043.341.745	5,15
Jumlah		62.174.497.361	59.131.155.616	3.043.341.745	5,15

Realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2025 sebesar Rp62.174.497.361,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2024 sebesar Rp59.131.155.616,00. Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.043.341.745,00 atau sebesar 5,15 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja barang persediaan barang konsumsi.

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 38
Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54.589.661.356	7.584.836.005	62.174.497.361
Jumlah		54.589.661.356	7.584.836.005	62.174.497.361

Belanja Jasa
Rp286.262.201.705,00

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (5221) untuk TA 2025 adalah Rp286.262.201.705,00 atau 91,83 persen dari pagu yang senilai Rp311.745.115.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Jasa selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 39
Pagu dan Realisasi Belanja Jasa

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
522111	Belanja Langganan Listrik	47.090.911.000	44.665.720.348	6.582.897	44.659.137.451	94,84
522112	Belanja Langganan Telepon	1.107.341.000	1.036.250.378	550.068	1.035.700.310	93,53
522113	Belanja Langganan Air	2.137.950.000	2.044.087.087	56.537	2.044.030.550	95,61
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.515.143.000	14.117.126.047	74.500	14.117.051.547	60,03
522131	Belanja Jasa Konsultan	4.770.014.000	4.559.754.432	0	4.559.754.432	95,59
522141	Belanja Sewa	12.253.153.000	11.718.606.251	0	11.718.606.251	95,64
522151	Belanja Jasa Profesi	16.206.653.000	8.028.867.792	800.000	8.028.067.792	49,54
522191	Belanja Jasa Lainnya	204.663.950.000	200.135.245.625	35.392.253	200.099.853.372	97,77
Jumlah		311.745.115.000	286.305.657.960	43.456.255	286.262.201.705	91,83

Realisasi Belanja Jasa secara netto selama TA 2025 adalah Rp286.262.201.705,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp286.305.657.960,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp43.456.255,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja langganan listrik, pengembalian belanja langganan telepon, pengembalian belanja langganan air, pengembalian belanja langganan daya dan jasa lainnya, pengembalian belanja jasa profesi, dan pengembalian belanja jasa lainnya. Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 40
Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik	44.659.137.451	48.566.751.812	(3.907.614.361)	(8,05)
522112	Belanja Langganan Telepon	1.035.700.310	1.149.684.289	(113.983.979)	(9,91)
522113	Belanja Langganan Air	2.044.030.550	1.789.096.161	254.934.389	14,25
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	14.117.051.547	20.484.815.040	(6.367.763.493)	(31,09)
522131	Belanja Jasa Konsultan	4.559.754.432	834.723.290	3.725.031.142	446,26

522141	Belanja Sewa	11.718.606.251	8.719.693.645	2.998.912.606	34,39
522151	Belanja Jasa Profesi	8.028.067.792	6.522.106.399	1.505.961.393	23,09
522191	Belanja Jasa Lainnya	200.099.853.372	207.700.668.793	(7.600.815.421)	(3,66)
Jumlah		286.262.201.705	295.767.539.429	(9.505.337.724)	(3,21)

Realisasi Belanja Jasa selama TA 2025 sebesar Rp286.262.201.705,00, sedangkan realisasi Belanja Jasa selama TA 2024 sebesar Rp295.767.539.429,00. Realisasi Belanja Jasa TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.505.337.724,00 atau sebesar 3,21 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada belanja langganan listrik, penurunan pada belanja langganan telepon, penurunan pada belanja langganan daya dan jasa lainnya, dan penurunan pada belanja jasa lainnya.

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 41
Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
522111	Belanja Langganan Listrik	44.659.137.451	0	44.659.137.451
522119	Belanja Langganan Telepon	1.035.700.310	0	1.035.700.310
522113	Belanja Langganan Air	2.044.030.550	0	2.044.030.550
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	13.484.852.097	632.199.450	14.117.051.547
522131	Belanja Jasa Konsultan	4.519.884.453	39.869.979	4.559.754.432
522141	Belanja Sewa	11.550.538.058	168.068.193	11.718.606.251
522151	Belanja Jasa Profesi	7.476.432.792	551.635.000	8.028.067.792
522191	Belanja Jasa Lainnya	194.297.860.060	5.801.993.312	200.099.853.372
Jumlah		279.068.435.771	7.193.765.934	286.262.201.705

Belanja Pemeliharaan
Rp140.232.299.535,00

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya. Realisasi Belanja Pemeliharaan (5231) untuk TA 2025 adalah Rp140.232.299.535,00 atau 93,46 persen dari pagu yang senilai Rp150.050.377.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 42
Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.575.542.000	61.815.871.721	4.166.340	61.811.705.381	90,14
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	454.323.000	437.556.267	0	437.556.267	96,31

	Bangunan					
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.678.804.000	2.678.803.555	0	2.678.803.555	100,00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.799.134.000	1.744.910.813	0	1.744.910.813	96,99
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.740.313.000	69.094.350.168	9.558.241	69.084.791.927	96,30
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.611.261.000	1.361.132.592	0	1.361.132.592	84,48
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.191.000.000	3.113.399.000	0	3.113.399.000	97,57
Jumlah		150.050.377.000	140.246.024.116	13.724.581	140.232.299.535	93,46

Realisasi Belanja Pemeliharaan secara neto selama TA 2025 adalah Rp140.232.299.535,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp140.246.024.116,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp13.724.581,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, dan pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 43
Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.811.705.381	49.891.041.800	11.920.663.581	23,89
523112	Belanja Barang Persediaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan	437.556.267	468.847.990	(31.291.723)	(6,67)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.678.803.555	2.498.642.859	180.160.696	7,21
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.744.910.813	1.485.947.488	258.963.325	17,43
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.084.791.927	78.299.141.591	(9.214.349.664)	(11,77)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.361.132.592	664.819.188	696.313.404	104,74
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.113.399.000	6.183.800.000	(3.070.401.000)	(49,65)
Jumlah		140.232.299.535	139.492.240.916	3.810.459.619	2,73

Realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2025 sebesar Rp140.232.299.535,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2024 sebesar Rp139.492.240.916,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.810.459.619,00 atau 2,73 persen dibandingkan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja

pemeliharaan gedung dan bangunan, kenaikan pada belanja asuransi gedung dan bangunan, kenaikan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, dan kenaikan pada belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Pemeliharaan periode TA 2025 hanya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp548.273.338.068,00

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) untuk TA 2025 adalah Rp548.273.338.068,00 atau 70,04 persen dari pagu yang senilai Rp782.842.189.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 44
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	238.672.699.000	138.405.937.618	203.015.997	138.202.921.621	57,09
524112	Belanja Perjalanan Tetap	1.700.000	0	0	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	242.082.373.000	175.301.564.709	40.858.499	175.260.706.210	72,40
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	208.453.251.000	167.665.745.912	48.581.220	167.617.164.692	80,41
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93.632.166.000	67.330.237.882	137.692.337	67.192.545.545	71,76
Jumlah		782.842.189.000	548.703.486.121	430.148.053	548.273.338.068	70,04

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri secara netto selama TA 2025 adalah Rp548.273.338.068,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp548.703.486.121,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp430.148.053,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan biasa, pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota, pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

Tabel 45
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	138.202.921.621	154.898.733.165	(16.695.811.544)	(10,78)
524112	Belanja Perjalanan Tetap	0	0	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.260.706.210	149.109.664.611	26.151.041.599	17,54
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	167.617.164.692	180.324.974.653	(12.707.809.961)	(7,05)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	67.192.545.545	75.529.571.375	(8.337.025.830)	(11,04)
Jumlah		548.273.338.068	559.862.943.804	(11.589.605.736)	(2,07)

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2025 sebesar Rp548.273.338.068,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2024 sebesar Rp559.862.943.804,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri periode TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.589.605.736,00 atau sebesar 2,07 persen dibanding periode sebelumnya yaitu TA 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan belanja perjalanan biasa, penurunan belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, dan penurunan belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri periode TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel ini.

Tabel 46
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	121.863.578.396	16.339.343.225	138.202.921.621
524112	Belanja Perjalanan Tetap	0	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	148.703.471.417	26.557.234.793	175.260.706.210
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	147.085.889.033	20.531.275.659	167.617.164.692
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	48.920.715.705	18.271.829.840	67.192.545.545
Jumlah		466.573.654.551	81.699.683.517	548.273.338.068

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp4.489.799.219,00

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Perjalanan Luar Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) untuk TA 2025 adalah Rp4.489.799.219,00 atau 58,07 persen dari pagu yang senilai Rp7.731.226.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 47
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	315.000.000	314.608.784	0	314.608.784	99,88
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya—Luar Negeri	7.416.226.000	5.457.789.588	1.282.599.153	4.175.190.435	56,30
Jumlah		7.731.226.000	5.772.398.372	1.282.599.153	4.489.799.219	58,07

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri secara netto selama TA 2025 adalah Rp4.489.799.219,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp5.772.398.372,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.282.599.153,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas lainnya – luar negeri. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 48
Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	314.608.784	0	314.608.784	100,00
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya – Luar Negeri	4.175.190.435	4.079.963.598	95.226.837	2,33
Jumlah		4.489.799.219	4.079.963.598	409.835.621	10,05

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2025 sebesar Rp4.489.799.219,00. sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2024 sebesar Rp4.079.963.598,00. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp409.835.621,00 atau sebesar 10,05 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan belanja perjalanan dinas biasa - luar negeri, dan kenaikan belanja perjalanan perjalanan dinas lainnya – luar negeri.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2025 seluruhnya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

Belanja Modal
Rp354.625.400.426,00

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah Rp354.625.400.426,00 atau 75,39 persen dari pagunya sebesar Rp470.362.426.000,00. Secara rinci, pagu dan realisasi belanja modal TA 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 49
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5311	Belanja Modal Tanah	1.092.600.000	1.049.545.540	0	1.049.545.540	96,06
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.512.987.000	301.708.414.352	2.077.000	301.706.337.352	82,77
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.276.103.000	8.562.046.564	5.739.021	8.556.307.543	92,24
5361	Belanja Modal Lainnya	95.480.736.000	43.313.209.991	0	43.313.209.991	45,36
Jumlah		470.362.426.000	354.633.216.447	7.816.021	354.625.400.426	75,39

Realisasi Belanja Modal secara neto selama TA 2025 sebesar Rp354.625.400.426,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp354.633.216.447,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp7.816.021. Realisasi Belanja Barang Modal TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 50
Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5311	Belanja Modal Tanah	1.049.545.540	2.817.688.400	(1.768.142.860)	(62,75)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.706.337.352	128.659.949.637	173.046.387.715	134,50
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.556.307.543	55.200.428.528	(46.644.120.985)	(84,50)
5361	Belanja Modal Lainnya	43.313.209.991	11.591.010.000	31.722.199.991	273,68
Jumlah		354.625.400.426	198.269.076.565	156.356.323.861	78,86

Realisasi Belanja Modal Badan Pusat Statistik TA 2025 meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2025 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Belanja Modal Tanah
Rp1.049.545.540,00

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 51
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
531111	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0,00
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	3.840.000	3.840.000	0	3.840.000	100,00
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	985.430.000	984.234.838	0	984.234.838	99,88
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	103.330.000	61.470.702	0	61.470.702	59,49
Jumlah		1.092.600.000	1.049.545.540	0	1.049.545.540	96,06

Realisasi Belanja Modal Tanah secara netto pada periode TA 2025 adalah Rp1.049.545.540,00 atau 96,06 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp1.092.600.000,00. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal Tanah pada periode TA 2025.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah periode TA 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
531111	Belanja Modal Tanah	0	2.475.240.400	(2.475.240.400)	(100,00)
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	3.840.000	0	3.840.000	100,00
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	984.234.838	342.448.000	641.786.838	187,41
531117	Belanja Modal Perjalanan pengadaan Tanah	61.470.702	0	61.470.702	100,00
Jumlah		1.049.545.540	2.817.688.400	(1.768.142.860)	(62,75)

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp1.049.545.540,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp2.817.688.400,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.768.142.860,00 atau sebesar 62,75 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 seluruhnya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp301.706.337.352,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode TA 2025 tersaji sebagai berikut

Tabel 53
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.512.987.000	301.708.414.352	2.077.000	301.706.337.352	82,77
Jumlah		364.512.987.000	301.708.414.352	2.077.000	301.706.337.352	82,77

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara netto TA 2025 adalah Rp301.706.337.352,00 atau 82,77 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp364.512.987.000. Realisasi pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2025 adalah sebesar Rp2.077.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.706.337.352	128.659.949.637	173.046.387.715	134,50
Jumlah		301.706.337.352	128.659.949.637	173.046.387.715	134,50

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2025 sebesar Rp301.706.337.352,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2024 sebesar Rp128.659.949.637,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp173.046.387.715,00 atau sebesar 134,50 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 55
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		RM	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.004.871.001	2.701.466.351	301.706.337.352
Jumlah		299.004.871.001	2.701.466.351	301.706.337.352

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp8.556.307.543,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 56
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.168.784.000	1.144.555.668	5.739.020	1.138.816.648	97,44
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	34.562.000	33.318.325	0	33.318.325	96,40
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	160.000.000	154.646.546	0	154.646.546	96,65
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	3.608.000	3.607.100	0	3.607.100	99,98
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.909.149.000	7.225.918.925	1	7.225.918.924	91,36
Jumlah		9.276.103.000	8.562.046.564	5.739.021	8.556.307.543	92,24

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara neto TA 2025 adalah Rp8.556.307.543,00 atau 92,24 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp9.276.103.000,00. Realisasi pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2025 adalah sebesar Rp5.739.021,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 57
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.138.816.648	18.350.429.697	(17.211.613.049)	(93,79)
533113	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	33.318.325	0	33.318.325	100,00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	154.646.546	19.916.000	134.730.546	676,49
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	3.607.100	14.020.000	(10.412.900)	(74,27)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.225.918.924	36.816.062.831	(29.590.143.907)	(80,37)
Jumlah		8.556.307.543	55.200.428.528	(46.644.120.985)	(84,50)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2025 sebesar Rp8.556.307.543,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2024 sebesar Rp55.200.428.528,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp46.644.120.985,00 atau sebesar 84,50 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 58
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		RM	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.138.816.648	0	1.138.816.648
533113	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	3.318.325	0	33.318.325
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	154.646.546	0	154.646.546
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	3.607.100	0	3.607.100
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.043.733.350	182.185.574	7.225.918.924
Jumlah		8.344.121.969	182.185.574	8.526.307.543

Belanja Modal Lainnya
Rp43.313.209.991,00

B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai aset tersebut dapat digunakan

dan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya pada periode TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 59
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
536111	Belanja Modal Lainnya	95.480.736.000	43.313.209.991	0	43.313.209.991	45,36
Jumlah		95.480.736.000	43.313.209.991	0	43.313.209.991	45,36

Realisasi Belanja Modal Lainnya secara neto TA 2025 adalah Rp43.313.209.991,00 atau 45,36 persen dari nilai pagu sebesar Rp95.480.736.000,00. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal Lainnya pada periode TA 2025.

Rincian realisasi Belanja Lainnya TA 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 60
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya	43.313.209.991	11.591.010.000	31.722.199.991	273,68
Jumlah		43.313.209.991	11.591.010.000	31.722.199.991	273,68

Realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2025 sebesar Rp43.313.209.991,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2024 sebesar Rp11.591.010.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.722.199.991,00 atau sebesar 273,68 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya masing-masing disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 61
Realisasi Belanja Modal Lainnya
Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		RM	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
536111	Belanja Modal Lainnya	43.292.589.991	20.620.000	43.313.209.991
Jumlah		43.292.589.991	20.620.000	43.313.209.991

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset Lancar
Rp55.419.831.674,00

C.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.419.831.674,00 dan Rp51.921.547.997,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Neraca BPS per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji pada tabel 62.

Tabel 62
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.230.000	(6.230.000)
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	8.765.194	13.080.793	(4.315.599)
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	17.599.683.644	17.435.230.541	164.453.103
4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	102.859.500	0	102.859.500
5	Piutang Bukan Pajak	1.613.758.370	2.041.478.916	(427.720.546)
6	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(1.089.606.557)	(434.784.343)	(654.822.214)
7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	16.167.310.979	15.227.357.084	939.953.895
8	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(15.193.001.599)	(15.190.110.920)	(2.890.679)
9	Persediaan	36.210.062.143	32.823.065.926	3.386.996.217
Jumlah		55.419.831.674	51.921.547.997	3.498.283.677

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.230.000,00, yang merupakan saldo kas/bank yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan).

Seluruh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah dipertanggungjawabkan dan disetorkan ke Kas Negara sebelum tanggal 31 Desember 2025.

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp8.765.194,00

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.765.194,00 dan Rp13.080.793,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas

yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo yang merupakan saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai serta belanja hibah yang masih dalam bentuk SPJ yang belum disahkan oleh KPPN. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 merupakan saldo akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Secara rinci saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 terdapat pada wilayah BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang berupa pendapatan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal Neraca.

Belanja Dibayar
Dimuka (*prepaid*)
Rp17.599.683.644,00

C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.599.683.644,00 dan Rp17.435.230.541,00. Saldo ini merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh BPS, namun BPS telah membayar atas barang/jasa tersebut. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam mata uang rupiah. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut.

Tabel 63
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

No.	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Barang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	17.599.683.644	17.412.483.288	187.200.356
2	Belanja Lain-lain Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	0	22.747.253	(22.747.253)
Jumlah		17.599.683.644	17.435.230.541	164.453.103

Daftar saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 64
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama	13.154.455.439	12.310.725.020
2	Pusdiklat BPS	924.096.050	2.606.394.052
3	Polstat STIS	23.347.108	21.460.669
4	DK Jakarta	3.471.057	0
5	Jawa Barat	441.721.092	397.263.772
6	Jawa Tengah	37.183.202	49.602.178
7	DI Yogyakarta	1.023.476	35.464.733
8	Jawa Timur	138.321.384	174.567.467

9	Aceh	13.531.818	5.834.583
10	Sumatera Utara	101.908.672	18.320.951
11	Sumatera Barat	93.049.013	44.269.366
12	Riau	21.073.948	132.431.915
13	Jambi	1.288.064	0
14	Sumatera Selatan	381.202.727	150.784.181
15	Lampung	8.049.733	361.208
16	Kalimantan Barat	43.103.292	56.254.558
17	Kalimantan Tengah	47.275.298	13.095.726
18	Kalimantan Selatan	23.436.905	0
19	Kalimantan Timur	55.016.079	90.501.206
20	Sulawesi Utara	387.006.635	23.062.000
21	Sulawesi Tengah	208.813.635	71.081.556
22	Sulawesi Selatan	84.608.858	66.176.036
23	Sulawesi Tenggara	183.641.968	0
24	Maluku	134.606.317	110.222.388
25	Bali	70.947.277	66.652.666
26	Nusa Tenggara Barat	2.825.608	238.655.291
27	Nusa Tenggara Timur	219.103.664	62.192.892
28	Papua	588.144.552	50.913.598
29	Bengkulu	39.494.520	20.867.879
30	Maluku Utara	7.976.902	5.207.376
31	Banten	22.919.116	165.847.734
32	Bangka Belitung	11.791.516	13.914.371
33	Gorontalo	21.643.454	0
34	Kepulauan Riau	18.499.899	50.855.627
35	Papua Barat	50.130.902	16.986.310
36	Sulawesi Barat	31.328.054	2.218.887
37	Kalimantan Utara	3.646.410	363.044.345
Jumlah		17.599.683.644	17.435.230.541

Pendapatan Yang
Masih harus Diterima
Rp102.859.500,00

C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp102.859.500,00 dan Rp0,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan PNPB yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara serta belum ada dokumen penagihannya sampai dengan tanggal Neraca.

Daftar saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 65
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	102.579.200	0	102.579.200
2	Riau	280.300	0	280.300
Jumlah		102.859.500	0	102.859.500

Penjelasan rincian wilayah/daerah untuk saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada satker Settama senilai Rp102.579.200,00 terdiri dari kelebihan realisasi belanja pegawai uang lembur senilai Rp99.736.250,00 dan uang makan pegawai senilai Rp2.842.950,00.
2. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada wilayah BPS Provinsi Riau senilai Rp280.300,00 merupakan kelebihan realisasi uang makan pegawai.

Piutang Bukan Pajak C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak

Rp1.613.758.370,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.613.758.370,00 dan Rp2.041.478.916,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan dan disajikan dalam mata uang rupiah. Daftar saldo Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 66
Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	14.321.245	196.825.100	(182.503.855)
2	Pusdiklat BPS	0	432.692	(432.692)
3	Jawa Barat	105.450	150.300.758	(150.195.308)
4	Jawa Tengah	8.742.028	17.354.383	(8.612.355)
5	DI Yogyakarta	0	764.270	(764.270)
6	Jawa Timur	57.063.915	54.249.315	2.814.600
7	Aceh	16.951.172	0	16.951.172
8	Sumatera Barat	6.513.449	36.428.780	(29.915.331)
9	Sumatera Selatan	74.898.850	75.808.266	(909.416)
10	Kalimantan Barat	0	69.700	(69.700)
11	Kalimantan Selatan	0	9.039.716	(9.039.716)
12	Kalimantan Timur	9.462.500	0	9.462.500
13	Sulawesi Selatan	5.734.750	8.242.990	(2.508.240)
14	Sulawesi Tenggara	118.982	0	118.982
15	Nusa Tenggara Timur	2.037.400	70.929.626	(68.892.226)
16	Papua	10.544.800	4.735.720	5.809.080
17	Bengkulu	0	210.600	(210.600)
18	Maluku Utara	2.448.000	337.838	2.110.162
19	Banten	0	2.825.521	(2.825.521)
20	Bangka Belitung	225.134.260	234.868.281	(9.734.021)
21	Kep. Riau	1.632.000	0	1.632.000
22	Papua Barat	0	145.041	(145.041)
23	Sulawesi Barat	4.185.000	1.639.000	2.546.000

24	Kalimantan Utara	1.173.864.569	1.176.271.319	(2.406.750)
Jumlah		1.613.758.370	2.041.478.916	(427.720.546)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Rp1.089.606.557,00

C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.089.606.557,00 dan Rp434.784.343,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 67
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker

No.	Uraian	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Settama	181.470
2	Jawa Barat	527
3	Jawa Tengah	43.711
4	Jawa Timur	5.765.745
5	Aceh	84.756
6	Sumatera Barat	32.568
7	Sumatera Selatan	374.495
8	Kalimantan Timur	47.313
9	Sulawesi Selatan	28.674
10	Sulawesi Tenggara	595
11	Nusa Tenggara Timur	10.187
12	Papua	52.724
13	Maluku Utara	12.240
14	Bangka Belitung	223.724.093
15	Kep. Riau	8.160
16	Sulawesi Barat	20.925
17	Kalimantan Utara	859.218.374
Jumlah		1.089.606.557

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp16.167.310.979,00

C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.167.310.979,00 dan Rp15.227.357.084,00. Saldo ini merupakan nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2025 dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual bahwa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang dibukukan ke dalam Neraca merupakan bagian dari Aset Lancar, sedangkan sisanya dibukukan ke dalam Tagihan TP/TGR

pada Piutang Jangka Panjang. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 merupakan saldo dari debitur yang dikenakan TP/TGR melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan (SKP) serta reklasifikasi saldo akun Aset Lain-Lain yang menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yaitu debitur TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL.

Berdasarkan proses penetapan Piutang TP/TGR, debitur dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Debitur yang telah ditetapkan nilai kerugian negaranya berdasarkan SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan.
2. Debitur yang sedang dalam proses pembebanan kerugian negaranya yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR).
3. Debitur yang nilai piutangnya telah dilimpahkan ke KPKNL.

Saldo piutang atas kerugian negara yang masuk sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang sebesar Rp16.167.310.979,00 merupakan nilai yang status debiturnya telah ditetapkan sebagai TGR. Jumlah debitur yang sedang dalam proses penetapan sebesar 4 orang selama tahun 2025.

Daftar saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 68
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	16.167.310.979	15.227.357.084	939.953.895
Jumlah		16.167.310.979	15.227.357.084	939.953.895

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp15.193.001.599,00*

C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.193.001.599,00 dan Rp15.190.110.920,00 atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 69
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Kualitas Piutang	Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	Lancar	979.205.407	0,5	4.896.027
		Macet	15.188.105.572	100	15.188.105.572
Jumlah			16.167.310.979		15.193.001.599

Persediaan

Rp36.210.062.143,00

C.1.1.9 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp36.210.062.143,00 dan Rp32.823.065.926,00. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.210.062.143,00 tersaji sebagai berikut.

Tabel 70
Rincian Persediaan

Kode	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117111	Barang Konsumsi	35.369.547.308	32.105.593.363	3.263.953.945
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	840.514.835	717.472.563	123.042.272
Jumlah		36.210.062.143	32.823.065.926	3.386.996.217

Perhitungan mutasi nilai Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	36.210.062.143
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	32.823.065.926
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	3.386.996.217
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	62.186.654.791
Saldo Awal	Rp	18.507.781
Transfer Masuk	Rp	21.565.387.878
Reklasifikasi Masuk	Rp	416.901.500
Reklasifikasi Dari Aset	Rp	281.974.400
Perolehan Lainnya	Rp	36.882.645
Koreksi Nilai Tambah	Rp	76.869.760
Koreksi Kuantitas Tambah	Rp	2.606.334.616
Koreksi Transfer Keluar Online	Rp	78.960.729
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	87.268.474.100
Mutasi Kurang		
Habis Pakai	(Rp)	56.656.647.985)
Transfer Keluar	(Rp)	21.644.348.607)
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	405.100.299)
Reklasifikasi ke Aset	(Rp)	396.692.097)
Keluar Lainnya	(Rp)	23.333.048)

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Koreksi Nilai Kurang	(Rp	2.577.583.246)	
Koreksi Kuantitas Kurang	(Rp	108.968.935)	
Hasil Opname Fisik	(Rp	1.483.240.321)	
Koreksi Audited Rupiah Berkurang (TAB)	(Rp	48.166.800)	
Koreksi Audited Rupiah Berkurang (TAYL)	(Rp	112.800)	
Usang	(Rp	537.283.745)	
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	83.881.477.883)	
Jumlah Rincian Mutasi			Rp 3.386.996.217

Rincian saldo Persediaan per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 71
Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Settama	3.815.436.634
2	0199	Pusdiklat	1.052.511.772
3	0199	Polstat STIS	116.713.542
4	0100	DKI Jakarta	886.824.702
5	0200	Jawa Barat	1.989.971.035
6	0300	Jawa Tengah	2.053.718.108
7	0400	DI Yogyakarta	426.813.506
8	0500	Jawa Timur	2.335.207.366
9	0600	Aceh	952.890.201
10	0700	Sumatera Utara	962.500.596
11	0800	Sumatera Barat	1.775.821.842
12	0900	Riau	621.866.244
13	1000	Jambi	100.784.185
14	1100	Sumatera Selatan	815.881.838
15	1200	Lampung	1.209.688.516
16	1300	Kalimantan Barat	710.205.521
17	1400	Kalimantan Tengah	949.762.568
18	1500	Kalimantan Selatan	1.213.548.673
19	1600	Kalimantan Timur	665.197.610
20	1700	Sulawesi Utara	678.633.579
21	1800	Sulawesi Tengah	446.910.328
22	1900	Sulawesi Selatan	1.886.214.254
23	2000	Sulawesi Tenggara	450.464.843
24	2100	Maluku	1.366.202.223
25	2200	Bali	169.852.516
26	2300	Nusa Tenggara Barat	172.381.338
27	2400	Nusa Tenggara Timur	976.340.460
28	2500	Papua	1.455.654.846
29	2600	Bengkulu	519.244.133
30	2800	Maluku Utara	412.472.113
31	2900	Banten	2.020.028.206
32	3000	Bangka Belitung	375.031.956
33	3100	Gorontalo	350.994.044
34	3200	Kepulauan Riau	477.523.344
35	3300	Papua Barat	1.173.469.682
36	3400	Sulawesi Barat	113.027.480
37	3500	Kalimantan Utara	510.272.339

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)
Jumlah			36.210.062.143

Terdapat jenis barang yang merupakan persediaan dengan kondisi rusak dan usang. Rincian atas barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang dalam kondisi rusak sebesar Rp158.193.766,00.
2. Barang dalam kondisi usang sebesar Rp704.359.217,00.

Jumlah dan Jenis barang persediaan secara terinci dilampirkan pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Rp5.439.702.162.188,00

C.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.439.702.162.188,00 dan Rp5.244.096.052.870,00. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 72
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah	3.372.760.426.374	3.218.598.001.809	154.162.424.565	4,79
Peralatan & Mesin	2.309.714.137.898	2.196.281.247.356	113.432.890.542	5,16
Gedung & Bangunan	2.118.665.938.246	2.089.954.257.109	28.711.681.137	1,37
Aset Tetap Lainnya	29.118.309.243	35.254.629.078	(6.136.319.835)	(17,41)
KDP	7.722.305.444	27.044.596.490	(19.322.291.046)	(71,45)
Jumlah	7.837.981.117.205	7.567.132.731.842	270.848.385.363	3,58
Akumulasi Penyusutan	(2.398.278.955.017)	(2.323.036.678.972)	(75.242.276.045)	3,24
Nilai Buku Aset Tetap	5.439.702.162.188	5.244.096.052.870	195.606.109.318	3,73

Posisi Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 73
Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2025

Uraian	Neraca (Rp)	BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.372.760.426.374	3.372.760.426.374	0
Peralatan & Mesin	2.309.714.137.898	2.309.714.137.898	0

Uraian	Neraca (Rp)	BMN (Rp)	Selisih (Rp)
Gedung & Bangunan	2.118.665.938.246	2.118.665.938.246	0
Aset Tetap Lainnya	29.118.309.243	29.118.309.243	0
KDP	7.722.305.444	7.722.305.444	0
Jumlah	7.837.981.117.205	7.837.981.117.205	0
Akumulasi Penyusutan	(2.398.278.955.017)	(2.398.278.955.017)	0
Nilai Buku Aset Tetap	5.439.702.162.188	5.439.702.162.188	0

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan nilai masing-masing jenis Aset Tetap dikarenakan adanya mutasi serta hubungannya dengan belanja modal, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian selanjutnya.

Tanah

Rp3.372.760.426.374,00

C.1.2.1 Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2025 adalah Rp3.372.760.426.374,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp3.218.598.001.809,00. Secara ringkas perubahan saldo Tanah disajikan sebagai berikut.

Tabel 74
Perubahan Saldo Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.372.760.426.374	3.218.598.001.809	154.162.424.565
Jumlah	3.372.760.426.374	3.218.598.001.809	154.162.424.565

Perhitungan mutasi nilai Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	3.372.760.426.374
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	3.218.598.001.809
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	154.162.424.565
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	24.960.000
Hibah Masuk	Rp	107.632.525
Transfer Masuk	Rp	318.605.822.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.337.788.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	610.430.040
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	152.950.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	322.839.602.565
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	165.161.240.000
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	3.337.788.000
Koreksi Pencatatan	(Rp)	177.910.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	240.000
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	168.677.178.000
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	154.162.424.565

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2025 secara netto sebesar Rp1.049.545.540,00. Realisasi belanja modal tanah yang mempengaruhi mutasi nilai Tanah,

alokasi penggunaan belanja modal tanah, dan perolehan tanah yang menggunakan selain belanja modal tanah dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp	24.960.000
Jumlah realisasi belanja modal tanah pada mutasi nilai Tanah	Rp	24.960.000
Penambahan:		
Realisasi belanja modal tanah yang masih di rekening penampungan dan belum dicatat sebagai aset	Rp	97.036.604
Realisasi belanja modal tanah yang masih dalam bentuk KDP	Rp	953.338.936
Jumlah Penambahan	Rp	1.050.375.540
Pengurangan:		
Koreksi atas belanja modal tanah menjadi belanja bahan	(Rp)	600.000)
Realisasi belanja modal tanah yang tidak keluar SP2D	(Rp)	230.000)
Realisasi belanja gedung dan bangunan ekstrakomptabel yang menambah nilai tanah	(Rp)	24.960.000)
Jumlah Pengurangan	(Rp)	25.790.000)
Tambah/(Kurang)	Rp	1.024.585.540
Realisasi belanja modal tanah (neto)	Rp	1.049.545.540

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal tanah yang masih di rekening penampungan dan belum dicatat sebagai aset tanah sebesar Rp97.036.604,00
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal tanah yang dicatat sebagai KDP sebelum menjadi aset definitifnya sebesar Rp953.338.936,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya koreksi atas belanja modal tanah menjadi belanja bahan sebesar Rp600.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja modal tanah yang tidak keluar SP2D sebesar Rp230.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja gedung dan bangunan ekstrakomptabel yang berpengaruh pada nilai tanah sebesar Rp24.960.000,00.

Transaksi mutasi saldo aset Tanah yang berasal dari selain transaksi realisasi belanja modal yang berakibat penambahan dan pengurangan saldo aset Tanah dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penambahan yang berasal dari transaksi pembelian Tanah Lapangan Parkir Konblok sebesar Rp24.960.000,00 terdapat pada satker BPS Kab. Tapanuli Utara pada wilayah Sumatera Utara.
- b. Penambahan yang berasal dari transaksi hibah masuk dengan total nilai sebesar Rp107.632.525,00 terdapat pada satker-satker sebagai berikut:
 1. BPS Kab. Kupang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu mendapat hibah tanah seluas 2.500 m² dari Pemkab Kupang dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00.
 2. BPS Kab. Sabu Raijua di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu mendapat hibah tanah

- seluas 2.500 m² dari Pemkab Sabu Raijua dengan nilai sebesar Rp7.589.975,00.
3. BPS Kab. Maluku Barat Daya di wilayah Maluku, yaitu mendapat hibah tanah seluas 4.099 m² dari Pemkab Maluku Barat Daya dengan nilai sebesar Rp10.042.550,00.
- c. Penambahan yang berasal dari transaksi transfer masuk dengan total nilai sebesar Rp318.605.822.000,00 terdapat pada satker-satker sebagai berikut:
1. Settama BPS yang menerima transfer aset berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 4.120 m² dari Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp5.083.918.000,00.
 2. BPS Kota Binjai di wilayah Sumatera Utara menerima transfer aset berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 4.120 m² dari Settama dengan nilai sebesar Rp5.083.918.000,00.
 3. Settama BPS yang menerima transfer aset berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan seluas 97.170 m² dari Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan nilai sebesar Rp154.218.993.000,00.
 4. Politeknik Statistika STIS menerima transfer aset berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan seluas 97.170 m² dari Settama dengan nilai sebesar Rp154.218.993.000,00.
- d. Penambahan yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp3.337.788.000,00 terdapat pada satker-satker berikut:
1. BPS Kab. Sleman di wilayah Yogyakarta melakukan reklasifikasi masuk menjadi Tanah Bangunan Gudang seluas 644 m² dengan nilai Rp2.234.113.000,00.
 2. BPS Kab. Tuban di wilayah Jawa Timur melakukan reklasifikasi masuk menjadi Tanah Bangunan Gudang seluas 655 m² dengan nilai Rp1.103.675.000,00.
- e. Penambahan yang berasal dari transaksi Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp610.430.040,00 berasal dari BPS Kab. Tapanuli Selatan di wilayah Sumatera Utara atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.
- f. Penambahan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp152.970.000,00 dirinci sebagai berikut:
1. BPS Kab. Kutai Timur di wilayah Kalimantan Timur atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp152.950.000,00.
 2. BPS Kab. Tapanuli Selatan di wilayah Sulawesi Utara atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp20.000,00
- g. Pengurangan yang berasal dari transaksi transfer keluar sebesar Rp165.161.240.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut.
1. BPS Prov. DKI Jakarta di wilayah DKI Jakarta melakukan transfer keluar aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 611 m² dengan nilai Rp5.858.329.000,00 kepada satker Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok (Kementerian Perhubungan).

2. Settama melakukan transfer keluar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 4.120 m² sebesar Rp5.083.918.000,00 kepada BPS Kota Binjai.
3. Settama melakukan transfer keluar Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan seluas 97.170 m² sebesar Rp154.218.993.000,00 kepada Politeknik Statistika STIS.
- h. Pengurangan yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar sebesar Rp3.337.788.000,00 terdapat pada satker-satker berikut:
 1. BPS Kab. Sleman di wilayah Yogyakarta melakukan reklasifikasi keluar dari Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 644 m² dengan nilai Rp2.234.113.000,00.
 2. BPS Kab. Tuban di wilayah Jawa Timur melakukan reklasifikasi keluar dari Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 655 m² dengan nilai Rp1.103.675.000,00.
- i. Pengurangan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan sebesar Rp177.910.000,00 terdapat pada satker-satker berikut:
 1. BPS Kab. Kutai Timur di wilayah Kalimantan Timur atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 161 m² dengan nilai Rp152.950.000,00
 2. BPS Kab. Tapanuli Utara di wilayah Sumatera Utara atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 100 m² dengan nilai Rp24.940.000,00
- j. Pengurangan yang berasal dari transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp240.000,00 terdapat pada satker BPS Kab. Tapanuli Selatan pada wilayah Sumatera Utara.

Terdapat permasalahan pada Aset Tetap Tanah seperti tanah dalam sengketa, tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan, tanah yang dikuasai pihak lain, tanah yang dihentikan penggunaannya, pencatatan ganda, dan status Aset Tetap Tanah pinjam pakai.

Tabel 75
Rincian Permasalahan Tanah

Jenis Permasalahan	Wilayah	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Luasan (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sengketa	Jawa Timur	BPS Kab. Ponorogo	435.480.000	160
	Jambi	BPS. Kab. Tanjung Jabung Barat	236.038.000	354
	Sumatera Barat	BPS Prov. Sumatera Barat	462.500.000	200
	Papua	BPS Kab. Sarmi	277.452.000	1.000
		BPS Kab. Biak Numfor	1.290.967.000	1.153
Dikuasai Pihak Lain	Papua	BPS Kab. Jayawijaya	617.706.000	1.235
Dihentikan Dalam Penggunaan	Jawa Barat	BPS Kota Bekasi	473.234.000	256
	Sumatera Barat	BPS Prov. Sumatera Barat	462.500.000	200
Pencatatan Ganda	Pusat	Settama	104.278.709.000	3.055

Rincian penjelasan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut disajikan secara terinci dalam Lampiran Pendukung Laporan Keuangan I berupa Catatan Atas Laporan BMN BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 pada laporan keuangan ini.

Peralatan dan Mesin **C.1.2.2 Peralatan dan Mesin**

Rp2.309.714.137.898,00

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah Rp2.309.714.137.898,00 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp2.196.281.247.356,00. Secara ringkas perubahan saldo Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	2.309.714.137.898	2.196.281.247.356	113.432.890.542
Jumlah	2.309.714.137.898	2.196.281.247.356	113.432.890.542

Nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah Rp412.978.042.639,00. Nilai Buku Peralatan dan Mesin diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.896.736.095.259,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	2.309.714.137.898
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	2.196.281.247.356
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	113.432.890.542
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	192.150.400
Pembelian	Rp	251.603.318.504
Transfer Masuk	Rp	9.249.026.327
Reklasifikasi Masuk	Rp	6.026.886.376
Hibah Masuk	Rp	96.927.950
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	1.280.496.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	286.625.932
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	10.076.115.722
Koreksi Susulan	Rp	2.268.585.474
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	7.100.781.603
Pembatalan Penghapusan	Rp	515.105.197
Perolehan Lainnya	Rp	2.647.828.412
Pembatalan Transfer Keluar	Rp	559.323.101
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	291.903.270.998
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	9.775.351.428)
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	6.018.896.376)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp)	280.000.000)

Koreksi Pencatatan	(Rp	346.573.581)	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	10.602.447.686)	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	151.447.011.385)	
Koreksi Susulan	(Rp	178.470.380.456)	
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	177.910.957.355)	
Jumlah Rincian Mutasi		Rp	113.432.890.542

Transaksi mutasi saldo aset Peralatan dan Mesin yang berakibat penambahan dan pengurangan saldo aset Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi penambahan saldo awal sebesar Rp192.150.400,00 terdapat pada BPS Kab. Lombok Barat di wilayah Nusa Tenggara Barat atas pencatatan aset berupa A.C Split sebesar Rp172.300.400,00, CCTV sebesar Rp12.400.00,00, dan Televisi sebesar Rp7.450.000,00.
- Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pembelian sebesar Rp251.603.318.504,00. Transaksi pembelian berdasarkan wilayah dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Politeknik Statistika STIS	682.231.465
2	Pusdiklat BPS	975.279.886
3	Settama	163.412.658.814
4	DKI Jakarta	570.879.987
5	Jawa Barat	2.946.740.866
6	Jawa Tengah	5.360.307.568
7	DI Yogyakarta	1.169.829.814
8	Jawa Timur	4.444.962.209
9	Aceh	2.810.654.575
10	Sumatera Utara	5.027.884.485
11	Sumatera Barat	2.509.177.728
12	Riau	2.295.334.788
13	Jambi	2.938.573.705
14	Sumatera Selatan	4.491.218.464
15	Lampung	2.664.088.232
16	Kalimantan Barat	1.589.167.311
17	Kalimantan Tengah	2.551.160.200
18	Kalimantan Selatan	1.509.409.617
19	Kalimantan Timur	2.151.150.311
20	Sulawesi Utara	3.139.969.094
21	Sulawesi Tengah	2.657.014.487
22	Sulawesi Selatan	3.659.855.866
23	Sulawesi Tenggara	3.038.829.812
24	Maluku	4.090.019.095
25	Bali	1.989.087.683
26	Nusa Tenggara Barat	1.535.713.450
27	Nusa Tenggara Timur	2.617.759.483
28	Papua	4.995.235.121
29	Bengkulu	2.174.765.996
30	Maluku Utara	1.879.146.862
31	Banten	764.197.872
32	Kepulauan Bangka Belitung	1.322.328.560
33	Gorontalo	922.327.925
34	Kepulauan Riau	2.281.835.660
35	Papua Barat	1.567.421.457
36	Sulawesi Barat	789.736.017
37	Kalimantan Utara	2.077.364.039

Jumlah	251.603.318.504
--------	-----------------

- c. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi transfer masuk sebesar Rp9.249.026.327,00. Transfer masuk merupakan kegiatan pencatatan BMN yang berasal dari hasil kiriman (transfer) satker lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transaksi transfer masuk tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	32.998.000
2	Pusdiklat BPS	204.000
3	DKI Jakarta	140.116.335
4	Jawa Barat	153.535.777
5	Jawa Tengah	12.100.000
6	DI Yogyakarta	127.859.050
7	Jawa Timur	718.494.981
8	Aceh	445.099.264
9	Sumatera Utara	811.602.696
10	Sumatera Barat	2.915.804
11	Riau	139.902.416
12	Jambi	55.127.745
13	Sumatera Selatan	68.495.580
14	Lampung	122.191.000
15	Kalimantan Barat	864.816.140
16	Kalimantan Tengah	236.176.935
17	Kalimantan Selatan	24.750.000
18	Kalimantan Timur	179.312.000
19	Sulawesi Utara	73.875.000
20	Sulawesi Tengah	294.360.000
21	Sulawesi Selatan	1.027.182.083
22	Sulawesi Tenggara	18.700.000
23	Maluku	212.800.000
24	Bali	147.453.310
25	Nusa Tenggara Barat	326.706.037
26	Nusa Tenggara Timur	1.182.993.908
27	Papua	937.828.554
28	Bengkulu	9.000.000
29	Maluku Utara	205.875.000
30	Kepulauan Bangka Belitung	87.491.059
31	Gorontalo	207.940.783
32	Kepulauan Riau	286.225.850
33	Sulawesi Barat	85.542.520
34	Kalimantan Utara	9.354.500
Jumlah		9.249.026.327

- d. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp6.026.886.376,00. Reklasifikasi masuk merupakan pencatatan perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain. Transaksi reklasifikasi masuk tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	559.917.178
2	Politeknik Statistika STIS	3.742.500
3	DKI Jakarta	46.381.350
4	Jawa Barat	153.957.000
5	Jawa Tengah	41.179.310
6	DI Yogyakarta	805.150.000
7	Jawa Timur	982.572.400

8	Aceh	208.440.600
9	Sumatera Utara	173.616.120
10	Sumatera Barat	14.400.000
11	Riau	72.100.000
12	Jambi	559.374.620
13	Sumatera Selatan	25.000.000
14	Lampung	663.376.800
15	Kalimantan Barat	78.235.128
16	Kalimantan Selatan	10.300.000
17	Kalimantan Timur	202.908.000
18	Sulawesi Utara	138.309.000
19	Sulawesi Selatan	6.490.000
20	Sulawesi Tenggara	102.200.000
21	Maluku	24.801.020
22	Nusa Tenggara Timur	215.486.000
23	Papua	78.865.500
24	Bengkulu	282.394.800
25	Maluku Utara	274.950.000
26	Kepulauan Bangka Belitung	21.000.000
27	Kepulauan Riau	188.495.100
28	Papua Barat	69.401.150
29	Sulawesi Barat	23.842.800
Jumlah		6.026.886.376

- e. Penambahan yang berasal dari transaksi hibah masuk sebesar Rp96.927.950,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
1. BPS Kab. Minahasa di wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp5.858.000,00 berupa satu buah lemari es senilai Rp2.858.000,00 dan satu buah *loudspeaker* senilai Rp3.000.000,00 dari perorangan.
 2. BPS Kab. Lampung Barat di wilayah Lampung sebesar Rp91.069.950,00 berupa enam buah A.C. Split senilai Rp36.840.900,00 dan tiga buah laptop senilai Rp49.300.650,00, dan satu buah printer senilai Rp4.928.400 dari Pemkab Lampung Barat.
- f. Penambahan yang berasal dari transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp1.280.496.000,00 terdapat pada satker:
1. BPS Kab. Seruyan di wilayah Kalimantan Barat berupa satu unit *Portable Generating Set* senilai Rp236.541.000,00.
 2. Pusdiklat BPS menyelesaikan Pembangunan Dengan KDP atas satu unit elevator/lift senilai Rp1.043.955.000,00.
- g. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan sebesar Rp286.625.932,00. Reklasifikasi masuk dari persediaan merupakan pencatatan perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai persediaan. Transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan tersebut terdapat pada
1. BPS Kab. Konawe Selatan di wilayah Sulawesi Tenggara atas sepuluh unit P.C Unit senilai Rp280.000.000,00 yang semula dicatat sebagai persediaan.
 2. BPS Kab. Majalengka di wilayah Jawa Barat berupa peralatan komputer lainnya

senilai Rp1.490.000,00 yang semula dicatat sebagai persediaan.

3. BPS Kab. Solok Selatan di wilayah Sumatera Barat berupa satu buah CCTV-*Camera Control Television System* senilai Rp3.615.601,00 yang semula dicatat sebagai persediaan.
4. BPS Kab. Rokan Hulu di wilayah Sulawesi Tenggara berupa satu buah CCTV-*Camera Control Television System* senilai Rp1.520.331,00 yang semula dicatat sebagai persediaan.
- h. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp10.076.115.722,00. Koreksi pencatatan nilai bertambah merupakan pencatatan koreksi BMN berupa perubahan nilai suatu transaksi BMN seharusnya menjadi lebih besar daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset PM	Nilai (Rp)
1	Pusat	Settama	Handy Cam	1.853.997
			Monopod	3
			Server	3
			Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	6.993.000.000
			Switch	2.793.476.202
2	Jawa Barat	BPS Kota Cirebon	Vertikal Blind	1.900.000
		BPS Kab. Cirebon	Vertikal Blind	61.129.365
3	Jawa Tengah	BPS Kab. Boyolali	Televisi	700.001
4	Jawa Timur	BPS Kab. Trenggalek	Stationary Generating Set	49.800.000
5	Sumatera Barat	BPS Kab. Agam	Vertikal Blind	65.598.336
6	Lampung	BPS Kab. Way Kanan	Vertikal Blind	41.399.959
7	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Kotawaringin Barat	A.C. Split	6
8	Bali	BPS Provinsi Bali	Vertikal Blind	2.000
		BPS Kab. Jembrana	Lap Top	500.000
		BPS Kab. Bangli	Vertikal Blind	24.125.850
9	NTB	BPS Kab. Lombok Barat	Kursi Besi/Metal	32.640.000
10	Maluku Utara	BPS Kab. Halmahera Timur	A.C. Split	9.990.000
Jumlah				10.076.115.722

- i. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi susulan sebesar Rp2.268.585.474,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Aset PM	Nilai (Rp)
1	Pusat	Settama	Lambang Instansi	443.720.474
			Server	1.790.000.000
			Sice	34.965.000
2	Papua	BPS Kab. Biak Numfor	Lap Top	(100.000)
Jumlah				2.268.585.474

- j. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp7.100.781.603,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan pencatatan BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi yang kemudian mendapatkan perbaikan.

Transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	578.607.928
2	Jawa Barat	403.815.117
3	DI Yogyakarta	188.287.800
4	Jawa Timur	628.884.214
5	Aceh	36.417.800
6	Sumatera Utara	84.835.000
7	Sumatera Barat	519.390.006
8	Jambi	57.424.524
9	Sumatera Selatan	3.146.471.742
10	Lampung	369.767.479
11	Kalimantan Barat	67.105.924
12	Kalimantan Tengah	6.244.530
13	Sulawesi Utara	410.244.887
14	Maluku	26.758.335
15	Nusa Tenggara Barat	565.000
16	Nusa Tenggara Timur	19.356.400
17	Papua	49.700.200
18	Bengkulu	23.076.524
19	Maluku Utara	381.213.801
20	Gorontalo	49.305.692
21	Kalimantan Utara	53.308.700
Jumlah		7.100.781.603

- k. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pembatalan penghapusan sebesar Rp515.105.197,00. Pembatalan penghapusan merupakan pencatatan BMN untuk pembatalan transaksi penghapusan kepada pengguna barang. Transaksi pembatalan penghapusan tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset PM	Nilai (Rp)
1	Aceh	BPS Kota Subulussalam	Sepeda Motor	13.913.000
2	Kalimantan Timur	BPS Kab. Kutai Barat	Sepeda Motor	282.106.798
3	Kalimantan Utara	BPS Kab. Nunukan	Sepeda Motor	219.085.399
Jumlah				515.105.197

- l. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi perolehan lainnya sebesar Rp2.647.828.412,00. Transaksi perolehan lainnya tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	201.331.460
2	DKI Jakarta	5.198.000
3	Jawa Barat	28.898.000
4	Jawa Tengah	10.989.000
5	Jawa Timur	29.779.000
6	Sumatera Utara	75.016.200
7	Jambi	50.040.000
8	Kalimantan Tengah	46.371.360
9	Kalimantan Selatan	28.600.000
10	Sulawesi Utara	86.081.858
11	Sulawesi Selatan	55.745.000
12	Bali	191.385.932

13	Maluku Utara	25.580.000
14	Gorontalo	46.245.000
15	Sulawesi Barat	76.674.180
16	Kalimantan Utara	1.689.893.422
Jumlah		2.647.828.412

- m. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pembatalan transfer keluar sebesar Rp559.323.101,00. Transaksi pembatalan transfer keluar tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Nilai (Rp)
1	Sumatera Utara	BPS Provinsi Sumatera Utara	117.060.045
2	Sumatera Selatan	BPS Provinsi Sumatera Selatan	355.600.000
3	Jawa Barat	BPS Kabupaten Ciamis	56.341.456
4	Maluku Utara	BPS Provinsi Maluku Utara	20.250.000
5	Sulawesi Barat	BPS Provinsi Sulawesi Barat	10.071.600
Jumlah			559.323.101

- n. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi transfer keluar sebesar Rp9.775.351.428,00. Transfer keluar merupakan kegiatan pencatatan BMN yang dikirim (transfer) ke satker lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transaksi transfer keluar tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	254.424.306
2	DKI Jakarta	94.116.340
3	Jawa Barat	209.877.233
4	Jawa Tengah	12.100.000
5	DI Yogyakarta	127.859.050
6	Jawa Timur	672.899.981
7	Aceh	445.099.264
8	Sumatera Utara	928.662.741
9	Sumatera Barat	2.915.804
10	Riau	139.902.416
11	Jambi	55.127.745
12	Sumatera Selatan	424.095.580
13	Lampung	122.191.000
14	Kalimantan Barat	864.816.140
15	Kalimantan Tengah	236.176.935
16	Kalimantan Selatan	24.750.000
17	Kalimantan Timur	179.312.000
18	Sulawesi Tengah	294.360.000
19	Sulawesi Selatan	1.027.182.083
20	Sulawesi Tenggara	18.700.000
21	Maluku	212.800.000
22	Bali	58.702.999
23	Nusa Tenggara Barat	326.706.037
24	Nusa Tenggara Timur	1.182.993.908
25	Papua	937.828.554
26	Bengkulu	9.000.000
27	Maluku Utara	226.125.000
28	Kepulauan Bangka Belitung	87.491.059

29	Gorontalo	207.940.783
30	Kepulauan Riau	286.225.850
31	Sulawesi Barat	95.614.120
32	Kalimantan Utara	9.354.500
Jumlah		9.775.351.428

- o. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar sebesar Rp6.018.896.376,00. Reklasifikasi keluar merupakan pencatatan penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada pencatatan sebelumnya. Transaksi reklasifikasi keluar tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	559.917.178
2	Politeknik Statistika STIS	3.742.500
3	DKI Jakarta	46.381.350
4	Jawa Barat	153.957.000
5	Jawa Tengah	41.179.310
6	DI Yogyakarta	805.150.000
7	Jawa Timur	982.572.400
8	Aceh	208.440.600
9	Sumatera Utara	173.616.120
10	Sumatera Barat	14.400.000
11	Riau	72.100.000
12	Jambi	557.874.620
13	Sumatera Selatan	25.000.000
14	Lampung	663.376.800
15	Kalimantan Barat	78.235.128
16	Kalimantan Selatan	10.300.000
17	Kalimantan Timur	202.908.000
18	Sulawesi Utara	138.309.000
19	Sulawesi Tenggara	102.200.000
20	Maluku	24.801.020
21	Nusa Tenggara Timur	215.486.000
22	Papua	78.865.500
23	Bengkulu	282.394.800
24	Maluku Utara	274.950.000
25	Kepulauan Bangka Belitung	21.000.000
26	Kepulauan Riau	188.495.100
27	Papua Barat	69.401.150
28	Sulawesi Barat	23.842.800
Jumlah		6.018.896.376

- p. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar ke persediaan sebesar Rp280.000.000,00. Reklasifikasi keluar ke persediaan merupakan pencatatan perubahan aset berupa persediaan yang sebelumnya telah dicatat sebagai BMN. Transaksi reklasifikasi keluar ke persediaan tersebut terdapat pada BPS Kab. Konawe Selatan di wilayah Sulawesi Tenggara berupa aset personal Komputer yang kemudian dicatat sebagai persediaan.
- q. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan sebesar

Rp346.573.581,00. Koreksi pencatatan merupakan pencatatan penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada pencatatan sebelumnya. Transaksi koreksi pencatatan tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset PM	Nilai (Rp)
1	Pusat	Politeknik Statistika STIS	Partisi	28.388.250
2	Jawa Barat	BPS Kab. Bogor	Televisi	26.400.000
		BPS Kota Cimahi	A.C. Split	15.673.330
			Camera Digital	22.770.001
			Camera Video	5.850.001
			Televisi	36.600.000
3	Jambi	BPS Kab. Kerinci	Sumur Pemboran Air	109.726.524
4	Sumatera Selatan	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9.599.999
5	Kalimantan Barat	BPS Kab. Kapuas Hulu	Router	1.600.000
6	Kalimantan Selatan	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Loudspeaker	28.600.000
7	Sulawesi Utara	BPS Kab. Minahasa	Lemari Es	2.858.000
		BPS Provinsi Sulawesi Utara	Loudspeaker	3.000.000
			Meja Lipat	8.828.776
8	Nusa Tenggara Barat	BPS Kab. Lombok Barat	CCTV - Camera Control Television System	19.850.000
9	Maluku Utara	BPS Kab. Halmahera Timur	A.C. Split	9.990.000
10	Banten	BPS Kab. Serang	Sumur Pemboran Air	16.838.700
Jumlah				346.573.581

- r. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp10.602.447.686,00. Koreksi pencatatan nilai berkurang merupakan pencatatan koreksi BMN berupa perubahan nilai suatu transaksi BMN seharusnya menjadi lebih kecil daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	9.922.855.205
2	DKI Jakarta	5.198.000
3	Jawa Barat	2.498.000
4	Jawa Tengah	13.766.001
5	DI Yogyakarta	9.406.000
6	Jawa Timur	4.280.770
7	Aceh	37.098.998
8	Sumatera Utara	21.266.645
9	Riau	1.520.331
10	Jambi	76.155.450
11	Lampung	2.078.000
12	Kalimantan Barat	10.350.000
13	Kalimantan Tengah	47.073.366
14	Kalimantan Timur	2.413.902
15	Sulawesi Utara	45.985.081
16	Maluku	1.000.000
17	Bali	210.854.957
18	Nusa Tenggara Barat	6.000.000

19	Papua	2.100.000
20	Bengkulu	2.800.000
21	Maluku Utara	45.790.000
22	Kepulauan Bangka Belitung	55.199.100
23	Gorontalo	46.245.000
24	Sulawesi Barat	26.988.180
25	Kalimantan Utara	3.524.700
Jumlah		10.602.447.686

- s. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp151.447.011.385,00. Penghentian aset dari penggunaan merupakan pencatatan penghentian BMN sebelum dilakukan proses penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal satker yang bersangkutan. Transaksi penghentian aset dari penggunaan tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	47.091.627.310
2	Pusdiklat BPS	2.512.764.517
3	Politeknik Statistika STIS	3.016.690.718
4	DKI Jakarta	577.196.683
5	Jawa Barat	10.377.433.816
6	Jawa Tengah	10.420.881.041
7	DI Yogyakarta	1.317.936.879
8	Jawa Timur	13.481.203.105
9	Aceh	5.671.188.098
10	Sumatera Utara	2.326.035.218
11	Sumatera Barat	5.191.892.020
12	Riau	1.624.722.547
13	Jambi	2.439.385.050
14	Sumatera Selatan	4.582.771.045
15	Lampung	6.718.510.725
16	Kalimantan Barat	565.222.892
17	Kalimantan Tengah	3.045.627.053
18	Kalimantan Selatan	726.343.579
19	Kalimantan Timur	1.553.042.194
20	Sulawesi Utara	733.664.479
21	Sulawesi Tengah	890.328.999
22	Sulawesi Selatan	2.753.448.773
23	Sulawesi Tenggara	255.652.399
24	Maluku	1.626.913.674
25	Bali	1.263.658.335
26	Nusa Tenggara Barat	2.279.029.976
27	Nusa Tenggara Timur	2.904.973.399
28	Papua	5.550.376.428
29	Bengkulu	1.232.171.723
30	Maluku Utara	1.759.820.098
31	Banten	1.516.814.356
32	Kepulauan Bangka Belitung	685.228.327
33	Gorontalo	839.619.873

34	Kepulauan Riau	701.202.724
35	Papua Barat	1.105.019.662
36	Sulawesi Barat	831.764.380
37	Kalimantan Utara	1.276.849.290
Jumlah		151.447.011.385

- t. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi susulan sebesar Rp100.000,00 terdapat pada BPS Kab. Biak Numfor di wilayah Papua atas aset berupa laptop.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp38.924.744.042,00. Rincian Peralatan dan Mesin yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp2.118.665.938.246,00

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp2.118.665.938.246,00 sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp2.089.954.257.109,00. Secara ringkas perubahan saldo Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gedung dan Bangunan	2.118.665.938.246	2.089.954.257.109	28.711.681.137
Jumlah	2.118.665.938.246	2.089.954.257.109	28.711.681.137

Nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah Rp1.617.378.335.198,00. Nilai Buku Gedung dan Bangunan diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp501.287.603.048,00.

Perhitungan mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	2.118.665.938.246
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	2.089.954.257.109
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	28.711.681.137
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	470.334.000
Pembelian	Rp	494.589.904
Transfer Masuk	Rp	1.132.940.000
Hibah Masuk	Rp	232.877.000

Reklasifikasi Masuk	Rp	5.304.672.450
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	2.491.998.832
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	973.716.818
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	487.198.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	3.015.671.041
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	29.114.311.525
Koreksi Susulan	Rp	398.956.202
Pembatalan Penghapusan	Rp	215.607.000
Perolehan Lainnya	Rp	307.364.089
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	44.640.236.861
Mutasi Kurang		
Hibah Keluar	(Rp	3.886.653.000)
Transfer Keluar	(Rp	566.470.000)
Reklasifikasi Keluar	(Rp	5.304.672.450)
Koreksi Manual	(Rp	11.028.666)
Koreksi Pencatatan	(Rp	3.026.214.582)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	2.582.726.026)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	550.791.000)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	15.928.555.724)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	28.711.681.137

Transaksi penambahan dan pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan mutasi Gedung dan Bangunan yang berasal dari transaksi koreksi saldo awal sebesar Rp470.334.000,00 terdapat pada:
 1. BPS Kab. Brebes di wilayah Jawa Tengah atas pencatatan aset berupa dua unit pagar permanen senilai Rp25.857.000,00.
 2. BPS Kab. Ogan Komering Ulu Timur di wilayah Sumatera Selatan atas pencatatan aset berupa pagar permanen senilai Rp194.700.000,00.
 3. BPS Kab. Sumba Barat Daya di wilayah Nusa Tenggara Timur atas aset pagar permanen senilai Rp249.777.000,00.
- b. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pembelian sebesar Rp494.589.904,00. Transaksi pembelian Gedung bangunan tersebut dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Jawa Timur	BPS Kab. Trenggalek	Bangunan Lainnya	49.800.000
2	Sumatera Selatan	BPS Kota Pagar Alam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.140.000
3	Nusa Tenggara Timur	BPS Kab. Manggarai Barat	Bangunan Terbuka Lainnya	159.500.000
			Kanopi	39.950.000
4	Kepulauan Riau	BPS Kab. Natuna	Bangunan Rumah Genset	48.899.904
5	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	161.300.000
Jumlah				494.589.904

- c. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi transfer masuk sebesar Rp1.132.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Settama BPS yang menerima transfer aset berupa satu unit Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp47.560.000,00 dan satu unit Pagar Permanen senilai Rp518.910.000,00 dari Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
 2. Politeknik Statistika STIS menerima transfer aset berupa satu unit Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp47.560.000,00 dan satu unit Pagar Permanen senilai Rp518.910.000,00 dari Settama BPS.
- d. Penambahan yang berasal dari transaksi hibah masuk senilai Rp232.877.000,00 yang terdapat pada:
1. BPS Kab. Lampung Barat di wilayah Lampung berupa satu unit Gedung Pos Jaga Permanen dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp48.352.000,00.
 2. BPS Kab. Bima di wilayah Nusa Tenggara Barat berupa satu unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah dari perorangan senilai Rp44.313.000,00.
 3. BPS Kab. Dompu di wilayah Nusa Tenggara Barat berupa satu unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah dari perorangan senilai Rp56.232.000,00.
 4. BPS Kab. Gorontalo di wilayah Gorontalo berupa satu unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah dari perorangan senilai Rp83.980.000,00.
- e. Penambahan yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk senilai Rp5.304.672.450,00 yang terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1.653.128.000
2	DI Yogyakarta	BPS Kab. Sleman	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	399.539.000
3	Jawa Timur	BPS Kab. Tuban	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	899.204.000
4	Sumatera Utara	BPS Provinsi Sumatera Utara	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	454.317.000
5	Jambi	BPS Kab. Muaro Jambi	Bangunan Lainnya	30.115.450
6	Kalimantan Selatan	BPS Kab. Tanah Laut	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	169.470.000
7	Sulawesi Selatan	BPS Kab. Maros	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	74.103.000
8	Nusa Tenggara Timur	BPS Kab. Sumba Barat	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	99.179.000
9	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	622.149.000
		BPS Kab. Rejang Lebong	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	22.100.000
		BPS Provinsi Bengkulu	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	881.368.000
Jumlah				5.304.672.450

- f. Penambahan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah senilai

Rp2.491.998.832,00 terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.312.579.314
2	Sumatera Selatan	BPS Kota Pagar Alam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.140.000
3	Maluku	BPS Provinsi Maluku	Bangunan Gedung Kantor Permanen	126.528.026
4	Papua Barat	BPS Kab. Sorong	Bangunan Gedung Kantor Permanen	16.250.000
5	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.501.492
Jumlah				2.491.998.832

- g. Penambahan yang berasal dari transaksi pengembangan nilai aset (langsung) senilai Rp973.716.818,00 dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Polstat STIS	Polstat STIS	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	129.685.574
			Taman Permanen	52.500.000
2	Jawa Tengah	BPS Kab. Grobogan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	69.500.000
		BPS Kab. Purbalingga	Bangunan Gedung Kantor Permanen	44.776.400
3	Sumatera Barat	BPS Provinsi Sumatera Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	100.826.000
4	Sumatera Selatan	BPS Kab. Ogan Komering Ulu	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.750.000
		BPS Kota Pagar Alam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.600.000
5	Nusa Tenggara Timur	BPS Kab. Nagekeo	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	162.370.000
6	Papua	BPS Kab. Supiori	Bangunan Gedung Kantor Permanen	34.957.230
7	Banten	BPS Kota Cilegon	Bangunan Gedung Kantor Permanen	279.751.614
Jumlah				973.716.818

- h. Penambahan yang berasal dari penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp487.198.000,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan pemanfaatan BMN yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi digunakan secara aktif untuk tugas dan fungsi lembaga. BMN yang berupa Rumah Negara yang semula dinonaktifkan kemudian akan dimanfaatkan kembali sebagai rumah dinas pejabat di BPS. Transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif tersebut terdapat pada:

1. BPS Kab. Rejang Lebong di wilayah Bengkulu atas satu unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen senilai Rp22.100.000,00.
2. BPS Prop. Sumatera Utara di wilayah Sumatera Utara atas satu unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen senilai Rp454.317.000,00
3. BPS Kab. Tanjung Jabung Barat di wilayah Jambi atas satu unit Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan senilai Rp10.781.000,00

- i. Penambahan yang berasal dari pengembangan melalui KDP senilai Rp3.015.671.041,00 terdapat pada BPS Kota Surabaya di wilayah Jawa Timur atas Bangunan Gedung Kantor Permanen.

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Bangunan Gedung Kantor Permanen	479.009.345
2	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	632.329.592
3	Sulawesi Tengah	BPS Kab. Morowali	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.300.000
4	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	397.923.000
5	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	161.300.000
		BPS Provinsi Kalimantan Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	956.643.944
			Pagar Permanen	353.165.160
Jumlah				3.015.671.041

- j. Penambahan yang berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP senilai Rp29.114.311.525,00 dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Jawa Barat	BPS Kota Banjar	Pagar Permanen	214.105.800
2	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.301.550.648
3	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.212.414.447
		BPS Kota Pematang Siantar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.792.994.728
			Pagar Permanen	198.136.330
4	Jambi	BPS Kab. Kerinci	Bangunan Lainnya	111.501.605
		BPS Kab. Muaro Jambi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30.115.450
5	Sulawesi Utara	BPS Kab. Minahasa Utara	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	239.940.914
		BPS Kab. Siau Tagulandang Biaro	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	237.539.000
6	Kalimantan Utara	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19.776.012.603
Jumlah				29.114.311.525

- k. Penambahan yang berasal dari koreksi susulan senilai Rp398.956.202,00 terdapat pada:
1. BPS Kota Makassar di wilayah Sulawesi Selatan atas aset berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp191.382.000,00.
 2. BPS Kab. Wajo di wilayah Sulawesi Selatan atas aset berupa Pagar Permanen senilai Rp130.870.000,00,00.
 3. BPS Kab. Flores Timur di wilayah Sulawesi Selatan melakukan transaksi koreksi susulan untuk mengurangi nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp4.416.000,00.
 4. Polstat STIS atas aset berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp28.388.250,00.

5. Settama melakukan koreksi susulan untuk mengurangi nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp20.000.000,00 dan menambah nilai Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp72.732.452,00
- l. Penambahan yang berasal dari transaksi pembatalan penghapusan senilai Rp215.607.000,00 terdapat pada BPS Kab. Muaro Jambi di wilayah Jambi atas satu unit Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen.
- m. Penambahan yang berasal dari transaksi perolehan lainnya senilai Rp307.364.089,00 terdapat pada

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Pagar Permanen	46.452.247
2	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	Pagar Permanen	95.147.742
3	Sulawesi Selatan	BPS Kab. Bone	Pagar Permanen	110.565.000
4	Kepulauan Bangka Belitung	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bangunan Lainnya	55.199.100
Jumlah				307.364.089

- n. Pengurangan yang berasal dari transaksi hibah keluar senilai Rp3.886.653.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. BPS Kab. Ciamis di wilayah Jawa Barat melakukan hibah keluar aset Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai Rp1.208.358.000,00 kepada Pemda Kab. Ciamis.
 2. BPS Kota Banjar di wilayah Jawa Barat melakukan hibah keluar aset Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai Rp1.120.560.000,00 kepada Pemerintah Kota Banjar.
 3. BPS Kab. Seruyan di wilayah Kalimantan Tengah melakukan hibah keluar aset Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai Rp735.708.000,00 kepada Pemda Kab. Seruyan.
 4. BPS Kota Serang di wilayah Banten melakukan hibah keluar aset Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai Rp822.027.000,00 kepada Pemerintah Kota Serang.
- o. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi transfer keluar sebesar Rp566.470.000,00 terdapat pada Settama BPS atas aset berupa Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp47.560.000,00 dan Pagar Permanen sebesar Rp518.910.000,00 kepada Politeknik Statistika STIS.
- p. Pengurangan yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar senilai Rp5.304.672.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1.653.128.000
2	DI Yogyakarta	BPS Kab. Sleman	Bangunan Gedung Kantor Permanen	399.539.000
3	Jawa Timur	BPS Kab. Tuban	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	899.204.000

4	Sumatera Utara	BPS Provinsi Sumatera Utara	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	454.317.000
5	Jambi	BPS Kab. Muaro Jambi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30.115.450
6	Kalimantan Selatan	BPS Kab. Tanah Laut	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	169.470.000
7	Sulawesi Selatan	BPS Kab. Maros	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	74.103.000
8	Nusa Tenggara Timur	BPS Kab. Sumba Barat	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	99.179.000
9	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Selatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	622.149.000
		BPS Kab. Rejang Lebong	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	22.100.000
		BPS Provinsi Bengkulu	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	881.368.000
Jumlah				5.304.672.450

- q. Pengurangan yang berupa transaksi koreksi manual sebesar Rp11.028.666,00 terdapat pada BPS Kota Surabaya di wilayah Jawa Timur atas aset Bangunan Gedung Kantor Permanen.
- r. Pengurangan yang berupa transaksi koreksi pencatatan sebesar Rp3.026.214.582,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Jawa Timur	BPS Kab. Trenggalek	Bangunan Lainnya	49.800.000
		BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.301.550.648
2	Jambi	BPS Kab. Tanjung Jabung Barat	Bangunan Lainnya	21.567.650
3	Sumatera Selatan	BPS Kota Pagar Alam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.140.000
4	Sulawesi Selatan	BPS Kab. Wajo	Pagar Permanen	130.870.000
		BPS Kota Makassar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	191.382.000
5	Maluku	BPS Provinsi Maluku	Bangunan Gedung Kantor Permanen	134.604.284
6	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	161.300.000
Jumlah				3.026.214.582

- s. Pengurangan yang berupa transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp2.582.726.026,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Jawa Barat	BPS Kab. Ciamis	Bangunan Gedung Kantor Permanen	26.225.219
		BPS Kota Banjar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12.617.595
2	Jawa Tengah	BPS Kab. Brebes	Bangunan Gedung Kantor Permanen	25.857.000
		BPS Kab. Wonosobo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.780.480
		BPS Kota Tegal	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12.474.000

3	DI Yogyakarta	BPS Kab. Gunung Kidul	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20.146.813
4	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.028.666
5	Aceh	BPS Kab. Aceh Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19.946.636
		BPS Kota Lhokseumawe	Bangunan Gedung Kantor Permanen	139.695.501
6	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	109.007.634
		BPS Kota Pematang Siantar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39.889.654
7	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Seruyan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	33.450.215
8	Kalimantan Timur	BPS Kab. Kutai Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.154.607
		BPS Kab. Penajam Paser Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59.849.619
9	Sulawesi Utara	BPS Kab. Minahasa Utara	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	20.841.577
		BPS Kab. Siau Tagulandang Biaro	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	13.397.200
10	Nusa Tenggara Barat	BPS Kab. Lombok Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	172.300.400
11	Banten	BPS Kota Cilegon	Bangunan Gedung Kantor Permanen	63.464.329
12	Papua Barat	BPS Kab. Sorong	Bangunan Gedung Kantor Permanen	16.250.000
13	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20.157.517
		BPS Provinsi Kalimantan Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.727.191.364
Jumlah				2.582.726.026

t. Pengurangan yang berupa transaksi penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp550.791.000,00 terdapat pada:

1. BPS Kab. Maluku Tenggara Barat di wilayah Maluku berupa satu unit aset Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen senilai Rp141.433.000,00.
2. BPS Kab. Kepulauan Sangihe di wilayah Sulawesi Utara berupa satu unit aset Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp409.358.000,00.

Selain nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, terdapat Gedung dan Bangunan yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp2.253.420.273,00. Rincian Gedung dan Bangunan yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya **C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya**
Rp29.118.309.243,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.118.309.243,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp35.254.629.078,00.

Adapun aset pada BPS yang masuk pada kelompok Aset Tetap Lainnya adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 78
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	837.000.000	837.000.000	0
2	Aset Tetap Lainnya:			
	a. Bahan perpustakaan	28.006.127.533	34.126.009.368	(6.119.881.835)
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	275.181.710	291.619.710	(16.438.000)
Jumlah		29.118.309.243	35.254.629.078	(6.136.319.835)

Aset Tetap Dalam Renovasi menurut Buletin Teknis Nomor 15 mengenai Akuntansi Aset Tetap Akruar merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki oleh BPS berupa Aset Tetap Tanah pada BPS Kab. Sarmi sebesar Rp837.000.000,00. Aset Tanah tersebut masih dalam kepemilikan Pemda Sarmi dan belum diserahkan kepada BPS Kab. Sarmi.

Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah Rp28.863.052.533,00. Nilai Buku Aset Tetap Lainnya diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp255.256.710,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	29.118.309.243
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	35.254.629.078
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	6.136.319.835)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	32.336.400
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	84.154.730
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	63.092.496
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	179.583.626
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar	(Rp	1.898.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	6.314.005.461)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	6.315.903.461)
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	6.136.319.835)

Penjelasan mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

- Penambahan yang berasal dari transaksi pembelian sebesar Rp32.336.400 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Polstat STIS	Polstat STIS	Referensi	30.438.400
2	Sulawesi Utara	BPS Kab. Kepulauan Talaud	Naskah/Manuskrip Berbahan Daun	949.000
		BPS Kab. Minahasa Utara	Lukisan Kanvas	949.000
Jumlah				32.336.400

- b. Mutasi tambah berupa reklasifikasi masuk dari persediaan sebesar Rp84.154.730,00 yaitu perubahan jenis aset dari persediaan yang menjadi aset tetap lainnya. Rincian wilayah dan aset tetap lainnya yang awalnya berupa persediaan diuraikan sebagai berikut.

No.	Wilayah	Buku	Buku Lainnya	Laporan	Referensi	Serial Lainnya	Nilai (Rp)
1	DKI Jakarta	0	46.000	0	553.500	1.660.500	2.260.000
2	Jawa Barat	0	0	0	0	720.000	720.000
3	Jawa Timur	0	0	0	0	8.034.034	8.034.034
4	Aceh	0	0	0	0	1.851.500	1.851.500
5	Sumatera Barat	0	0	4.301.650	0	11.060.000	15.361.650
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	1.810.000	1.810.000
7	Lampung	0	0	0	0	1.354.200	1.354.200
8	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	8.119.250	8.119.250
9	Kalimantan Timur	0	0	0	0	1.884.347	1.884.347
10	Sulawesi Utara	0	0	0	0	2.265.000	2.265.000
11	Maluku	0	0	0	0	1.805.000	1.805.000
12	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	4.056.750	4.056.750
13	Papua	25.558.000	0	0	0	0	25.558.000
14	Maluku Utara	0	0	0	0	7.891.999	7.891.999
15	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1.183.000	1.183.000
Jumlah		25.558.000	46.000	4.301.650	553.500	53.695.580	84.154.730

- c. Mutasi tambah berupa penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp63.092.496,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif yaitu dengan memanfaatkan BMN yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi digunakan secara aktif untuk tugas dan fungsi Lembaga. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Aset ATL			Nilai (Rp)
		Buku Lainnya	Laporan	Serial Lainnya	
1	Jawa Timur	0	0	220.000	220.000
2	Kalimantan Barat	58.373.303	0	1.599.600	59.972.903
3	Maluku Utara	0	210.000	2.304.558	2.514.558
4	Gorontalo	0	0	385.035	385.035
Jumlah		58.373.303	210.000	4.509.193	63.092.496

- d. Mutasi tambah berupa reklasifikasi keluar sebesar Rp1.898.000,00 yang dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Aset ATL		Nilai (Rp)
			Lukisan Kanvas	Naskah/Manuskrip Berbahan Daun	
1	Sulawesi Utara	BPS Kab. Kepulauan Talaud	0	949.000	949.000
		BPS Kab. Minahasa Utara	949.000	0	949.000

Jumlah	949.000	949.000	1.898.000
--------	---------	---------	-----------

- e. Mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp6.314.005.461,00. Rincian wilayah yang terdapat transaksi ini diuraikan sebagai berikut:

No.	Wilayah	Aset ATL							Nilai (Rp)
		Bahan Perpustakaan Lainnya	Buku Lainnya	CD/VCD/DVD/LD	Laporan	Monografi	Referensi	Serial Lainnya	
1	Settama	0	0	0	44.301.000	897.840	0	2.902.400	48.101.240
2	DKI Jakarta	0	0	0	952.004	0	2.860.374	89.412.556	93.224.934
3	Jawa Barat	0	2.316.000	160.000	0	0	0	45.724.874	48.200.874
4	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	371.885.566	371.885.566
5	Jawa Timur	840.000	17.971.441	0	47.093.108	4.807.265	3.939.000	1.501.561.619	1.576.212.433
6	Aceh	0	1.091.750	0	48.151.370	0	0	456.328.384	505.571.504
7	Sumatera Utara	345.000	51.740.635	40.000	20.340.190	37.049.814	0	167.440.881	276.956.520
8	Sumatera Barat	0	3.274.000	0	11.436.000	0	0	301.719.470	316.429.470
9	Riau	0	92.242.526	0	0	0	0	0	92.242.526
10	Jambi	0	490.987.127	19.800	880.685	0	0	4.304.645	496.192.257
11	Sumatera Selatan	0	717.459	0	643.873	10.205.969	0	158.324.048	169.891.349
12	Lampung	0	1.003.799	0	0	0	0	388.463.451	389.467.250
13	Kalimantan Barat	0	58.373.303	0	0	0	0	91.090.223	149.463.526
14	Kalimantan Tengah	54.944.032	11.822.030	0	10.402.058	0	41.654	205.011.229	282.221.003
15	Kalimantan Timur	0	0	0	12.459.352	96.200	550.400	289.893.001	302.998.953
16	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	22.249.677	22.249.677
17	Sulawesi Selatan	0	8.088.307	0	119.100	0	0	250.543.106	258.750.513
18	Maluku	0	0	0	0	0	0	26.240.379	26.240.379
19	Bali	0	0	0	0	0	0	5.030.500	5.030.500
20	Nusa Tenggara Barat	0	191.400	0	422.858	0	0	30.412.070	31.026.328
21	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	112.857.602	112.857.602
22	Papua	38.000	863.200	0	3.726.502	0	0	30.117.037	34.744.739
23	Bengkulu	1.002.000	16.039.010	0	0	0	0	416.613.232	433.654.242
24	Banten	0	96.098.904	0	0	2.225.561	0	57.839.980	156.164.445
25	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	31.410.106	0	0	10.493.794	41.903.900
26	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	19.118.000	19.118.000
27	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	39.798.881	39.798.881
28	Sulawesi Barat	0	0	0	7.342.580	0	0	3.041.270	10.383.850
29	Kalimantan Utara	0	0	0	3.023.000	0	0	-	3.023.000
Jumlah		57.169.032	852.820.891	219.800	242.703.786	55.282.649	7.391.428	5.098.417.875	6.314.005.461

Selain nilai Aset Tetap Lainnya tersebut di atas, terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp16.543.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya yang

masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp7.722.305.444,00

C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 adalah Rp7.722.305.444,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp27.044.596.490,00. Nilai KDP per 31 Desember 2025 per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 79
Rincian KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	228.396.800	228.396.800	0
2	Jawa Barat	1.975.335.947	1.984.314.883	(8.978.936)
3	Jawa Timur	0	2.664.527.158	(2.664.527.158)
4	Sumatera Utara	0	4.461.230.748	(4.461.230.748)
5	Jambi	119.307.300	0	119.307.300
6	Lampung	2.792.329.611	1.139.298.250	1.653.031.361
7	Sulawesi Utara	0	31.500.000	(31.500.000)
8	Nusa Tenggara Timur	323.904.069	323.904.069	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.283.031.717	2.283.031.717	0
10	Kalimantan Utara	0	13.928.392.865	(13.928.392.865)
Jumlah		7.722.305.444	27.044.596.490	(19.322.291.046)

Kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 80
Kondisi KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Dilanjutkan (Rp)	Dihentikan sementara (Rp)	Dihentikan Permanen (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	228.396.800	0	0	228.396.800
2	Jawa Barat	1.975.335.947	0	0	1.975.335.947
3	Jambi	119.307.300	0	0	119.307.300
4	Lampung	2.792.329.611	0	0	2.792.329.611
5	Nusa Tenggara Timur	323.904.069	0	0	323.904.069
6	Kepulauan Bangka Belitung	2.283.031.717	0	0	2.283.031.717
Jumlah		7.722.305.444	0	0	7.722.305.444

Mutasi perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)
Mutasi Tambah/(Kurang)
Rincian Mutasi

Rp 7.722.305.444
Rp 27.044.596.490
(Rp 19.322.291.046)

Mutasi Tambah

Pengembangan KDP	Rp	13.347.055.068
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp	390.228.839
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	1.554.618.739
Perolehan Lainnya KDP	Rp	297.141.974

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 15.589.044.620

Mutasi Kurang

Koreksi Nilai KDP Berkurang	(Rp	245.326.625)
Koreksi Pencatatan KDP	(Rp	613.600.435)
Pengembangan Melalui KDP	(Rp	3.626.101.081)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(Rp	30.394.807.525)
Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(Rp	31.500.000)

Jumlah Mutasi Kurang

(Rp 34.911.335.666)

Jumlah Rincian Mutasi

(Rp 19.322.291.046)

Penjelasan transaksi mutasi pada KDP diuraikan sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah berupa pengembangan KDP senilai Rp13.347.055.068,00. Pengembangan KDP adalah penambahan nilai KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset KDP	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	GB Dalam Pengerjaan	448.250.811
2	Pusdiklat BPS	Pusdiklat BPS	PM Dalam Pengerjaan	626.373.000
3	Jawa Barat	BPS Kota Banjar	GB Dalam Pengerjaan	166.830.850
4	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	GB Dalam Pengerjaan	269.353.082
5	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	GB Dalam Pengerjaan	1.025.671.492
		BPS Kab. Tapanuli Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	322.835.001
		BPS Kota Pematang Siantar	GB Dalam Pengerjaan	929.845.273
6	Jambi	BPS Kab. Kerinci	GB Dalam Pengerjaan	5.775.081
7	Lampung	BPS Kab. Lampung Tengah	GB Dalam Pengerjaan	1.653.031.362
8	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Seruyan	PM Dalam Pengerjaan	118.270.500
9	Sulawesi Utara	BPS Kab. Minahasa Utara	GB Dalam Pengerjaan	215.941.914
		BPS Kab. Siau Tagulandang Biaro	GB Dalam Pengerjaan	210.267.000
10	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Tengah	GB Dalam Pengerjaan	284.691.900
11	Kalimantan Utara	BPS Provinsi Kalimantan Utara	GB Dalam Pengerjaan	7.069.917.802
Jumlah				13.347.055.068

- b. Mutasi tambah berupa koreksi nilai KDP bertambah senilai Rp390.228.839,00. Koreksi nilai KDP bertambah adalah pencatatan koreksi KDP berupa perubahan nilai suatu transaksi KDP, yaitu seharusnya menjadi lebih besar daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Transaksi koreksi nilai KDP bertambah tersebut dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Aset KDP	Nilai (Rp)
1	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	GB Dalam Pengerjaan	2.916.000
		BPS Kab. Tapanuli Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	287.375.039
2	Jambi	BPS Kab. Merangin	Tanah Dalam Pengerjaan	99.937.800
Jumlah				390.228.839

- c Mutasi tambah berupa perolehan/penambahan KDP senilai Rp1.554.618.739,00.
- . Perolehan/penambahan KDP adalah KDP aset tetap yang perolehan dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai atau perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka perolehan aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset KDP	Nilai (Rp)
1	Pusdiklat BPS	Pusdiklat BPS	PM Dalam Pengerjaan	417.582.000
2	Settama	Settama	GB Dalam Pengerjaan	43.778.534
3	Jawa Barat	BPS Kota Banjar	GB Dalam Pengerjaan	47.274.950
4	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	GB Dalam Pengerjaan	2.916.000
		BPS Kab. Tapanuli Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	287.605.039
		BPS Kota Pematang Siantar	GB Dalam Pengerjaan	6.979.680
5	Jambi	BPS Kab. Merangin	Tanah Dalam Pengerjaan	342.898.896
6	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Seruyan	PM Dalam Pengerjaan	118.270.500
7	Sulawesi Utara	BPS Kab. Minahasa Utara	GB Dalam Pengerjaan	23.999.000
		BPS Kab. Siau Tagulandang Biaro	GB Dalam Pengerjaan	27.272.000
8	Sulawesi Tengah	BPS Kab. Morowali	GB Dalam Pengerjaan	35.300.000
9	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Tengah	GB Dalam Pengerjaan	113.231.100
10	Kalimantan Utara	BPS Provinsi Kalimantan Utara	GB Dalam Pengerjaan	87.511.040
Jumlah				1.554.618.739

- d Mutasi tambah berupa Perolehan Lainnya KDP senilai Rp297.141.974,00, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset KDP	Nilai (Rp)
1	Jambi	BPS Kab. Kerinci	GB Dalam Pengerjaan	105.726.524
		BPS Kab. Muaro Jambi	GB Dalam Pengerjaan	30.115.450
2	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	GB Dalam Pengerjaan	161.300.000
Jumlah				297.141.974

- e Mutasi kurang berupa koreksi nilai KDP berkurang senilai Rp245.326.625,00. Koreksi nilai KDP berkurang adalah pencatatan koreksi KDP berupa perubahan nilai suatu transaksi KDP, yaitu seharusnya menjadi lebih kecil daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Transaksi koreksi nilai KDP berkurang tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset KDP	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	GB Dalam Pengerjaan	13.020.000
2	Jawa Barat	BPS Kab. Majalengka	GB Dalam Pengerjaan	8.978.936
3	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	GB Dalam Pengerjaan	177.096.868
		BPS Kab. Tapanuli Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	230.000
		BPS Kota Pematang Siantar	GB Dalam Pengerjaan	46.000.820
4	Lampung	BPS Kab. Lampung Tengah	GB Dalam Pengerjaan	1
Jumlah				245.326.625

- f. Mutasi kurang berupa koreksi pencatatan KDP senilai Rp613.600.435,00. Koreksi pencatatan KDP adalah proses penyesuaian atau pembetulan atas kesalahan pencatatan nilai, volume, atau status aset KDP dalam laporan keuangan. Koreksi ini dilakukan agar

nilai dan status aset yang tercatat mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi koreksi pencatatan KDP dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Aset KDP	Nilai (Rp)
1	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	GB Dalam Pengerjaan	2.916.000
		BPS Kab. Tapanuli Selatan	Tanah Dalam Pengerjaan	287.155.039
2	Jambi	BPS Kab. Merangin	Tanah Dalam Pengerjaan	323.529.396
Jumlah				613.600.435

- g Mutasi kurang berupa pengembangan melalui KDP senilai Rp3.626.101.081,00, dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Aset Definitif	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Bangunan Gedung Kantor Permanen	479.009.345
2	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	632.329.592
3	Sumatera Utara	BPS Kab. Tapanuli Selatan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	610.430.040
4	Sulawesi Tengah	BPS Kab. Morowali	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35.300.000
5	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	397.923.000
6	Kalimantan Utara	BPS Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	161.300.000
		BPS Provinsi Kalimantan Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	956.643.944
			Pagar Permanen	353.165.160
Jumlah				3.626.101.081

- h Mutasi kurang berupa penyelesaian pembangunan dengan KDP senilai Rp30.394.807.525,00, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker	Aset Definitif	Nilai (Rp)
1	Pusdiklat BPS	Pusdiklat BPS	Elevator /Lift	1.043.955.000
2	Jawa Barat	BPS Kota Banjar	Pagar Permanen	214.105.800
3	Jawa Timur	BPS Kota Surabaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.301.550.648
4	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.212.414.447
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.792.994.728
			Pagar Permanen	198.136.330
5	Jambi	BPS Kab. Kerinci	Bangunan Lainnya	111.501.605
		BPS Kab. Muaro Jambi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30.115.450
6	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Seruyan	Portable Generating Set	236.541.000
7	Sulawesi Utara	BPS Kab. Minahasa Utara	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	239.940.914
		BPS Kab. Siau Tagulandang Biaro	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	237.539.000
8	Kalimantan Utara	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19.776.012.603
Jumlah				30.394.807.525

- i. Mutasi kurang berupa Penghapusan/Penghentian Permanen KDP senilai Rp31.500.000,00, terdapat pada BPS Kab. Siau Tagulandang Biaro di wilayah Sulawesi Utara atas Gedung Bangunan dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan **C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan**

Rp2.398.278.955.017,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp2.398.278.955.017,00, sedangkan untuk saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp2.323.036.678.972,00. Secara ringkas perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 81
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Akumulasi Penyusutan	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.896.736.095.259	1.881.304.460.677	15.431.634.582
Gedung dan Bangunan	501.287.603.048	441.484.731.585	59.802.871.463
Aset Tetap Lainnya	255.256.710	247.486.710	7.770.000
Jumlah	2.398.278.955.017	2.323.036.678.972	75.242.276.045

Rincian Nilai Buku Aset Tetap yang berasal dari nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 82
Rincian Nilai Buku Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	2.309.714.137.898	1.896.736.095.259	412.978.042.639
2	Gedung dan Bangunan	2.118.665.938.246	501.287.603.048	1.617.378.335.198
3	Aset Tetap Lainnya	29.092.751.243	255.256.710	28.837.494.533
	Jumlah	4.457.472.827.387	2.398.278.955.017	2.059.193.872.370

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	2.398.278.955.017
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	2.323.036.678.972
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	75.242.276.045
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	140.406.440
Pembelian	Rp	182.857
Transfer Masuk	Rp	4.881.350.743

Hibah Masuk	Rp	1.488.970
Reklasifikasi Masuk	Rp	2.560.967.534
Pengembangan Melalui KDP	Rp	534.848
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	32.984.284
Koreksi Susulan	Rp	454.734.970
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	7.149.710.881
Penyusutan Aset Tetap	Rp	218.348.644.786
Pembatalan Penghapusan	Rp	730.712.197
Batal Transfer keluar	Rp	68.944.306
Perolehan Lainnya	Rp	10.131.708
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	234.380.794.524
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp	4.825.536.147)
Hibah Keluar	(Rp	839.091.607)
Reklasifikasi Keluar	(Rp	2.505.882.761)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp	52.500.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	58.322.807)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	150.828.240.974)
Koreksi Pencatatan	(Rp	28.944.183)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	159.138.518.479)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	75.242.276.045

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 83
Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN
Per 31 Desember 2025

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.896.736.095.259	1.896.736.095.259	0
Gedung dan Bangunan	501.287.603.048	501.287.603.048	0
Aset Tetap Lainnya	255.256.710	255.256.710	0
Jumlah	2.398.278.955.017	2.398.278.955.017	0

Tidak terdapat perbedaan nilai Akumulasi Penyusutan antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

Piutang Jangka Panjang

Rp0,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp0,00

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp3.200.000,00. Piutang Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo ini merupakan Piutang Tagihan TP/TGR yang belum dilimpahkan ke KPKNL dan pelunasannya di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah tanggal pelaporan.

Sebagaimana pada akun Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR maka penerapan penyisihan piutang tidak tertagih juga terjadi pada akun Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan Piutang Tagihan TP/TGR merupakan akun Piutang yang bersifat jangka panjang.

Penetapan kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPS dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Tidak terdapat saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00

**C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.999,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025.

Aset Lainnya
Rp142.781.557.356,00

C.1.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp142.781.557.356,00 dan Rp78.697.257.216,00. Rincian nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 84
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aset Tak berwujud	329.587.983.397	424.359.166.700	(94.771.183.303)	(22,33)
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	41.492.247.558	47.577.860.572	(6.085.613.014)	(12,79)
3	Aset Lain-lain	152.206.910.434	119.625.931.594	32.580.978.840	27,24

Jumlah		523.287.141.389	591.562.958.866	(68.275.817.477)	(11,54)
1	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(380.505.584.033)	(512.865.701.650)	132.360.117.617	(25,81)
Nilai Buku Aset Lainnya		142.781.557.356	78.697.257.216	64.084.300.140	81,43

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain akan dijelaskan dalam penjelasan per akun.

Aset Tak Berwujud
Rp329.587.983.397,00

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah Rp329.587.983.397,00 sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp424.359.166.700,00. Rincian perubahan saldo Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut.

Tabel 85
Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Software	301.890.515.908	327.142.416.657	(25.251.900.749)
Lisensi	27.697.467.489	97.216.750.043	(69.519.282.554)
Jumlah	329.587.983.397	424.359.166.700	(94.771.183.303)

Nilai buku Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah Rp92.210.682.159 00. Nilai Buku Aset Tak Berwujud diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi amortisasinya yang sebesar Rp237.377.301.238,00.

Mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	329.587.983.397
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	424.359.166.700
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	94.771.183.303)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	91.832.323.891
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	31
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	55.030.000
Perolehan Lainnya	Rp	16.395.255.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	108.282.608.922
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar	(Rp	6.490.000)
Koreksi Pencatatan	(Rp	2.830.470.955)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	16.375.830.031)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(Rp	183.841.001.239)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	203.053.792.225)
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	94.771.183.303)

Sedangkan penjelasan mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut.

a. Mutasi tambah pada transaksi Aset Tak Berwujud yang sebesar Rp108.282.608.922,00 dirinci sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tak Berwujud dari pembelian sebesar Rp91.832.323.891,00 dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Jenis ATB	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Software Komputer	91.825.838.391
2	DI Yogyakarta	BPS Provinsi DI Yogyakarta	Software Komputer	1.990.000
3	Kalimantan Barat	BPS Kab. Melawi	Software Komputer	4.495.500
Jumlah				91.832.323.891

2. Penambahan Aset Tak Berwujud dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp31,00 terdapat pada Settama BPS atas aset *Software Komputer*.

3. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif yaitu dengan memanfaatkan BMN yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi digunakan secara aktif untuk tugas dan fungsi lembaga yang berupa software komputer dan lisensi sebesar Rp55.030.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker	Jenis ATB	Nilai (Rp)
1	Jawa Timur	BPS Kab. Madiun	Software Komputer	12.850.000
2	Maluku Utara	BPS Kab. Halmahera Timur	Software Komputer	19.275.000
3	Banten	BPS Kab. Serang	Software Komputer	6.425.000
		BPS Kota Cilegon	Software Komputer	16.480.000
Jumlah				55.030.000

4. Penambahan ATB dari transaksi Perolehan lainnya sebesar Rp16.395.255.000,00 terdapat pada satker Settama BPS atas ATB berupa *software komputer*.

b. Mutasi kurang pada transaksi Aset Tak Berwujud yang sebesar Rp203.053.792.225,00 dirinci sebagai berikut:

1. Pengurangan berasal dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp6.490.000,00 terdapat pada BPS Kab. Toraja Utara atas aset tak berwujud berupa *software komputer*

2. Pengurangan berasal dari Koreksi pencatatan sebesar Rp2.830.470.955,00 dirinci sebagai berikut :

- BPS Kab. Melawi senilai Rp4.495.500,00 atas aset berupa *software komputer*
- Settama BPS senilai Rp2.825.975.455,00 atas aset *software komputer*

3. Pengurangan berasal dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp16.375.830.031,00 terdapat pada Settama BPS atas aset tak berwujud berupa *software computer*.

4. Pengurangan berasal dari Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp183.841.001.239,00 dirinci sebagai berikut :

No.	Wilayah	Satker	Jenis ATB	Nilai (Rp)
1	Settama	Settama	Lisensi	69.519.282.554
			Software Komputer	113.365.547.685
2	Jawa Barat	BPS Kota Depok	Software Komputer	12.850.000
		BPS Provinsi Jawa Barat	Software Komputer	258.500.000
3	Jawa Timur	BPS Kab Madiun	Software Komputer	12.850.000
		BPS Kab Ngawi	Software Komputer	12.850.000
4	Kalimantan Tengah	BPS Kab Murung Raya	Software Komputer	6.425.000
		BPS Kota Palangkaraya	Software Komputer	12.850.000
		BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Software Komputer	258.500.000
5	Bali	BPS Provinsi Bali	Software Komputer	258.500.000
6	Nusa Tenggara Barat	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Software Komputer	63.125.000
7	Nusa Tenggara Timur	BPS Kab Kupang	Software Komputer	4.691.000
8	Papua	BPS Kab Puncak	Software Komputer	25.700.000
9	Banten	BPS Kota Cilegon	Software Komputer	16.480.000
10	Kepulauan Riau	BPS Kab Karimun	Software Komputer	12.850.000
Jumlah				183.841.001.239

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Rp41.492.247.558,00

C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp41.492.247.558,00 dan Rp47.577.860.572,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana atas hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan pemerintah.

Rincian perubahan saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 86
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	37.843.287.301	29.047.093.860	8.796.193.441
2	Polstat STIS	262.953.133	270.270.683	(7.317.550)
3	Pusdiklat BPS	211.494.832	232.716.700	(21.221.868)
4	DKI Jakarta	49.503.000	209.850.292	(160.347.292)
5	Jawa Barat	74.262.593	1.873.735.662	(1.799.473.069)
6	Jawa Tengah	104.719.744	772.427.799	(667.708.055)
7	DI Yogyakarta	39.784.895	58.651.247	(18.866.352)
8	Jawa Timur	49.993.046	1.068.588.650	(1.018.595.604)

No.	Wilayah/Satker	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Aceh	0	479.500.000	(479.500.000)
10	Sumatera Utara	188.809.477	604.702.944	(415.893.467)
11	Riau	45.977.327	138.589.370	(92.612.043)
12	Jambi	291.309.602	29.244.252	262.065.350
13	Sumatera Selatan	114.064.276	481.915.940	(367.851.664)
14	Lampung	815.225.187	231.378.136	583.847.051
15	Kalimantan Barat	12.804.803	82.870.985	(70.066.182)
16	Kalimantan Tengah	0	52.043.587	(52.043.587)
17	Kalimantan Selatan	354.930.741	454.854.916	(99.924.175)
18	Kalimantan Timur	111.867.987	453.455.728	(341.587.741)
19	Sulawesi Utara	231.082.701	153.658.398	77.424.303
20	Sulawesi Selatan	21.488.721	209.696.680	(188.207.959)
21	Sulawesi Tenggara	0	21.971.945	(21.971.945)
22	Maluku	18.920.460	0	18.920.460
23	Bali	16.950.000	105.920.254	(88.970.254)
24	Nusa Tenggara Barat	0	36.633.037	(36.633.037)
25	Nusa Tenggara Timur	14.464.943	144.463.362	(129.998.419)
26	Papua	273.152.342	237.600.800	35.551.542
27	Maluku Utara	50.475.740	187.813.190	(137.337.450)
28	Banten	0	204.887.529	(204.887.529)
29	Kepulauan Bangka Belitung	56.652.700	260.714.415	(204.061.715)
30	Gorontalo	0	166.392.000	(166.392.000)
31	Kepulauan Riau	137.877.959	99.673.894	38.204.065
32	Papua Barat	57.450.596	120.361.905	(62.911.309)
33	Sulawesi Barat	19.678.000	20.603.176	(925.176)
34	Kalimantan Utara	23.065.452	9.065.579.236	(9.042.513.784)
Jumlah		41.492.247.558	47.577.860.572	(6.085.613.014)

Aset Lain-Lain

Rp152.206.910.434,00

C.1.4.3 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah Rp152.206.910.434,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2024 adalah Rp119.625.931.594,00. Pos Aset Lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Nilai Aset Lain-lain tersebut diperoleh dari Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset. Rincian perubahan saldo Aset Lain-Lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 87
Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	150.968.575.834	119.232.037.994	31.736.537.840
ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.238.334.600	393.893.600	844.441.000
Jumlah	152.206.910.434	119.625.931.594	32.580.978.840

Nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah Rp9.078.627.639,00. Nilai Buku Aset Lain-lain diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan sebesar

Rp152.206.910.434,00 dengan akumulasi penyusutannya yang sebesar Rp143.128.282.795,00. Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)	Rp	152.206.910.434
Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	119.625.931.594
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	32.580.978.840
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	1.059.433.486
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	342.152.809.085
Transfer Masuk (Henti Guna)	Rp	15.900.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	343.228.142.571
Mutasi Kurang		
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp	297.385.394.875)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp	7.706.102.099)
Penghapusan	(Rp	5.539.766.757)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(Rp	15.900.000)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	310.647.163.731)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	32.580.978.840

Penjelasan transaksi mutasi pada Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah berupa pencatatan pembatalan barang yang mau dihapuskan senilai Rp1.059.433.486,00. Pencatatan pembatalan barang yang mau dihapuskan merupakan pencatatan atas proses pembatalan transaksi usulan penghapusan BMN pada pengguna barang, terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Jawa Barat	52.350.000
2	Jawa Timur	67.250.830
3	Aceh	1.505.850
4	Sumatera Barat	162.387.100
5	Jambi	64.228.134
6	Sumatera Selatan	32.379.150
7	Lampung	412.763.899
8	Sulawesi Selatan	31.613.786
9	Maluku	180.021.415
10	Bengkulu	15.457.274
Jumlah		1.059.433.486

- b. Mutasi tambah berupa penghentian aset dari penggunaan senilai Rp342.152.809.085,00. Transaksi penghentian aset dari penggunaan senilai tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	230.024.558.789
2	Pusdiklat BPS	2.512.764.517
3	Polstat STIS	3.016.690.718

4	DKI Jakarta	670.421.617
5	Jawa Barat	10.696.984.690
6	Jawa Tengah	10.792.766.607
7	DI Yogyakarta	1.317.936.879
8	Jawa Timur	15.083.115.538
9	Aceh	6.176.759.602
10	Sumatera Utara	2.602.991.738
11	Sumatera Barat	5.508.321.490
12	Riau	1.716.965.073
13	Jambi	2.935.577.307
14	Sumatera Selatan	4.752.662.394
15	Lampung	7.107.977.975
16	Kalimantan Barat	714.686.418
17	Kalimantan Tengah	3.605.623.056
18	Kalimantan Selatan	726.343.579
19	Kalimantan Timur	1.856.041.147
20	Sulawesi Utara	1.165.272.156
21	Sulawesi Tengah	890.328.999
22	Sulawesi Selatan	3.012.199.286
23	Sulawesi Tenggara	255.652.399
24	Maluku	1.794.587.053
25	Bali	1.527.188.835
26	Nusa Tenggara Barat	2.373.181.304
27	Nusa Tenggara Timur	3.022.522.001
28	Papua	5.610.821.167
29	Bengkulu	1.665.825.965
30	Maluku Utara	1.759.820.098
31	Banten	1.689.458.801
32	Kepulauan Bangka Belitung	727.132.227
33	Gorontalo	858.737.873
34	Kepulauan Riau	753.851.605
35	Papua Barat	1.105.019.662
36	Sulawesi Barat	842.148.230
37	Kalimantan Utara	1.279.872.290
Jumlah		342.152.809.085

- c. Mutasi tambah berupa transfer masuk (henti guna) senilai Rp15.900.000,00. Transfer masuk (henti guna) merupakan pemindahan/penerimaan BMN yang sudah tidak digunakan/dihentikan pemanfaatannya oleh unit kerja lain. Transaksi transfer masuk (henti guna) tersebut terdapat pada BPS Kota Solok di wilayah Sumatera Barat atas tiga buah aset berupa A.C. Split yang dikirim oleh BPS Prop. Sumatera Barat.
- d. Mutasi kurang berupa pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp297.385.394.875,00. Pencatatan barang yang mau dihapuskan merupakan tindakan untuk mengusulkan penghapusan kepada pengguna barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN yang terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	190.029.005.850

2	Pusdiklat BPS	2.512.764.517
3	Polstat STIS	3.253.648.818
4	DKI Jakarta	1.074.052.975
5	Jawa Barat	8.772.779.350
6	Jawa Tengah	10.792.766.607
7	DI Yogyakarta	1.115.846.279
8	Jawa Timur	17.020.580.404
9	Aceh	6.465.178.034
10	Sumatera Utara	1.418.163.533
11	Sumatera Barat	3.701.687.942
12	Riau	156.103.964
13	Jambi	7.724.739.543
14	Sumatera Selatan	1.271.506.201
15	Lampung	5.310.860.969
16	Kalimantan Barat	1.096.386.940
17	Kalimantan Tengah	261.051.841
18	Kalimantan Selatan	460.149.573
19	Kalimantan Timur	1.900.084.622
20	Sulawesi Utara	341.512.534
21	Sulawesi Tengah	1.634.893.399
22	Sulawesi Selatan	4.999.778.569
23	Sulawesi Tenggara	451.675.049
24	Maluku	2.111.297.927
25	Bali	1.675.263.990
26	Nusa Tenggara Barat	2.372.616.304
27	Nusa Tenggara Timur	3.454.035.750
28	Papua	1.483.205.304
29	Bengkulu	3.205.197.822
30	Maluku Utara	2.843.519.741
31	Banten	1.453.568.341
32	Kepulauan Bangka Belitung	1.076.620.830
33	Gorontalo	750.659.613
34	Kepulauan Riau	1.865.435.915
35	Papua Barat	601.680.168
36	Sulawesi Barat	936.687.730
37	Kalimantan Utara	1.790.387.927
Jumlah		297.385.394.875

- e. Mutasi kurang berupa penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp7.706.102.099,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan pemanfaatan kembali BMN yang sudah tidak digunakan secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, yang terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1	Settama	578.607.928
2	Jawa Barat	403.815.117
3	DI Yogyakarta	188.287.800
4	Jawa Timur	641.954.214
5	Aceh	36.417.800
6	Sumatera Utara	539.152.000
7	Sumatera Barat	519.390.006

8	Jambi	68.205.524
9	Sumatera Selatan	3.146.471.742
10	Lampung	369.767.479
11	Kalimantan Barat	127.078.827
12	Kalimantan Tengah	6.244.530
13	Sulawesi Utara	410.244.887
14	Maluku	26.758.335
15	Nusa Tenggara Barat	565.000
16	Nusa Tenggara Timur	19.356.400
17	Papua	49.700.200
18	Bengkulu	45.176.524
19	Maluku Utara	403.003.359
20	Banten	22.905.000
21	Gorontalo	49.690.727
22	Kalimantan Utara	53.308.700
Jumlah		7.706.102.099

- f. Mutasi kurang berupa penghapusan senilai Rp5.539.766.757,00. Pencatatan penghapusan merupakan penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat Keputusan penghapusan dari unit kerja.

No.	Wilayah	Nilai (Rp)
1	Settama	5.278.254.736
2	Sumatera Utara	41.000.000
3	Jambi	43.236.354
4	Sumatera Selatan	25.088.350
5	Lampung	5.050.000
6	Maluku	141.879.317
7	Nusa Tenggara Timur	158.000
8	Bengkulu	3.800.000
9	Gorontalo	1.300.000
Jumlah		5.539.766.757

- g. Mutasi kurang berupa transfer keluar (BMN yang dihentikan) terdapat pada BPS Prop. Sumatera Barat di wilayah Sumatera Barat senilai Rp15.900.000,00 yaitu melakukan transfer keluar atas BMN yang telah dihentikan pemanfaatannya berupa A.C. Split kepada BPS Kota Solok di wilayah Sumatera Barat.

Selain nilai Aset Lain-lain tersebut di atas, terdapat Aset Lain-lain yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp735.774.332,00. Rincian Aset Lain-lain yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan /
Amortisasi Aset Lainnya
Rp380.505.584.033,00

C.1.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp380.505.584.033,00 dan Rp512.865.701.650,00. Rincian perubahan saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 88
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	209.722.794.860	304.851.648.142	(95.128.853.282)
Akumulasi Amortisasi Lisensi	27.654.506.378	96.914.387.480	(69.259.881.102)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	141.889.948.195	110.705.772.428	31.184.175.767
Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.238.334.600	393.893.600	844.441.000
Jumlah	380.505.584.033	512.865.701.650	(132.360.117.617)

Nilai Buku Aset Lainnya yang berasal dari nilai perolehan Aset Lainnya setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 89
Rincian Nilai Buku Aset Lainnya

No.	Nama Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	<i>Software</i>	301.890.515.908	209.722.794.860	92.167.721.048
2.	Lisensi	27.697.467.489	27.654.506.378	42.961.111
	Jumlah	329.587.983.397	237.377.301.238	92.210.682.159
B.	Aset Lain-Lain			
1.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	150.968.575.834	141.889.948.195	9.078.627.639
2.	ATB Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.238.334.600	1.238.334.600	0
	Jumlah	152.206.910.434	143.128.282.795	9.078.627.639
	Total	481.794.893.831	380.505.584.033	101.289.309.798

Amortisasi Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan ini menggunakan metode amortisasi garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/sisa. Hal ini untuk menyajikan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Dasar perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud adalah menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.06/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 (akhir)

Rp 380.505.584.033

Saldo per 31 Desember 2024 (awal)	Rp	512.865.701.650
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	132.360.117.617
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Penyusutan Aset Tetap	Rp	20.879.562.072
Transfer Masuk (Henti Guna)	Rp	15.900.000
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	1.057.637.267
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	150.828.240.974
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	172.781.340.313
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(Rp)	15.900.000
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	6.490.000
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp)	291.549.873.683
Koreksi Pencatatan	(Rp)	1.035.975.455
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp)	7.149.710.881
Penghapusan	(Rp)	5.383.507.911
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	305.141.457.930
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	132.360.117.617

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Rp141.094.629.993,00

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp141.094.629.993,00 dan Rp134.903.055.440,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun Kewajiban yang tersaji pada Laporan Keuangan BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 hanya terklasifikasi sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang pada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 90
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	140.727.772.209	134.188.923.301
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	2.258.193

No.	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pendapatan Diterima Dimuka	358.092.590	692.563.153
4	Uang Muka dari KPPN	0	6.230.000
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.765.194	13.080.793
Jumlah		141.094.629.993	134.903.055.440

Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp140.727.772.209,00

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp140.727.772.209,00 dan Rp134.188.923.301,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga ini mengungkapkan kewajiban pemerintah yang masih harus diakui karena telah diterimanya hak dari pihak ketiga yang terjadi pada saat tanggal neraca. Rincian saldo utang pihak ketiga tersaji pada tabel berikut:

Tabel 91
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	99.388.936.058	90.529.068.169	8.859.867.889
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.006.098.344	4.247.747.844	(241.649.500)
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	37.332.737.807	39.412.107.288	(2.079.369.481)
Jumlah		140.727.772.209	134.188.923.301	6.538.848.908

Saldo Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 pada Neraca berasal dari Belanja yang Masih Harus Dibayar dan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2025 berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban entitas yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima entitas, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hal tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa (belanja barang dan belanja modal). Daftar Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 92
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)		
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	10.344.352.527	766.563.737	34.296.516.263
2	Pusdiklat BPS	596.158.234	0	211.494.832
3	Polstat STIS	904.231.336	126.093.128	262.953.133
4	DKI Jakarta	1.574.102.814	86.221.288	49.503.000
5	Jawa Barat	5.150.871.512	184.028.540	74.262.593
6	Jawa Tengah	7.780.384.001	269.108.419	104.719.744
7	DI Yogyakarta	1.819.546.450	58.841.395	39.784.895

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)		
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Jawa Timur	6.720.699.163	320.518.450	49.993.046
9	Aceh	3.563.298.840	53.114.195	0
10	Sumatera Utara	4.702.083.170	184.817.124	180.548.904
11	Sumatera Barat	3.027.763.331	147.532.390	0
12	Riau	2.220.627.478	86.794.659	45.977.327
13	Jambi	1.816.193.422	94.406.850	194.272.998
14	Sumatera Selatan	3.087.645.955	134.250.484	114.064.276
15	Lampung	2.715.861.693	100.211.378	308.906.120
16	Kalimantan Barat	2.528.150.569	80.621.666	12.804.803
17	Kalimantan Tengah	2.038.128.890	94.755.638	0
18	Kalimantan Selatan	2.165.625.386	130.212.050	353.808.272
19	Kalimantan Timur	1.804.501.781	96.335.152	111.867.987
20	Sulawesi Utara	1.819.911.985	52.805.838	231.082.701
21	Sulawesi Tengah	2.079.177.304	87.325.532	0
22	Sulawesi Selatan	3.894.007.822	190.716.356	21.488.721
23	Sulawesi Tenggara	2.528.353.475	106.572.730	0
24	Maluku	1.763.098.583	1.021.200	18.920.460
25	Bali	1.984.765.372	44.493.462	16.950.000
26	NTB	2.201.723.709	2.716.359	0
27	NTT	3.167.849.178	51.996.212	14.464.943
28	Papua	2.570.759.864	49.351.781	273.152.342
29	Bengkulu	1.828.212.536	12.961.045	0
30	Maluku Utara	1.533.198.916	65.706.534	50.475.740
31	Banten	1.759.472.377	75.826.597	0
32	Kep. Babel	1.483.166.548	50.114.847	56.652.700
33	Gorontalo	1.055.561.848	3.009.004	0
34	Kep. Riau	1.472.675.250	57.858.811	137.877.959
35	Papua Barat	1.585.912.589	48.465.431	57.450.596
36	Sulawesi Barat	1.224.289.186	37.341.616	19.678.000
37	Kalimantan Utara	876.572.964	53.388.446	23.065.452
Jumlah		99.388.936.058	4.006.098.344	37.332.737.807

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp0,00

C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.258.193,00. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan ini merupakan hasil pencatatan utang atas kelebihan pendapatan non pajak lainnya. Saldo pada akun ini berasal dari kelebihan penyetoran pendapatan sewa atas rumah dinas, sehingga kelebihan setoran tersebut akan dikembalikan kepada pihak ketiga.

Rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 93
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Tengah	0	949.167	(949.167)
2	Papua Barat	0	1.309.026	(1.309.026)
Jumlah		0	2.258.193	(2.258.193)

Pendapatan Yang
Diterima Dimuka
Rp358.092.590,00

C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp358.092.590,00 dan Rp692.563.153,00. Pendapatan yang Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah.

Saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas pemanfaatan ruang gedung/kantor pada BPS yang penerimaan pendapatannya di awal kontrak sewa dengan wajib setor/pihak ketiga dan disesuaikan nilainya dengan masa manfaat yang telah dijalani oleh wajib setor/pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka tersebut tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 94
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	221.288.994	346.329.185	(125.040.191)
2	Pusdiklat BPS	12.945.833	31.070.000	(18.124.167)
3	Polstat STIS	36.620.608	8.584.827	28.035.781
4	Jawa Tengah	9.455.000	14.182.500	(4.727.500)
5	DI Yogyakarta	1.416.540	2.832.746	(1.416.206)
6	Jawa Timur	585.411	538.820	46.591
7	Aceh	6.160.824	10.279.324	(4.118.500)
8	Sumatera Barat	7.060.044	12.162.848	(5.102.804)
9	Sumatera Selatan	2.925.661	5.851.323	(2.925.662)
10	Lampung	51.579.737	256.216.737	(204.637.000)
11	Kalimantan Selatan	367.883	1.566.788	(1.198.905)
12	Sulawesi Tenggara	5.962.000	672.636	5.289.364
13	Nusa Tenggara Timur	1.724.055	2.275.419	(551.364)
Jumlah		358.092.590	692.563.153	(334.470.563)

Uang Muka Dari
KPPN
Rp0,00

C.2.1.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.230.000,00. Uang Muka dari KUN merupakan UP/TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN pada Neraca per 31 Desember 2025.

Utang Jangka Pendek
lainnya
Rp8.765.194,00

C.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.765.194,00 dan Rp13.080.793,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan

untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 terdapat pada wilayah BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.765.194,00. Secara rinci Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya berupa pajak yang belum disetor tersaji sebagai berikut.

Tabel 95
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Jenis Pajak	Tanggal Pungut	Tanggal Setor	NTPN	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	3ABEB2ME9VVQ2D8N	492.050
2	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	87E355BMNCVTSJJ6	19.500
3	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	DFA5074HO5J7IEJ2	19.500
4	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	377913IROTDPM12N	51.000
5	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	D44B768480U9G5O6	153.000
6	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	B98961Q0NG8KBPPM	30.000
7	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	577680TJ7ROG8ESJ	75.500
8	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	251850TJ9S8U6O5K	77.500
9	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	F003674HNQMO9S4N	116.550
10	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	B2F2E2ME819AA2G5	99.900
11	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	0611B4F97K4SJRIV	38.850
12	PPh 21	31-12-2025	1-1-2026	810EA4F98L2HN0CN	38.850
13	PPh 22	31-12-2025	1-1-2026	598F13IRO03691TO	540.000
14	PPh 23	31-12-2025	1-1-2026	09C2C3IRNO2TN4A9	45.050
15	PPh 23	31-12-2025	1-1-2026	7459E0TJ8SSCRNMG	60.067
16	PPh 23	31-12-2025	1-1-2026	2DD3474HNRDQ09H6	179.000
17	PPh 23	31-12-2025	1-1-2026	A8B8D1QQQ85AMSS5	675.000
18	PPh Final	31-12-2025	1-1-2026	123864F986LFMQTF	274.010
19	PPh Final	31-12-2025	1-1-2026	83D0C0TJ93MFA0T2	821.500
20	PPh Final	31-12-2025	1-1-2026	72BED015O8V4E8DC	508.000
21	PPh Final	31-12-2025	1-1-2026	78BEF015P9U38PPT	160.000
22	PPN	31-12-2025	1-1-2026	752286848TVF7PQB	330.367
23	PPN	31-12-2025	1-1-2026	787341Q0NFHSNLSQ	3.960.000
Jumlah					8.765.194

C.3 EKUITAS

Ekuitas

Rp5.496.808.921.225,00

C.3.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.496.808.921.225,00 dan Rp5.239.814.986.644,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL****D.1.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp161.430.898.522,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp161.430.898.522,00

D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp161.430.898.522,00 dan Rp25.840.049.069,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 96
Rincian PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	528.885.489	3.332.593.224
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.434.439.340	0
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	4.040.100.000	4.831.800.000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	507.000.000	258.250.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.225.320.000	2.180.680.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	140.533.857.000	5.706.567.000
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	6.494.276.638	7.063.098.941
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.476.622.634	2.331.773.378
425839	Pendapatan Denda Lainnya	138.440.480	2.502.000
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	50.000.000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.956.941	132.784.526
Jumlah		161.430.898.522	25.840.049.069

Perbandingan saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 97
Perbandingan PNBP Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	528.885.489	245.348.341
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.434.439.340	2.435.560.492
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	4.040.100.000	4.040.100.000

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	507.000.000	507.000.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.225.320.000	5.225.320.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	140.533.857.000	140.533.857.000
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	6.494.276.638	6.494.276.638
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.476.622.634	1.591.206.194
425839	Pendapatan Denda Lainnya	138.440.480	138.440.480
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	50.000.000	50.000.000
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.956.941	1.956.941
Jumlah		161.430.898.522	161.263.066.086

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	36.328.313.768
2	PUSDIKLAT BPS	5.269.066.115
3	POLSTAT STIS	4.688.876.342
4	DKI JAKARTA	3.292.228.124
5	JAWA BARAT	8.059.312.870
6	JAWA TENGAH	6.965.906.128
7	DI YOGYAKARTA	2.645.107.006
8	JAWA TIMUR	6.083.424.058
9	ACEH	4.712.215.822
10	SUMATERA UTARA	4.385.841.336
11	SUMATERA BARAT	2.538.196.156
12	RIAU	3.451.139.285
13	JAMBI	1.739.252.988
14	SUMATERA SELATAN	4.301.812.657
15	LAMPUNG	3.863.920.951
16	KALIMANTAN BARAT	3.698.198.564
17	KALIMANTAN TENGAH	1.823.248.224
18	KALIMANTAN SELATAN	2.818.812.554
19	KALIMANTAN TIMUR	1.862.972.451
20	SULAWESI UTARA	2.162.658.464
21	SULAWESI TENGAH	2.562.619.807
22	SULAWESI SELATAN	4.503.341.795
23	SULAWESI TENGGARA	3.051.842.291
24	MALUKU	2.685.880.072
25	BALI	2.946.323.341
26	NUSA TENGGARA BARAT	3.363.478.258
27	NUSA TENGGARA TIMUR	3.891.564.017
28	PAPUA	7.293.252.241
29	BENGKULU	1.994.683.856
30	MALUKU UTARA	2.393.711.457
31	BANTEN	3.252.398.672
32	KEP. BANGKA BELITUNG	1.542.412.017
33	GORONTALO	1.518.738.799
34	KEPULAUAN RIAU	2.248.684.863
35	PAPUA BARAT	3.865.795.999

36	SULAWESI BARAT	1.416.645.668
37	KALIMANTAN UTARA	2.209.021.506
Jumlah		161.430.898.522

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 berasal dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Beban Pegawai
Rp2.699.567.484.166,00

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.699.567.484.166,00 dan Rp2.556.576.283.850,00. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 98
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	894.946.416.411	877.209.372.885
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.861.715	13.293.233
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	54.466.879.247	54.337.397.652
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	16.417.408.373	16.475.892.728
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	15.012.290.975	15.743.645.130
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	138.270.717.672	131.004.266.116
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	91.479.099.020	66.249.752.929
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.322.560.820	43.166.541.840
511129	Beban Uang Makan PNS	132.198.932.900	126.451.221.220
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	469.675.000	457.925.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.167.400.000	4.124.100.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6.438.401.738	6.917.258.475
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.567.761.700	2.412.275.689
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	1.227.777.900	0
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25.987.484.607	7.696.716.670
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	521.416	163.773
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.666.493.800	400.710.760
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	488.382.929	106.176.784
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.213.148.747	1.008.485.825

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.802.194.495	424.019.100
511628	Beban Uang Makan PPPK	6.395.900.950	1.415.925.000
511629	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	25.427.036	0
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	3.825.000	0
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	51.575.000	0
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1.132.185.832	0
512211	Beban Uang Lembur	33.495.135.318	28.524.442.250
512212	Beban Uang Lembur PPPK	924.825.331	233.562.669
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.193.660.805.704	1.163.315.401.071
512412	Beban Pegawai Transito	14.966.780	0
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	31.706.427.750	8.887.737.051
Jumlah		2.699.567.484.166	2.556.576.283.850

Perbandingan saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 99
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	894.946.416.411	895.342.682.845
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.861.715	12.866.548
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	54.466.879.247	54.464.817.352
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	16.417.408.373	16.416.895.159
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	15.012.290.975	15.009.770.975
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	138.270.717.672	138.145.480.001
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	91.479.099.020	91.352.285.607
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.322.560.820	43.342.401.590
511129	Beban Uang Makan PNS	132.198.932.900	132.390.398.550
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	469.675.000	469.900.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.167.400.000	4.172.970.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6.438.401.738	6.476.400.554
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.567.761.700	2.558.546.962
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	1.227.777.900	1.227.777.900
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25.987.484.607	25.964.881.107
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	521.416	521.383
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.666.493.800	1.666.493.800
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	488.382.929	488.382.929
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.213.148.747	1.213.148.747
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.802.194.495	1.801.542.715
511628	Beban Uang Makan PPPK	6.395.900.950	5.918.886.100
511629	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	25.427.036	12.643.017
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	3.825.000	3.825.000
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	51.575.000	48.875.000

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1.132.185.832	1.130.565.832
512211	Beban Uang Lembur	33.495.135.318	33.359.987.118
512212	Beban Uang Lembur PPPK	924.825.331	920.907.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.193.660.805.704	1.191.472.040.225
512412	Beban Pegawai Transito	14.966.780	0
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	31.706.427.750	24.990.734.882
Jumlah		2.699.567.484.166	2.690.376.628.898

Beban Pegawai LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Pegawai LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	278.440.615.658
2	PUSDIKLAT BPS	15.139.326.163
3	POLSTAT STIS	22.143.480.767
4	DKI JAKARTA	40.710.538.818
5	JAWA BARAT	149.205.501.509
6	JAWA TENGAH	221.876.228.154
7	DI YOGYAKARTA	50.521.816.827
8	JAWA TIMUR	190.564.325.703
9	ACEH	87.159.642.801
10	SUMATERA UTARA	138.273.516.190
11	SUMATERA BARAT	80.977.185.697
12	RIAU	62.864.886.359
13	JAMBI	53.262.998.485
14	SUMATERA SELATAN	76.922.838.369
15	LAMPUNG	75.238.581.225
16	KALIMANTAN BARAT	61.891.373.102
17	KALIMANTAN TENGAH	54.131.807.274
18	KALIMANTAN SELATAN	61.385.404.780
19	KALIMANTAN TIMUR	49.047.724.110
20	SULAWESI UTARA	55.158.214.066
21	SULAWESI TENGAH	52.313.049.342
22	SULAWESI SELATAN	107.179.130.505
23	SULAWESI TENGGARA	67.634.531.408
24	MALUKU	45.973.058.039
25	BALI	47.281.683.982
26	NUSA TENGGARA BARAT	59.978.330.314
27	NUSA TENGGARA TIMUR	82.988.862.026
28	PAPUA	73.720.993.188
29	BENGKULU	47.800.676.670
30	MALUKU UTARA	37.669.566.865
31	BANTEN	49.062.792.134
32	KEP. BANGKA BELITUNG	37.911.476.983
33	GORONTALO	29.370.526.083
34	KEPULAUAN RIAU	35.556.862.634
35	PAPUA BARAT	43.132.492.003
36	SULAWESI BARAT	33.231.794.409
37	KALIMANTAN UTARA	23.845.651.524
Jumlah		2.699.567.484.166

Beban Persediaan
Rp56.727.656.091,00

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang persediaan yang habis pakai. Saldo Beban Persediaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp56.727.656.091,00 dan Rp62.186.017.523,00. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 100
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	56.727.656.091	62.186.017.523
	Jumlah	56.727.656.091	62.186.017.523

Beban Persediaan LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Persediaan LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	2.922.345.595
2	PUSDIKLAT BPS	652.356.764
3	POLSTAT STIS	142.241.871
4	DKI JAKARTA	1.088.721.770
5	JAWA BARAT	2.698.624.026
6	JAWA TENGAH	3.420.635.184
7	DI YOGYAKARTA	813.215.477
8	JAWA TIMUR	5.086.345.098
9	ACEH	1.489.125.893
10	SUMATERA UTARA	2.149.943.269
11	SUMATERA BARAT	1.397.038.411
12	RIAU	1.236.161.381
13	JAMBI	1.214.694.198
14	SUMATERA SELATAN	1.647.593.322
15	LAMPUNG	1.496.413.887
16	KALIMANTAN BARAT	1.731.949.132
17	KALIMANTAN TENGAH	1.054.920.620
18	KALIMANTAN SELATAN	1.137.052.552
19	KALIMANTAN TIMUR	1.331.428.872
20	SULAWESI UTARA	1.069.709.949
21	SULAWESI TENGAH	1.976.964.982
22	SULAWESI SELATAN	1.762.493.014
23	SULAWESI TENGGARA	1.678.944.605
24	MALUKU	1.568.837.297
25	BALI	1.010.463.053
26	NUSA TENGGARA BARAT	1.249.782.218
27	NUSA TENGGARA TIMUR	1.948.232.069
28	PAPUA	3.611.620.746
29	BENGKULU	801.748.545
30	MALUKU UTARA	1.143.785.876
31	BANTEN	1.473.691.585
32	KEP. BANGKA BELITUNG	825.753.839

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2025

33	GORONTALO	754.327.839
34	KEPULAUAN RIAU	670.555.943
35	PAPUA BARAT	1.199.268.419
36	SULAWESI BARAT	761.169.867
37	KALIMANTAN UTARA	509.498.923
Jumlah		56.727.656.091

Beban Barang dan Jasa
Rp1.316.177.953.213,00

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa termasuk aset ekstrakomptabel yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional entitas pelaporan. Saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.316.177.953.213,00 dan Rp907.860.659.689,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 101
Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	60.573.700.616	57.517.988.877
521112	Beban Pengadaan Bahan Pangan	1.020.000	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	366.653.611	275.546.933
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	35.971.428.340	28.184.023.910
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9.641.568.388	22.512.658.085
521211	Beban Bahan	78.770.596.855	57.682.438.444
521213	Beban Honor Output Kegiatan	787.190.859.957	398.047.144.380
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.697.884.134	29.327.235.245
521252	Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	9.376.701.769	7.880.595.220
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	607.746.903	727.130.694
522111	Beban Langganan Listrik	44.361.809.892	48.560.250.310
522112	Beban Langganan Telepon	1.036.368.947	1.153.881.129
522113	Beban Langganan Air	2.039.701.156	1.787.519.419
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	13.578.082.526	20.353.002.826
522131	Beban Jasa Konsultan	4.559.754.432	834.723.290
522141	Beban Sewa	11.638.522.415	12.549.183.801
522151	Beban Jasa Profesi	8.028.067.792	6.519.606.399
522191	Beban Jasa Lainnya	217.673.838.281	213.895.818.227
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	63.647.199	51.912.500
Jumlah		1.316.177.953.213	907.860.659.689

Perbandingan saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 102
Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	60.573.700.616	68.121.088.098
521112	Beban Pengadaan Bahan Pangan	1.020.000	1.020.000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	366.653.611	368.722.139
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	35.971.428.340	35.984.740.340
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9.641.568.388	9.665.414.081
521211	Beban Bahan	78.770.596.855	78.866.252.997
521213	Beban Honor Output Kegiatan	787.190.859.957	787.168.323.957
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.697.884.134	29.026.250.792
521252	Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	9.376.701.769	8.874.923.762
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	607.746.903	670.831.053
522111	Beban Langganan Listrik	44.361.809.892	44.659.137.451
522112	Beban Langganan Telepon	1.036.368.947	1.035.700.310
522113	Beban Langganan Air	2.039.701.156	2.044.030.550
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	13.578.082.526	14.117.051.547
522131	Beban Jasa Konsultan	4.559.754.432	4.559.754.432
522141	Beban Sewa	11.638.522.415	11.718.606.251
522151	Beban Jasa Profesi	8.028.067.792	8.028.067.792
522191	Beban Jasa Lainnya	217.673.838.281	200.099.853.372
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	63.647.199	0
Jumlah		1.316.177.953.213	1.305.009.768.924

Beban Barang dan Jasa LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Barang dan Jasa LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	129.457.419.067
2	PUSDIKLAT BPS	27.442.907.251
3	POLSTAT STIS	12.864.392.027
4	DKI JAKARTA	29.481.174.598
5	JAWA BARAT	122.219.005.112
6	JAWA TENGAH	130.175.782.924
7	DI YOGYAKARTA	21.272.324.883
8	JAWA TIMUR	137.803.544.626
9	ACEH	33.380.747.441
10	SUMATERA UTARA	51.140.395.337
11	SUMATERA BARAT	27.097.294.080
12	RIAU	30.095.323.189
13	JAMBI	18.500.959.201
14	SUMATERA SELATAN	33.162.444.065
15	LAMPUNG	33.178.392.223
16	KALIMANTAN BARAT	24.985.235.561
17	KALIMANTAN TENGAH	21.876.711.627
18	KALIMANTAN SELATAN	23.395.641.436
19	KALIMANTAN TIMUR	22.231.330.402
20	SULAWESI UTARA	21.138.873.595
21	SULAWESI TENGAH	20.486.080.790
22	SULAWESI SELATAN	43.660.954.180
23	SULAWESI TENGGARA	21.319.085.341
24	MALUKU	16.625.546.523
25	BALI	24.034.321.924
26	NUSA TENGGARA BARAT	25.061.062.041

27	NUSA TENGGARA TIMUR	31.818.140.129
28	PAPUA	43.065.334.823
29	BENGKULU	15.239.865.619
30	MALUKU UTARA	14.888.989.110
31	BANTEN	31.518.458.702
32	KEP. BANGKA BELITUNG	12.350.029.595
33	GORONTALO	10.895.725.008
34	KEPULAUAN RIAU	15.072.725.280
35	PAPUA BARAT	18.749.644.210
36	SULAWESI BARAT	10.221.648.794
37	KALIMANTAN UTARA	10.270.442.499
Jumlah		1.316.177.953.213

Beban Pemeliharaan
Rp146.730.634.656,00

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki oleh entitas pelaporan agar tetap berada dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp146.730.634.656,00 dan Rp142.774.692.030,00.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 103
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.787.733.670	49.487.185.083
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.678.803.555	2.498.642.859
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.745.860.813	1.485.947.488
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.725.737.249	82.051.719.278
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	6.394.859.594	5.473.013.605
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.384.739.775	1.669.877.540
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	12.900.000	108.306.177
Jumlah		146.730.634.656	142.774.692.030

Perbandingan saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 104
Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.787.733.670	61.811.705.381
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.678.803.555	2.678.803.555
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan	1.745.860.813	1.744.910.813

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bangunan Lainnya		
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.725.737.249	69.084.791.927
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	6.394.859.594	3.113.399.000
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.384.739.775	0
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	12.900.000	0
Jumlah		146.730.634.656	138.433.610.676

Beban Pemeliharaan LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Pemeliharaan LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	55.581.924.657
2	PUSDIKLAT BPS	1.960.168.392
3	POLSTAT STIS	1.531.182.958
4	DKI JAKARTA	1.263.057.842
5	JAWA BARAT	4.072.158.409
6	JAWA TENGAH	5.551.366.618
7	DI YOGYAKARTA	1.368.317.899
8	JAWA TIMUR	6.368.859.212
9	ACEH	3.400.274.947
10	SUMATERA UTARA	6.709.164.996
11	SUMATERA BARAT	3.269.578.007
12	RIAU	2.028.264.091
13	JAMBI	1.862.717.839
14	SUMATERA SELATAN	3.218.970.297
15	LAMPUNG	2.516.706.974
16	KALIMANTAN BARAT	2.107.197.087
17	KALIMANTAN TENGAH	2.626.955.443
18	KALIMANTAN SELATAN	2.761.782.554
19	KALIMANTAN TIMUR	2.094.869.602
20	SULAWESI UTARA	2.138.832.374
21	SULAWESI TENGAH	2.098.106.380
22	SULAWESI SELATAN	3.840.576.025
23	SULAWESI TENGGARA	2.098.869.947
24	MALUKU	2.003.188.659
25	BALI	1.553.596.809
26	NUSA TENGGARA BARAT	1.681.374.690
27	NUSA TENGGARA TIMUR	3.040.489.753
28	PAPUA	3.836.346.178
29	BENGKULU	1.409.103.449
30	MALUKU UTARA	1.589.687.334
31	BANTEN	1.875.698.903
32	KEP. BANGKA BELITUNG	1.373.181.793
33	GORONTALO	1.258.418.878
34	KEPULAUAN RIAU	1.671.021.779
35	PAPUA BARAT	2.361.585.741
36	SULAWESI BARAT	1.582.507.571
37	KALIMANTAN UTARA	1.024.530.569
Jumlah		146.730.634.656

Beban Perjalanan Dinas
Rp552.810.606.425,00

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban untuk mencatat penyelenggaraan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp552.810.606.425,00 dan Rp563.952.482.272,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 105
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
524111	Beban Perjalanan Biasa	138.204.490.109	154.952.675.291
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.100.159.030	149.112.751.611
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	167.590.113.522	180.288.914.824
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.426.044.545	75.518.176.948
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	314.608.784	0
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.175.190.435	4.079.963.598
Jumlah		552.810.606.425	563.952.482.272

Perbandingan saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 106
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
524111	Beban Perjalanan Biasa	138.204.490.109	138.202.921.621
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.100.159.030	175.260.706.210
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	167.590.113.522	167.617.164.692
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.426.044.545	67.192.545.545
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	314.608.784	314.608.784
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.175.190.435	4.175.190.435
Jumlah		552.810.606.425	552.763.137.287

Beban Perjalanan Dinas LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Perjalanan Dinas LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	83.780.111.803
2	PUSDIKLAT BPS	8.874.784.269
3	POLSTAT STIS	3.248.237.521
4	DKI JAKARTA	8.056.537.084
5	JAWA BARAT	33.080.406.715
6	JAWA TENGAH	28.727.195.202
7	DI YOGYAKARTA	5.779.266.096
8	JAWA TIMUR	33.822.103.964
9	ACEH	13.048.249.228
10	SUMATERA UTARA	18.756.439.161

11	SUMATERA BARAT	9.954.897.879
12	RIAU	10.326.896.106
13	JAMBI	6.499.647.381
14	SUMATERA SELATAN	13.450.045.691
15	LAMPUNG	10.683.535.829
16	KALIMANTAN BARAT	10.651.950.805
17	KALIMANTAN TENGAH	8.524.087.794
18	KALIMANTAN SELATAN	8.883.864.531
19	KALIMANTAN TIMUR	8.464.339.959
20	SULAWESI UTARA	8.467.246.555
21	SULAWESI TENGAH	8.362.418.274
22	SULAWESI SELATAN	15.138.609.353
23	SULAWESI TENGGARA	9.711.576.221
24	MALUKU	13.366.784.836
25	BALI	6.983.010.428
26	NUSA TENGGARA BARAT	9.884.226.395
27	NUSA TENGGARA TIMUR	13.089.493.882
28	PAPUA	78.484.824.473
29	BENGKULU	5.272.825.540
30	MALUKU UTARA	7.553.911.647
31	BANTEN	9.263.119.813
32	KEP. BANGKA BELITUNG	3.768.130.747
33	GORONTALO	3.078.024.021
34	KEPULAUAN RIAU	5.902.753.084
35	PAPUA BARAT	21.346.418.489
36	SULAWESI BARAT	4.429.374.798
37	KALIMANTAN UTARA	4.095.260.851
Jumlah		552.810.606.425

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp239.691.870.128,00

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp239.691.870.128,00 dan Rp221.955.168.092,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 107
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	158.501.443.157	152.000.681.733
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60.283.533.377	60.024.277.404
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.770.000	3.885.000
592115	Beban Amortisasi Software	20.180.300.858	8.932.481.853
592116	Beban Amortisasi Lisensi	259.401.452	481.792.930
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	4.954.400
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	459.421.284	507.094.772

Jumlah	239.691.870.128	221.955.168.092
--------	-----------------	-----------------

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	86.777.532.866
2	PUSDIKLAT BPS	2.224.578.237
3	POLSTAT STIS	3.854.955.016
4	DKI JAKARTA	2.582.488.766
5	JAWA BARAT	10.396.440.500
6	JAWA TENGAH	12.961.922.161
7	DI YOGYAKARTA	2.537.503.056
8	JAWA TIMUR	10.852.242.891
9	ACEH	5.661.929.860
10	SUMATERA UTARA	8.081.433.286
11	SUMATERA BARAT	5.061.446.479
12	RIAU	3.529.995.725
13	JAMBI	3.047.071.150
14	SUMATERA SELATAN	5.685.491.587
15	LAMPUNG	4.036.854.194
16	KALIMANTAN BARAT	3.368.317.201
17	KALIMANTAN TENGAH	2.730.797.074
18	KALIMANTAN SELATAN	3.144.227.808
19	KALIMANTAN TIMUR	3.064.829.530
20	SULAWESI UTARA	3.903.442.260
21	SULAWESI TENGAH	3.461.203.388
22	SULAWESI SELATAN	5.809.903.680
23	SULAWESI TENGGARA	4.501.670.342
24	MALUKU	3.211.102.414
25	BALI	2.526.089.602
26	NUSA TENGGARA BARAT	3.726.847.673
27	NUSA TENGGARA TIMUR	4.853.350.454
28	PAPUA	6.606.072.159
29	BENGKULU	2.772.358.983
30	MALUKU UTARA	2.704.855.471
31	BANTEN	2.634.254.743
32	KEP. BANGKA BELITUNG	1.802.049.870
33	GORONTALO	1.927.360.894
34	KEPULAUAN RIAU	1.981.027.774
35	PAPUA BARAT	3.989.429.454
36	SULAWESI BARAT	1.545.854.382
37	KALIMANTAN UTARA	2.134.939.198
Jumlah		239.691.870.128

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp655.753.222,00

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang dalam suatu periode pelaporan. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp655.753.222,00 dan minus Rp2.039.086.520,00. Rincian Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 108
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	631.567.969	1.666.864
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	21.310.574	1.313.816
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	2.874.679	(2.042.067.200)
Jumlah		655.753.222	(2.039.086.520)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	1.926.614
2	JAWA BARAT	1.260.508
3	JAWA TENGAH	(43.059)
4	JAWA TIMUR	5.494.499
5	ACEH	84.756
6	SUMATERA BARAT	34.819
7	SUMATERA SELATAN	3.595
8	KALIMANTAN BARAT	(349)
9	KALIMANTAN SELATAN	(45.198)
10	KALIMANTAN TIMUR	47.313
11	SULAWESI SELATAN	28.674
12	SULAWESI TENGGARA	595
13	NUSA TENGGARA TIMUR	(344.462)
14	PAPUA	29.046
15	MALUKU UTARA	10.551
16	BANTEN	(14.128)
17	KEP. BANGKA BELITUNG	222.605.319
18	KEPULAUAN RIAU	8.160
19	PAPUA BARAT	(725)
20	SULAWESI BARAT	20.925
21	KALIMANTAN UTARA	424.645.769
Jumlah		655.753.222

D.3 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp8.937.026.127,00

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp8.937.026.127,00 dan Rp28.353.655.356,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari hasil pelepasan aset non lancar berupa Barang Milik Negara (BMN) melalui proses pemindahtanganan aset. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 109
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.627.000	6.400.000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.062.608.338	1.339.629.322
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	848.790.789	27.007.626.034
Jumlah		8.937.026.127	28.353.655.356

Perbandingan saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 110
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.627.000	25.627.000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.062.608.338	8.062.608.338
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	848.790.789	848.790.789
Jumlah		8.937.026.127	8.937.026.127

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	54.316.400
2	PUSDIKLAT BPS	117.923.853
3	DKI JAKARTA	27.139.692
4	JAWA BARAT	617.177.785
5	JAWA TENGAH	540.716.500
6	DI YOGYAKARTA	71.777.813
7	JAWA TIMUR	470.032.643
8	ACEH	673.019.000
9	SUMATERA UTARA	1.418.500
10	SUMATERA BARAT	583.925.739
11	RIAU	6.843.500
12	JAMBI	91.668.054
13	SUMATERA SELATAN	482.297.500
14	LAMPUNG	245.925.482
15	KALIMANTAN BARAT	457.317.050
16	KALIMANTAN TENGAH	8.609.900
17	KALIMANTAN SELATAN	545.541.100
18	KALIMANTAN TIMUR	133.861.794
19	SULAWESI UTARA	92.159.850
20	SULAWESI TENGAH	483.890.760
21	SULAWESI SELATAN	742.192.458
22	SULAWESI TENGGARA	67.384.500

23	MALUKU	100.220.000
24	BALI	344.905.000
25	NUSA TENGGARA BARAT	77.554.100
26	NUSA TENGGARA TIMUR	138.311.583
27	PAPUA	157.179.566
28	BENGKULU	111.195.900
29	MALUKU UTARA	235.587.500
30	BANTEN	551.314.350
31	KEP. BANGKA BELITUNG	181.484.755
32	KEPULAUAN RIAU	177.586.000
33	PAPUA BARAT	22.860.000
34	SULAWESI BARAT	8.756.000
35	KALIMANTAN UTARA	314.931.500
Jumlah		8.937.026.127

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp8.859.872.221,00

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.859.872.221,00 dan Rp16.730.740.475,00. Beban tersebut berasal dari nilai Beban Kerugian Pelepasan Aset yang memperhitungkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku ketika terjadi proses pelepasan aset.

Tabel 111
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	8.859.872.221	16.730.740.475
Jumlah		8.859.872.221	16.730.740.475

Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	53.786.939
2	PUSDIKLAT BPS	729.240
3	POLSTAT STIS	237.128.100
4	DKI JAKARTA	64.028.745
5	JAWA BARAT	1.939.353.163
6	JAWA TENGAH	385.523.316
7	DI YOGYAKARTA	1.128.000
8	JAWA TIMUR	1.657.584.839
9	ACEH	460.121.087
10	SUMATERA UTARA	45.195.881
11	SUMATERA BARAT	351.230.830
12	RIAU	14.853.982
13	JAMBI	511.966.825
14	SUMATERA SELATAN	70.706.657
15	LAMPUNG	445.951.018
16	KALIMANTAN BARAT	89.490.623
17	KALIMANTAN TENGAH	592.429.862

18	SULAWESI UTARA	31.500.000
19	SULAWESI SELATAN	109.417.493
20	MALUKU	143.167.498
21	BALI	2.252.745
22	NUSA TENGGARA BARAT	42.619.178
23	NUSA TENGGARA TIMUR	123.638.298
24	PAPUA	149.679.950
25	BENGKULU	438.345.098
26	MALUKU UTARA	192.926.105
27	BANTEN	677.494.684
28	KEP. BANGKA BELITUNG	2.984.715
29	GORONTALO	9.362.000
30	SULAWESI BARAT	10.383.850
31	KALIMANTAN UTARA	4.891.500
Jumlah		8.859.872.221

D.4 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp28.993.319.726,00

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.993.319.726,00 dan Rp8.665.572.814,00. Pendapatan ini berasal dari transaksi pendapatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi utama dari BPS. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 112
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	15.022.386	2.310.105.286
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.338.369.878	422.588.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	462.218.075	333.716.485
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	752.565.537	364.498.576
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	335.087.674	272.641.740
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	4.971.696	37.438.296
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	19.344.117.875	3.245.086.213
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.740.966.605	1.679.498.218
Jumlah		28.993.319.726	8.665.572.814

Perbandingan saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 113
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO dan LRA
Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	15.022.386	15.022.386
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1.338.369.878	401.625.983
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	462.218.075	380.583.600
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	752.565.537	930.613.271
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	335.087.674	2.109.895.084
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	4.971.696	21.831.392
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	19.344.117.875	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.740.966.605	0
Jumlah		28.993.319.726	3.859.571.716

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	18.374.329.911
2	PUSDIKLAT BPS	34.420.706
3	POLSTAT STIS	21.688.449
4	DKI JAKARTA	43.023.742
5	JAWA BARAT	117.269.061
6	JAWA TENGAH	25.126.849
7	DI YOGYAKARTA	32.443.816
8	JAWA TIMUR	143.449.478
9	ACEH	45.330.114
10	SUMATERA UTARA	336.447.404
11	SUMATERA BARAT	7.621.363
12	RIAU	33.762.149
13	JAMBI	194.332.574
14	SUMATERA SELATAN	65.957.779
15	LAMPUNG	5.879.154
16	KALIMANTAN BARAT	440.134
17	KALIMANTAN TENGAH	1.279.429.861
18	KALIMANTAN SELATAN	58.068.276
19	KALIMANTAN TIMUR	119.302.340
20	SULAWESI UTARA	114.352.734
21	SULAWESI TENGAH	15.584.991
22	SULAWESI SELATAN	235.301.707
23	SULAWESI TENGGARA	15.142.825
24	MALUKU	20.376.092
25	BALI	196.645.388
26	NUSA TENGGARA BARAT	5.381.605.610
27	NUSA TENGGARA TIMUR	29.379.180
28	PAPUA	127.725.294
29	BENGKULU	5.842.898
30	MALUKU UTARA	7.078.075

31	BANTEN	87.088.994
32	KEP. BANGKA BELITUNG	71.363.213
33	GORONTALO	4.224.640
34	KEPULAUAN RIAU	9.538.248
35	PAPUA BARAT	10.033.888
36	SULAWESI BARAT	29.872.103
37	KALIMANTAN UTARA	1.693.840.686
Jumlah		28.993.319.726

Beban dari Kegiatan Non operasional Lainnya
Rp7.327.604.380,00

D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.327.604.380,00 dan Rp6.360.020.499,00. Beban ini merupakan beban yang muncul karena adanya penyesuaian atas nilai dan kondisi barang persediaan. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 114
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.790.320.635	1.680.371.598
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	537.283.745	4.679.648.901
Jumlah		7.327.604.380	6.360.020.499

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	237.354.829
2	PUSDIKLAT BPS	86.056.326
3	DKI JAKARTA	4.044.480
4	JAWA BARAT	1.984.000
5	DI YOGYAKARTA	15.520.400
6	JAWA TIMUR	3.898.500
7	SUMATERA UTARA	1.638.000
8	SUMATERA BARAT	7.876.806
9	RIAU	1.369.000
10	SUMATERA SELATAN	19.685.574
11	KALIMANTAN BARAT	540.000
12	KALIMANTAN TENGAH	1.225.024.000
13	KALIMANTAN SELATAN	2.175.000
14	KALIMANTAN TIMUR	80.192.056
15	SULAWESI SELATAN	24.746.100
16	MALUKU	133.300.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	5.369.445.450
18	PAPUA	99.425.010
19	BANTEN	796.166
20	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9.307.683
21	KEPULAUAN RIAU	2.337.000

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2025

22	PAPUA BARAT	888.000
Jumlah		7.327.604.380

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.239.814.986.644,00

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.239.814.986.644,00 dan Rp5.297.290.032.446,00.

Defisit LO
Rp4.829.188.190.127,00

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.829.188.190.127,00 dan Rp4.413.497.700.671,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa pada Laporan Operasional. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada Laporan Operasional.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar minus Rp18.469.720.414,00 dan Rp22.619.292,00. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 115
Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koreksi Nilai Persediaan	18.740.106	117.590.891
2	Koreksi atas Reklasifikasi	26.556.105	(23.844.077)
3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(18.859.107.658)	1.533.394.535
4	Lain-lain	344.091.033	(1.649.760.641)
Jumlah		(18.469.720.414)	(22.619.292)

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp18.740.106,00

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp18.740.106,00 dan Rp117.590.891,00. Saldo Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan nilai koreksi atas persediaan berupa persediaan yang perolehannya pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran yang berjalan. Perolehan persediaan ini melalui pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya, maupun reklasifikasi masuk. Saldo Koreksi Nilai Persediaan yang tercatat di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai koreksi persediaan barang konsumsi yang perolehannya tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran berjalan.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp26.556.105,00

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp26.556.105,00 dan minus Rp23.844.077,00. Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi yang terjadi pada Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya SIMAK-BMN periode tahun berjalan. Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu transaksi yang mungkin terjadi atas suatu BMN adalah reklasifikasi. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi pencatatan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain. Sedangkan reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus suatu BMN, sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Minus
Rp18.859.107.658,00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar minus Rp18.859.107.658,00 dan Rp1.533.394.535,00. Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas catatan dan koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang dilakukan selain karena revaluasi nilai.

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset yang terjadi pada nilai BMN periode tahun berjalan. Rincian saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari:

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar minus Rp695.207.158,00.
- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp18.163.900.500,00.

Koreksi Lain-Lain
Rp344.091.033,00

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp344.091.033,00 dan minus Rp1.649.760.641,00. Saldo Koreksi Lain-Lain merupakan akun yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi kas, piutang, dan utang pada periode berjalan. Saldo Koreksi Lain-Lain terbentuk akibat jurnal penyesuaian yang dicatat pada periode tahun berjalan.

Transaksi Antar Entitas
Rp5.104.651.845.122,00

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.104.651.845.122,00 dan Rp4.356.045.274.161,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih Entitas yang berbeda baik internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga lain, maupun antara BPS dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Tabel 116
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas

No.	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.102.033.692.376	4.410.074.194.098
2	Diterima dari Entitas Lain	(174.059.663.929)	(66.221.481.321)
3	Transfer Keluar	(191.761.467.037)	(46.051.842.024)
4	Transfer Masuk	345.681.758.135	45.760.064.908
5	Pengesahan Hibah Langsung	22.790.567.565	11.000.577.834
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(80.393.988)	(73.598.542)
7	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	48.352.000	1.557.359.208
Jumlah		5.104.652.845.122	4.356.045.274.161

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, adalah masing-masing sebesar minus Rp174.059.663.929,00 dan Rp5.102.033.692.376,00. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Transaksi Antar Entitas atas pendapatan dan belanja pada BPS yang melibatkan Kas Negara (BUN). Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 117
Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak - LRA	174.059.663.929	0
Jumlah		174.059.663.929	0
2	Belanja - LRA		
	• Belanja Pegawai	0	2.690.376.628.898
	• Belanja Barang	0	2.060.179.703.107
	• Belanja Modal	0	354.625.400.426
Jumlah		174.059.663.929	5.105.181.732.431

Terdapat perbedaan saldo Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) yang sebesar Rp5.102.033.692.376,00 dengan realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran – Belanja yang sebesar Rp5.105.181.732.431,00. Perbedaan saldo tersebut sebesar Rp3.148.040.055,00 yang merupakan realisasi belanja dengan sumber dana Hibah.

E.4.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, adalah masing-masing sebesar Rp345.680.758.135,00 dan Rp191.761.467.037,00. Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu Entitas ke Entitas lain pada internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga, dan antara BPS dengan BUN.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.790.567.565,00. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS tahun berjalan dalam bentuk uang/kas, barang, maupun jasa. Sedangkan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

E.4.4 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp80.393.988,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung yang telah dilakukan pengesahan.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp48.352.000,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS dalam bentuk kas, barang, maupun jasa atas hibah yang diterima pada tahun 2024 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah di tahun 2024.

Ekuitas Akhir
Rp5.496.808.921.225, 00

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.496.808.921.225,00 dan Rp5.148.782.927.491,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Menindaklanjuti berdasarkan Surat R-196/01000/PW.110/2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang monitoring penyelesaian tindak lanjut BPS terhadap temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024. Temuan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tiga Satker Tidak Dipungut Sesuai Ketentuan;
2. Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Kelebihan Pembayaran atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja;
4. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 13 Satker BPS Sebesar Rp12,76 Juta;
5. Pembayaran Belanja Barang untuk Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya pada 24 Satuan Kerja BPS Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp150,36 Juta;
6. Pembayaran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja pada 66 Satuan Kerja BPS Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp295,37 Juta;
7. Pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Pengadaan Laptop Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp168,54 Juta dan Denda Kurang Dikarenakan Sebesar Rp12,67 Juta;
9. Penatausahaan Kas dan Setara Kas Belum Optimal;
10. Penerimaan dan Penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri pada BPS Kabupaten Sarmi Tidak Sesuai Ketentuan;
11. Penatausahaan, Pencatatan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Optimal;
12. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Belum Optimal.

Daftar rencana tindak lanjut dan progress tindak lanjut terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.2 REVISI DIPA

Selama periode 31 Desember 2025, BPS melakukan perubahan pagu sebanyak 8 (delapan) kali melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Nilai pagu dalam DIPA awal sebesar Rp5.705.872.675.000,00 dan setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp5.815.751.515.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Pertama terdapat pada 528 satuan kerja berdasarkan surat Inspektur Utama BPS nomor B-101/02000/PR.440/2025 tanggal 19 Februari 2025. Nilai pagu awal Rp5.705.872.675.000,00 menjadi Rp5.705.872.675.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi administrasi dengan rincian:

- a. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;
- b. Penyesuaian catatan Halaman IV.A DIPA berupa pencatuman penandaan blokir efisiensi;
- c. Satker: 528 Satker

Ket: Revisi dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025; dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025.

2. Revisi DIPA Kedua terdapat pada 528 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-125/ 02000/PR.440/2025 tanggal 6 Maret 2025. Nilai pagu sebelum dan sesudah revisi sebesar Rp5.705.872.675.000,00 menjadi Rp5.712.879.143.000,00. Revisi DIPA dilakukan karena:

1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO.
- b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO.

2. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, yaitu perubahan anggaran yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) yang dapat digunakan oleh K/L sebagai akibat adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman pada satker Sekretariat Utama dan 34 satker BPS Provinsi dengan total penerimaan sebesar Rp7.533.857.000,00.

3. Revisi administrative dengan rincian:

- a) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;
- b) Penyesuaian catatan Halaman IV.A DIPA berupa realokasi blokir efisiensi serta pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen;
- c) Satker: 528 Satker

3. Revisi DIPA ketiga terdapat pada 528 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-193/02000/PR.440/2025 tanggal 23 April 2025. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.712.879.143.000,00 menjadi Rp5.712.879.143.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Revisi pada program PPIS (054.01.GG) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;

- b. Revisi pada Program DUKMAN (054.01WA) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran antar KRO dan RO.
 2. Revisi administratif dengan rincian:
 - a. Penyesuaian RDP Halaman III DIPA Satker;
 - b. Penyesuaian blokir Halaman IV.A DIPA berupa pembukaan blokir relaksasi efisiensi, pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen, serta realokasi blokir efisiensi;
 - c. Penyesuaian catatan Halaman IV.B DIPA untuk pembayaran tunggakan;
 - d. Satker: 528 Satker
4. Revisi DIPA keempat terdapat pada 1 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-263/02000/PR.450/2025 tanggal 20 Mei 2025. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.712.879.143.000,00 menjadi Rp5.712.249.143.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, yaitu perubahan pagu yang bersumber dari PNBPN, berupa penambahan alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG). Penambahan anggaran berasal dari kontrak, kerja sama, atau nota kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik, dengan total penerimaan Rp9.000.000.000,00;
 2. Revisi administratif dengan rincian:
 - a. Pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen;
 - b. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RDP) Halaman III DIPA Satker;
 - c. Pemutakhiran POK;
 - d. Satker: 1 Satker
5. Revisi DIPA kelima terdapat pada 528 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-319/02000/PR.440/2025 tanggal 11 Juni 2025. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.721.249.143.000,00 menjadi Rp5.721.249.143.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 2. Revisi administratif dengan rincian:
 - a. Penyesuaian blokir Halaman IV.A DIPA berupa usulan pembukaan blokir relaksasi efisiensi anggaran, serta pemblokiran anggaran dikarenakan kekurangan dokumen;

- b. Pemutakhiran POK;
 - c. Satker: 528 Satker.
6. Revisi DIPA keenam terdapat pada 528 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-406/02000/PR.440/2025 tanggal 9 Juli 2025. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.721.249.143.000,00 menjadi Rp5.838.722.387.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Tema revisi: Perubahan rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, pagu anggaran berubah administrasi.

Tata cara revisi:

1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 2. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dengan rincian sebagai berikut: Perubahan anggaran yang bersumber dari PNPB yang bersifat menambah alokasi anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) yang dapat digunakan oleh K/L sebagai akibat adanya PNPB yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman pada satker Sekretariat Utama dan Satker Provinsi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan total penerimaan sebesar Rp124.000.000.000,00 dan penambahan anggaran satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS yang bersumber dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan dengan total penerimaan sebesar Rp2.577.270.000,00 dengan pagu penggunaan sebesar Rp2.153.261.000,00.
7. Revisi DIPA ketujuh terdapat pada 526 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-544/02000/PR.440/2025 tanggal 29 Agustus 2025. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.838.722.387.000,00 menjadi Rp5.838.722.387.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 2. Revisi administratif dengan rincian:
 - a. Pemutakhiran Penyesuaian blokir Halaman IV.A DIPA berupa

- pembukaan blokir karena telah terdapat kelengkapan dokumen;
 - b. POK;
 - c. Satker: 526 Satker.
8. Revisi DIPA kedelapan terdapat pada 527 satuan kerja berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPS nomor B-637/02000/PR.440/2025 tanggal 21 Oktober 2025. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.838.722.387.000,00 menjadi Rp5.815.751.515.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
- 1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian: Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - 2. Revisi anggaran dalam hal pagu berubah, yaitu:
 - a. Perubahan anggaran yang bersumber dari PNPB yang bersifat menambah alokasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) yang dapat digunakan oleh K/L sebagai akibat adanya PNPB yang berasal dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan pada satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan dengan tambahan penerimaan sebesar Rp379.930.000,00 dan tambahan pagu penggunaan sebesar Rp303.224.000,00;
 - b. Perubahan anggaran yang bersumber dari SBSN yang bersifat mengurangi alokasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) pada satker BPS Kabupaten Bandung, BPS Kota Banda Aceh, BPS Kota Tangerang sebesar Rp23.274.096.000,00.
 - c. Satker: 526 Satker.
 - 3. Revisi administrasi dengan rincian:
 - a. Penyesuaian blokir Halaman IV.A DIPA berupa pembukaan blokir karena adanya penyesuaian anggaran yang bersumber pada SBSN;
 - b. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;
 - c. Pemutakhiran POK;
 - d. Satker: 527 Satker.

F.3 REKENING BPS

Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019, dan berdasarkan hasil rekonsiliasi rekening Tahun 2025 antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan

Badan Pusat Statistik, sesuai hasil rekonsiliasi periode Triwulan IV pada kondisi rekening aktif tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada aplikasi Sprint, diperoleh informasi bahwa jumlah rekening giro milik BPS tercatat sebanyak 552 rekening, yang terdiri atas 546 rekening pengeluaran, 3 rekening penerimaan, dan 3 rekening lainnya, rincian rekening tersebut dapat dilihat rekapitulasi tabel berita acara hasil rekon sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRJADI PRAPTOSUHARDJO II LT. 3
 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 – 4 JAKARTA 10710
 TELEPON (021) 344-0230 (20 SALURAN) PSW 5400, 5421, FAKSIMILE 3459819
 SITUS www.perbendaharaan.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING MILIK SATUAN KERJA
 LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 ANTARA
 DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
 DENGAN
 BADAN PUSAT STATISTIK
 Nomor : BAR-191/PB.3.5/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dilakukan Rekonsiliasi Data Rekening milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai Rekening antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Badan Pusat Statistik untuk **periode data rekening sampai dengan tanggal 31 Desember 2025**, sebagai berikut:

- Rekening pemerintah pusat yang direkonsiliasi pada Badan Pusat Statistik bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan data jumlah rekening yang tercatat pada Badan Pusat Statistik.
- Data awal rekening pemerintah pusat dengan status aktif pada database Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan yang dicatat pada Badan Pusat Statistik sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

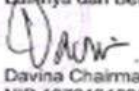
No.	Jenis Rekening	Data DJPb	Data BPS
1.	Rekening Pengeluaran	546	546
2.	Rekening Penerimaan	3	3
3.	Rekening Lainnya	3	3
	Jumlah	552	552

- Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh data sebagai berikut:

No.	Jenis Rekening	Data Sama	Data DJPb Tidak Ada di BPS	Data BPS Tidak Ada di DJPb	Keterangan
1.	Pengeluaran	546	-	-	
2.	Penerimaan	3	-	-	
3.	Lainnya	3	-	-	
	Jumlah	552	-	-	

- Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan Rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada kuasa BUN paling lambat 10 hari kerja ditantanganinya Berita Acara Rekonsiliasi ini.
- Hasil rekonsiliasi data rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

a.n. Direktur Pengelolaan Kas Negara Negara
 Kasubdit MRLPPB Direktorat PKN
 u.b.
 Kepala Seksi Pelaporan Pengelolaan Rekening Badan Pusat Statistik
 Lainnya dan Bendahara


 Davina Chairmanita
 NIP 197612182002122001

Petugas Rekon

 Rima Selma Indriani
 NIP 199905252021012004




 Arif Syahyanto
 NIP 198401242009021005

Secara rinci kondisi rekening aktif per 31 Desember 2025 pada Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada rekap tabel dibawah ini:

REKAP REKENING BADAN PUSAT STATISTIK 31 DESEMBER TA 2025					
No	Nama Rekening	Jenis Rekening	Nama Bank	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RKK Badan Pusat Statistik (Rek.Induk)	Giro	BRI	1	
	Bendahara Pengeluaran (BPG)	Virtual Account	BRI	329	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Virtual Account	BRI	11	
	Bendahara Penerimaan (BPN)	Giro	BRI	3	
	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	Giro	BRI	2	Hibah UNICEF dan OIKN
Jumlah Rek				345	
2.	RKK Badan Pusat Statistik (Rek.Induk)	Giro	BNI	1	
	Bendahara Pengeluaran/BPG	Virtual Account	BNI	98	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Virtual Account	BNI	-	
	Bendahara Penerimaan (BPN)	Giro	BNI	-	
	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	Giro	BNI	1	Hibah UNFPA
Jumlah Rek				99	
3.	RKK Badan Pusat Statistik (Rek.Induk)	Giro	Mandiri	1	
	Bendahara Pengeluaran/BPG	Virtual Account	Mandiri	71	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Virtual Account	Mandiri	3	
	Bendahara Penerimaan (BPN)	Giro	Mandiri	-	
	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	Giro	Mandiri	-	
Jumlah Rek				74	
4.	RKK Badan Pusat Statistik (Rek.Induk)	Giro	BSI	1	
	Bendahara Pengeluaran/BPG	Virtual Account	BSI	34	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Virtual Account	BSI	-	
	Bendahara Penerimaan (BPN)	Giro	BSI	-	
	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	Giro	BSI	-	
Jumlah Rek				34	
5.	RKK Badan Pusat Statistik (Rek.Induk)	Giro	BTN	1	
	Bendahara Pengeluaran/BPG	Virtual Account	BTN	-	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Virtual Account	BTN	-	
	Bendahara Penerimaan (BPN)	Giro	BTN	-	
	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	Giro	BTN	-	
Jumlah Rek				-	
Jumlah Total Rek (BPG+BPP+BPN+RPL)				552	
Catatan :					
1. Kondisi Rekonsiliasi Rekening tingkat K/L Triwulan IV per 31 Desember 202.					
2. Rekening Induk (RKK) tidak termasuk rekening yang direkon.					

Pada tabel terlihat BPS tercatat memiliki sebanyak 552 rekening aktif, yang terdiri atas:

- 532 rekening Bendahara Pengeluaran (BPG);
- 14 rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- 3 rekening Bendahara Penerimaan (BPN);
- 3 rekening pemerintah lainnya (RPL),

Data rekon rekening tercatat aktif untuk BPG sebanyak 532 rekening untuk periode 31 Desember 2025 antara BPS dan Kemenkeu, dikarenakan terdapat 2 (dua) rekening BPG aktif masing-masing pada satker BPS Kota Batu dan BPS Kota Bontang, sedang 2 (dua) rekening sudah tercatat aktif pada akhir Desember 2025 ada pada satker baru yaitu BPS Kabupaten Buton Tengah dan BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Daftar rekening aktif terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.4 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE I

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe I sebanyak 11 kegiatan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah/Dinas terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe I

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Mitra Kerja Sama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama BPS	6	BNN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, BGN (Badan Gizi Nasional), Kementerian Ekonomi Kreatif.
2	BPS Daerah	5	Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Badung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.
Jumlah		11	

Tabel 119
Rincian Kerjasama Swakelola Tipe I (Settama BPS)
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dukungan Perancangan Desain Sampling Dalam Rangka Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2025	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Plt. Sestama (Moh Edy Mahmud)
2.	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi	Kementerian Agama Republik Indonesia	Plt. Sestama (Moh Edy Mahmud)
3.	Penyusunan Publikasi Statistik Tenaga Kerja Pariwisata Tahun 2024	Kementerian Pariwisata	Plt. Sestama (Moh Edy Mahmud)
4.	Satu Data Statistik Pertanian Hortikultura	Kementerian Pertanian	Plt. Sestama (Moh Edy Mahmud)
5.	Survei Monitoring Dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis	BGN (Badan Gizi Nasional)	Plt. Sestama (Moh Edy Mahmud)
6.	Penyusunan Statistik Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Tahun 2024	Kementerian Ekonomi Kreatif	Plt. Sestama (Moh Edy Mahmud)

Tabel 120
Rincian Kerjasama Swakelola Tipe I (Daerah)
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Training dan Konsultasi Persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015, Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	Mukhamad Mukhanif

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Survei Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2025	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	Kepala BPS Kabupaten Badung
3.	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2025	Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Badung	Kepala BPS Kabupaten Badung
4.	Survei Ongkos Angkut Beras (OAB) Pegawai ASN distrik pedalaman Provinsi Papua	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	Kepala BPS Provinsi Papua
5.	Survei Penyesuaian Ongkos Angkut Beras (OAB) ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua Barat

F.5 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME PNBP

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme PNBP sebanyak 12 kegiatan. Nilai kerja sama berdasarkan PKS yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp39.211.734.000,00.

Tabel 121
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP
Berdasarkan Nilai PKS

Uraian	Jumlah Kerja sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama BPS	4	33.118.334.000	0	33.118.334.000
Polstat STIS	7	1.885.400.000	0	1.885.400.000
Pusdiklat	1	4.208.000.000	0	4.208.000.000
Jumlah	12	39.211.734.000	0	39.211.734.000

Tabel 122
Rincian Nilai Kerja Sama Swakelola Tipe II (Settama BPS)
Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJA SAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	NILAI KERJASAMA (PKS) (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	1.105.154.000	Non-APBN BPS
2.	Pengolahan Data Statistik Wisman berdasarkan MPD	Kementerian Pariwisata	Direktorat Statistik KTIP	8.370.000.000	Non-APBN BPS
3.	Survey Monev Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Badan Gizi Nasional	Plt. Sestama	17.431.273.000	Non-APBN BPS

4	Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara 2025	Otorita Ibu Kota Nusantara	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.	6.211.907.000	Non-APBN BPS -RPL
Jumlah				33.118.334.000	

Adapun penggunaan per rincian pada setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Barang dalam kegiatan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) senilai Rp1.062.946.835,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.105.154.000,00 digunakan untuk pembayaran belanja bahan, honor output kegiatan, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
2. Realisasi Belanja Barang dalam kegiatan Pengolahan Data Statistik Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD) sebesar Rp7.857.611.355,00 atau sebesar 94,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp8.370.000.000,00 digunakan untuk pembayaran belanja bahan, honor output kegiatan, barang non operasional lainnya, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan perjalanan dinas paket meeting luar kota.
3. Realisasi Belanja Barang dalam kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp13.478.734.136,00 dari pagu anggaran sebesar Rp17.431.273.000,00 digunakan untuk belanja bahan, honor output kegiatan, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting luar kota.
4. Realisasi Belanja dalam Kegiatan Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara 2025 sebesar Rp6.198.939.500,00 dari pagu anggaran Rp6.211.907.000,00 digunakan untuk belanja bahan, honor output kegiatan, jasa profesi, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas perjalanan dinas paket meeting dalam dan luar kota, dan belanja barang non operasional lainnya.

Tabel 123
Rincian Nilai Kerja Sama Swakelola Tipe II (Polstat STIS dan Pusdiklat)
Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Nama kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Politeknik Statistika STIS	1	Biaya pendidikan mahasiswa tugas belajar dari Negara Demokratik Timor Leste.
		6	Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara di bidang Statistika melalui Penyelenggaraan Program Sarjana Terapan (D-IV) Program Studi Diploma IV Statistika Tahun Akademik 2025/2026 sampai dengan Tahun Akademik 2028/2029 Pada Politeknik Statistika STIS.
2	Pusdiklat	1	Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025
Jumlah		8	

Anggaran kerja sama yang berasal dari Non APBN BPS sebesar Rp143.001.758.000,00 dan total realisasi BPS sebesar Rp130.589.481.431,00 atau 91,32 persen. Sumber dana kerja sama dengan mekanisme PNPB berasal dari Non APBN BPS. Rincian jenis dan jumlah kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 124
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP
Berdasarkan Anggaran dan Realisasi

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama	4			
Anggaran		33.118.334.000	0	33.118.334.000
Realisasi		28.597.931.826	0	28.597.931.826
Saldo		4.520.402.174	0	4.520.402.174
Persentase realisasi		86,35	0,00	86,35
Pusdiklat BPS	1			
Anggaran		4.208.000.000	0	4.208.000.000
Realisasi		3.366.400.000	0	3.366.400.000
Saldo		841.600.000	0	841.600.000
Persentase realisasi		80,00	0,00	80,00
Polstat STIS	7			
Anggaran		1.885.400.000	0	1.885.400.000
Realisasi		507.000.000	0	507.000.000
Saldo		1.378.400.000	0	1.378.400.000
Persentase realisasi		26,89	0,00	26,89
Total Pusat	12			
Anggaran		39.211.734.000	0	39.211.734.000
Realisasi		32.471.331.826	0	32.471.331.826
Saldo		6.740.402.174	0	6.740.402.174
Persentase realisasi		82,81	0,00	82,81
BPS Daerah	68			
Anggaran		103.790.024.000	0	103.790.024.000
Realisasi		98.118.149.605	0	98.118.149.605
Saldo		5.671.874.395	0	5.671.874.395
Persentase realisasi		94,54	0,00	94,54
Total Pusat & Daerah	80			
Anggaran		143.001.758.000	0	143.001.758.000
Realisasi		130.589.481.431	0	130.589.481.431
Saldo		12.412.276.569	0	12.412.276.569
Persentase realisasi		91,32	0,00	91,32

A. Kerja Sama PNBP-Non APBN BPS

Kerja sama mekanisme PNBP yang dibiayai dari Non APBN BPS adalah kerja sama dimana sumber pembiayaan kegiatannya berasal dari mitra kerja sama. Anggaran PNBP yang sudah tercatat dalam DIPA BPS sebesar Rp143.001.758.000,00 dan realisasi tercatat sebesar Rp130.589.481.431,00 atau 91,32 persen. Saldo sebesar Rp12.412.276.569,00 terdapat pada BUN. Rincian jenis dan nilai kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 125
Rekapitulasi Kerja Sama PNBP-Non APBN BPS

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
BPS Pusat				
Settama				
1	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat			
	Pelaksanaan SNLIK tahun 2025	1.105.154.000	1.062.946.835	42.207.165
2	Direktorat Statistik KTIP			
	Pengolahan Data Statistik Wisman berdasarkan MPD	8.370.000.000	7.857.611.355	512.388.645
3	Direktorat Statistik Neraca Produksi			
	Survey Monev Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	17.431.273.000	13.478.734.136	3.952.538.864
4	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan			
	Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara 2025	6.211.907.000	6.198.639.500	13.267.500
Pusdiklat				
1	Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025	4.208.000.000	3.366.400.000	841.600.000
Polstat STIS				
1	Pelaksanaan Program Sarjana Terapan Bidang Statistika Dan Sarjana terapan Bidang Komputasi Statistik Di Politeknik Statistika STIS Mulai Tahun Akademik 2023/2024	1.138.500.000	377.000.000	761.500.000
2	Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara Di Bidang Statistika Melalui Penyelenggaraan Program Sarjana Terapan (D-IV) Program Studi Diploma IV Statistika Tahun Akademik 2025/2026 Sampai Dengan Tahun Akademik 2028/2029 Pada Politeknik Statistika STIS.	746.900.000	130.000.000	616.900.000
BPS Provinsi				
34	Kepala Provinsi			
	Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	5.901.314.000	5.539.759.377	361.554.623
34	Kepala Provinsi			
	Pendataan pada Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis	97.888.710.000	92.578.390.228	5.310.319.772
Jumlah		143.001.758.000	130.589.481.431	12.412.276.569

B. Kerja Sama PNBP- APBN BPS

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Badan Pusat Statistik tidak melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme PNBP yang bersumber dari APBN BPS.

F.6 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME RPL

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme RPL sebanyak 2 Program/kegiatan. Nilai kerjasama berdasarkan RPL sebesar Rp490.400.000,00 Realisasi Sebesar Rp205.500.000,00 sisa anggaran sebesar Rp284.900.000,00.

Tabel 126
Kerjasama Swakelola Tipe II (RPL)
Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJA SAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	NILAI ANGGARAN (PKS) (Rp)	REALISASI	Sisa Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pendidikan Pascasarjana Jenjang Strata 2 (S2) Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga-Splitsite UWA Master Of Public Policy Tahun 2025	Universitas Airlangga	Kapusdiklat	454.900.000	170.000.000	284.900.000
2.	Adendum Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Tahun 2022 Untuk Tahun Anggaran 2025	Universitas Indonesia	Kapusdiklat	35.500.000	35.500.000	0
Jumlah				490.400.000	205.500.000	284.900.000

Tabel 127
Kerjasama Layanan Administrasi Umum dan Kerahasiaan Data
Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Layanan Administrasi Umum		
1.	Penyediaan Layanan Perbankan Pembayaran penghasilan Pegawai dan Penghasilan Lainnya serta Fasilitas Layanan Perbankan Lainnya.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Plt. Sekretaris Utama BPS
2.	Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BPS
B.	Pertukaran Data		
1.	Pertukaran dan Pemanfaatan Data/atau Informasi Statistik dalam Rangka Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Plt. Sekretaris Utama BPS
2.	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Ekonomi dan Sosial	Dewan Ekonomi Nasional (DEN)	Plt. Sekretaris Utama BPS
3.	Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Sektor Ekonomi dan Sosial	Kementerian Pariwisata	Plt. Sekretaris Utama BPS
4.	Penyediaan Data Statistik Pariwisata di Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dan Tiga Destinasi	Kementerian Pariwisata	Direktur Komunikasi, Teknologi dan Informasi

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pariwisata Regeneratif Tahun 2025		
5.	Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Integrasi Data Imigrasi Internasional Indonesia dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Plt. Sekretaris Utama BPS
6.	Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi terkait Investasi dan Hilirisasi	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Plt. Sekretaris Utama BPS
7.	Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik SubSektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Kementerian Pertanian	Plt. Sekretaris Utama BPS
8.	Pertukaran, Penyediaan, Pemanfaatan, dan Informasi Statistik Tanaman Perkebunan	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	Plt. Sekretaris Utama BPS
9.	Pertukaran, Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Pangan.	PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Plt. Sekretaris Utama BPS
10.	Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Data dan Statistik Harga	Bank Indonesia	Plt. Sekretaris Utama BPS
11.	Kerahasiaan Pemanfaatan Data Pemberi Kerja Kerja/Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan statistik	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
12.	Penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data, dan/atau informasi statistik dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Deputi Bidang Statistik Sosial
13.	Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan Optimalisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Plt. Sekretaris Utama BPS
14.	Pertukaran Dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik Terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)	Deputi Bidang Statistik Sosial

F.7 HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Badan Pusat Statistik menjalin kerja sama dengan pihak lain melalui mekanisme Hibah Langsung Dalam Negeri baik sebagai penerima Hibah dari mitra kerja sama dan pemberi Hibah kepada mitra kerja sama dengan nilai sebesar Rp4.324.570.475,00 dalam bentuk barang.

- A. BPS sebagai pihak yang menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp437.917.475,00. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 128
Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A.C Split	Pemda Kab Lampung Barat	Kepala BPS	36.840.900	
2.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pemda Kab Lampung Barat	Kepala BPS	4.928.400	
3.	Lap Top	Pemda Kab Lampung Barat	Kepala BPS	49.300.650	
4.	Gedung Pos Jaga Permanen	Bank BRI Cabang Liwa Lampung Barat	Plt. Kepala BPS	48.352.000	
5.	Kompas Gas (Alat Dapur)	Perorangan	Kepala BPS Kab. Minahasa	480.000	
6.	Loudspeaker	Perorangan	Kepala BPS Kab. Minahasa	3.000.000	
7.	Lemari Es	Perorangan	Kepala BPS Kab. Minahasa	2.858.000	
8.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemda Kab. Maluku Barat Daya	Kepala BPS Kab. Maluku Barat Daya	10.042.550	
9.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Perorangan	Kepala BPS Kab. Bima	44.313.000	
10.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Perorangan	Kepala BPS Kab. Dompus	56.232.000	
11.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemda Kabupaten Kupang	Plt. Kepala BPS	90.000.000	
12.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemda Kabupaten Sabu Raijua	Plt. Kepala BPS	7.589.975	
13.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Pemda Kab. Gorontalo	Kepala BPS Kab. Gorontalo	83.980.000	
Jumlah				437.917.475	

- B. BPS sebagai pihak yang menghibahkan barang kepada Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp3.886.653.000,00 berupa tanah, gudang kantor permanen, dan pagar permanen. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 129
Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemda Kab Ciamis	Plt. Kepala BPS	1.208.358.000	
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemda Kota Banjar	Plt. Kepala BPS	1.120.560.000	
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemda Kab Seruyan	Plt. Kepala BPS	735.708.000	

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Tanah Bangunan Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemda Kota Serang	Plt. Kepala BPS	822.027.000	
Jumlah				3.886.653.000	

F.8 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

F.8.1 Kerja Sama Hibah dalam Bentuk Uang

Pada periode T.A. 2025 Satker Settama BPS melakukan kerja sama dalam bentuk hibah uang dan jasa. Kerja sama dalam bentuk hibah luar negeri dalam bentuk uang dan jasa tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 130
Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (Bentuk Uang)
TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Donor	No. Register	Dana Dalam DIPA	Saldo Awal Hibah	Pendapatan Hibah s.d. 31 Des. 2025	SP2HL/MPHL-BJS	SP4HL	Saldo Sisa Dana Hibah	Penanggung Jawab Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)-(7+8)	(10)
1.	UNFPA	2NZ4UCWA	2.659.241.000	0	2.659.517.243	2.659.517.243	70.252.299	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan
2.	UNICEF	2PG3K7NA	572.743.000	0	568.916.800	558.775.111	10.141.689	0	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Hibah Uang			3.231.984.000	0	3.228.434.043	3.218.292.354	80.393.988	0	
3.	UNFPA	2NZ4UCWA	0	0	217.870.022	217.870.022	0	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan
4.	PROSPERA	23TSVZA	0	0	18.961.036.025	18.961.036.025	0	0	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
Jumlah Hibah Jasa			0	0	19.178.906.047	19.178.906.047	0	0	

Sedangkan untuk rincian dokumen pengesahan dan pengembalian dapat dilihat sebagai berikut:

No	Donor	Nomor Register	Daftar Rincian						Keterangan
			SPH2L			SP4HL/MPHL-BJS			
			Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	UNFPA	2NZ4UCWA	03871A	31-12-2025	2.589.264.944	03874A	31-12-2025	70.252.299	Hibah Uang
2.	UNICEF	2PG3K7NA	03870A	31-12-2025	558.775.111	03873A	31-12-2025	10.141.689	Hibah Uang
						Jumlah SP4HL		80.393.988	
3.	UNFPA	2NZ4UCWA	-	-	-	03850A	31-12-2025	217.870.022	Hibah Jasa
4.	PROSPERA	23TSV7CA	-	-	-	03851A	31-12-2025	18.961.036.025	Hibah Jasa
						Jumlah MPHL-BJS		19.178.906.047	
Jumlah SP2HL					3.148.040.055	Jumlah SP4HL dan MPHL-BJS		19.259.300.035	

Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) adalah sebagai berikut:

1) **United Nations Population Fund (UNFPA) per 31 Desember 2025.**

- Nama Hibah: UNFPA siklus ke-10 (Tahun 2021-2025).
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA sesuai surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen nomor S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Tanggal Penandatanganan NPH: 21 Januari 2021.
- Tanggal Efektif NPH: 1 Januari 2021.
- Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
- Nomor rekening RPL 140 PDHL BPS untuk 2NZ4UCWA.
- Nilai Hibah sebesar Rp2.659.517.243,00
- Saldo awal sebesar Rp0,00.
- Pendapatan sebesar Rp2.659.517.243,00 sudah dilakukan Revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 pada Revisi ke 14 tanggal 14 Januari 2026 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03871A Tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.659.517.243,00.
- Belanja sebesar Rp2.589.264.944,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03871A tanggal 31 Desember 2025.
- *Refund* sebesar Rp70,252,299.00 dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) nomor 03874T/018576/2025 Tanggal 31 Desember 2025.
- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNFPA 2021-2025, sesuai surat perjanjian hibah tanggal 21 Januari 2021 dan sesuai Annual Workplan (AWP) tahun 2025 IDN10PDA tanggal 31 Januari 2025 dan terdapat revisi AWP yang merubah nilai hibah sebelumnya di awal Rp2.172.743.400,00 menjadi Rp2.659.241.400,00.

- Kegiatan yang difokuskan pada Program-Program Dinamika Kependudukan dan Analisis Data yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang berkualitas dan analisis keterkaitannya dengan kebijakan dan program nasional.
- Dukungan pada tahun 2025 berfokus terhadap:
 - Finalisasi Indikator Demografi SDGs (Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatal, Angka Fertilitas Remaja, MCPR, dan *Unmet Need*) Menggunakan Estimasi Wilayah Kecil (SAE).
 - Pengembangan kerangka kerja berdasarkan hasil indikator demografi SDG's.
 - Uji lapangan estimasi parameter demografi menggunakan Estimasi Wilayah Kecil (SAE) untuk menghasilkan data agregat pada tingkat sub-nasional (di Kota Kupang, Kab. Probolinggo dan Kab. Lombok Timur).
 - Pertemuan teknis untuk mengumpulkan masukan mengenai kebutuhan dan harapan untuk menyusun pedoman nasional dan laporan praktik baik.
 - Mekanisme yang disepakati untuk mengembangkan interoperabilitas antara sistem data yang ada untuk mendukung monitoring SDGs di tingkat sub-nasional.
 - Lokakarya Pengembangan Indikator Demografi untuk Laporan Statistik Vital Indonesia 2025.
 - Lokakarya Pengembangan Platform Satu Data Indonesia tentang Migrasi Internasional.
 - Lokakarya Penyusunan Materi *Knowledge Sharing* (dokumen teknis dan slide deck) untuk Metode Kombinasi SP2020.
 - Groundcheck Rumah Tangga Kematian Ibu Berdasarkan Hasil SUPAS 2025 yang Belum Tercatat di MPDN (di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Provinsi DIY dan Provinsi Sumatera Selatan).

2) United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) per 31 Desember 2025.

- Nama Hibah: Country Program Action's Fund 2021-2025
- Nomor register 2PG3K7NA (sesuai surat DJPPR nomor S-469/PR.8/2021).
- Tanggal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH): 5 Maret 2021.
- Tanggal Efektif NPH: 5 Maret 2021.
- Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
- Nilai hibah sebesar 444.155 USD.
- Nomor rekening RPL 140 PDHL SETAMA BPS untuk 2PG3K7NA.
- Saldo awal sebesar Rp0,00.
- Pendapatan sebesar Rp568.916.800,00 sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03870T tanggal 31 Desember 2025.
- Belanja sebesar Rp558.775.111,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03870T tanggal 31 Desember 2025.
- *Refund* sebesar Rp10.141.689,00 kepada UNICEF dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) nomor 03873T tanggal 31 Desember 2025.

- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF 2021-2025, sesuai *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2021-2025 tanggal 23 Desember 2020 dan sesuai *Programme Document* (ProDoc) 2021-2025 tanggal 5 Maret 2021, yaitu untuk kegiatan Peningkatan penggunaan data statistik oleh pemangku kebijakan terutama untuk perencanaan dan monitoring kebijakan yang terkait tentang anak dengan menggunakan hasil survei rumah tangga, sensus, dan big data.
- Output Tahun 2025 meliputi Persiapan Penghitungan Indikator Perkembangan Anak (ECDI) Menggunakan Metode *Small Area Estimation* (SAE) Tahun 2025, Persiapan Time Use Survey 2026, serta Persiapan dan Launching Laporan Profil Statistik Remaja Indonesia.

Selain itu Satker Sekretariat Utama menerima hibah dalam bentuk Jasa dari:

1. **United Nations Population Fund (UNFPA) per 31 Desember 2025.**

- Nama Hibah: UNFPA Siklus ke-10 (Tahun 2021-2025)
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA, sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Nomor: S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-1014/02200/KU.300/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program UNFPA Siklus ke-10 nomor 527/PDA/12-2025 tanggal 29 Desember 2025.
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai nomor B-64/02100/KU.600/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar 13,302.00 (USD) atau Rp217.870.022,00 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 03850A tanggal 31 Desember 2025.
- Digunakan untuk membiayai kegiatan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Program Tahun 2025.
- Output berupa pendampingan Konsultan Individu untuk Implementasi *Small Area Estimation* (SAE) dan Optimalisasi Dashboard SDGs Nasional guna Meningkatkan Keandalan Data SDGs Tingkat Lokal, Perjalanan Uji Lapangan Kerangka dan Metode SAE ke Lombok Timur dengan tujuan: Estimasi parameter demografi utama dan penyusunan data sub-nasional terpilah, Perjalanan ke Bogor – Kerangka Dashboard SDG's dan Interoperabilitas Sistem, Perjalanan ke Kupang dan Surabaya – Validasi Kerangka SAE dan Dashboard SDG's, Perjalanan ke Yogyakarta untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

2. Hibah dalam bentuk Jasa dari Kedutaan Australia, *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yaitu:

- Nama Hibah: *Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)*.
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): SA.04.12.2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Nomor register: 23TSV7CA, sesuai surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Nomor: S-262/PR.8/2023 tanggal 5 April 2023.
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-61/02100/KU.600/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program PROSPERA nomor B-76/02100/KU.700/2025 tanggal 3 November 2025.
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai surat nomor B-62/02100/KU.600/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar AUD1.880.682,01 atau IDR 18.961.036.024,82 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 03851A tanggal 31 Desember 2025.
- Digunakan untuk membiayai kegiatan *Advisory* dan *Australian Public Service*.
- Output kegiatan adalah:
 - a. Basis bukti yang lebih kuat untuk kebijakan yang lebih baik
 - b. Peningkatan kapasitas data dan keterampilan statistik
 - c. Peningkatan pemanfaatan data administrasi
 - d. Proses bisnis yang terintegrasi
 - e. Berkurangnya beban bagi penyedia data
 - f. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan praktik penjaminan mutu
 - g. Berbagi pengetahuan dan wawasan
 - h. Peningkatan kolaborasi internal dan eksternal
 - i. Penguatan kemitraan
 - j. Penerapan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung kesetaraan gender dan disabilitas

Dokumen hibah tersebut di atas terlampir pada Lampiran Pendukung II Laporan Keuangan.

F.9 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Badan pusat Statistik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing PN adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional VII – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Pelaksanaannya Prioritas Nasional VII diantaranya melalui 3 (tiga) Program Prioritas, yang tersebar di 526 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp82.063.742.000,00 dan realisasi sebesar Rp61.987.721.081,00 (75,54 persen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131
Rincian Output Prioritas Nasional VII

Program/Kegiatan Prioritas	Nama RO	Pagu	Realisasi	%	Satuan	Target	Capaian Output	% Capaian Output
GG.2896.QMA.006	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi	36.943.244.000	30.997.422.771	83,91	Layanan	14	14	100
GG.2897.QDB.003	Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral	14.102.354.000	7.890.379.460	55,95	Lembaga	547	547	100
GG.2903.QMA.006	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	31.018.144.000	23.099.918.850	74,47	Layanan	193	193	100
Grand Total		82.063.742.000	61.987.721.081	75,54		754	754	100

F.10 PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Badan Pusat Statistik (BPS) periode 31 Desember Tahun 2025 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan Program Dukungan Manajemen yang tersebar di 528 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp5.818.983.499.000,00 dan realisasi sebesar Rp5107.021.687.613,00 (87,76 persen) dengan rincian terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.11 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 disusun berdasarkan aplikasi MonSAKTI dengan pedoman dari surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu:
 - Surat nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun 2025 (Unaudited),
 - Surat nomor S-18/PB/2026 tanggal 23 Januari 2026 perihal Pengaturan Kembali Atas Perpanjangan Penyelesaian Administrasi terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 terhadap:
 - Pengajuan register hibah
 - Penyelesaian register hibah

- Pengajuan revisi DIPA
 - Penyelesaian revisi DIPA
 - Pengajuan penyelesaian administrasi ke KPPN
 - Penyelesaian LPJ Bendahara Desember 2025 ke KPPN
 - Penyelesaian rekonsiliasi periode 12.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-86/PB/2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 Audited dan rekonsiliasi tiga pihak (tripartit) antara Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2026 untuk membahas koreksi data laporan keuangan.
2. Rincian Penggolongan Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.
 3. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (LHP) pada tanggal 15 Januari 2026, Implementasi *Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)* Tahun 2025 di Lingkungan BPS berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09.2019 tentang Pemerintah Pusat. Penerapan dan penilaian PIPK dilakukan terhadap akun signifikan yang telah disepakati dan ditetapkan objek PIPK Tahun 2025 yaitu akun *Persediaan (117xxx)* dan *BBDM (114xxx)*. Berdasarkan hasil penilaian PIPK bahwa penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ***Efektif dan Memadai***.
 4. Berdasarkan data MonSAKTI pada To Do List, BPS masih ada selisih pada akun Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB dan Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan. Rincian terdapat pada lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan.



Jakarta, 8 Mei 2026

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti